

**PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI  
KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO  
(Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Tentang Manjaga Harta)**

**Tesis**

**OLEH  
MOH AINUR RIZQI  
NIM 17801012**



**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARI'AH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) DALAM UPAYA  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI  
KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO  
(Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Tentang Menjaga Harta)**

Tesis  
Diajukan kepada  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim  
Malang untuk memenuhi salah satu persyaratan  
dalam menyelesaikan Program Magister  
Ekonomi Syariah

OLEH  
MOH AINUR RIZQI  
NIM 17801012

**PROGRAM MAGISTER EKONOMI SYARIAH  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN

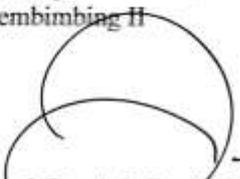
Tesis dengan judul **“Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi)”** ini telah diperiksa dan disetujui untuk di uji,

Malang,  
Pembimbing I



**Dr. Nur Asnaw, M.Ag**  
NIP. 19711211199031003

Malang,  
Pembimbing II



**Prof. Dr. Ach Sani, M.Si**  
NIP. 197202122003121003

Malang,  
Mengetahui,  
Ketua Program Studi Magister Ekonomi Syariah

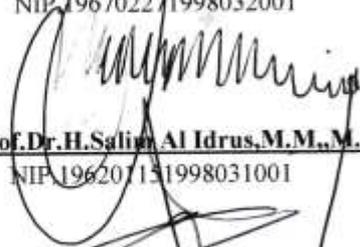
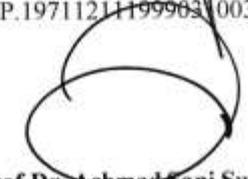


**Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA.**  
NIP. 197307192005011003

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis ini berjudul “Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Tentang Menjaga Harta)” ini telah uji dan dan dipertahankan di depan sidang *online* dewan penguji sidang pada tanggal 12 januari 2021.

Dewan Penguji.

 <u>Dr. Hj. Umrotul Khasanah, M.Si</u> NIP.196702271998032001	Ketua
 <u>Prof. Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag</u> NIP.196207151998031001	Penguji Utama
 <u>Prof. Dr. Nur Asnaw, M.Ag</u> NIP.197112111999031003	Anggota
 <u>Prof. Dr. Ashmad Sani Supriyanto, S.E., M.Si.</u> NIP.197202122003121003	Anggota

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. Ak  
NIP.196903032000031002

## SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moh Ainur Rizqi  
NIM : 17801012  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa tesis yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul **“Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Tentang Menjaga Harta)”** adalah hasil karya saya sendiri dan bukan duplikasi dari karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian ini terbukti ada unsur penjiplakan dan klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 23 November 2020



Moh Ainur Rizqi  
NIM. 17801012

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Tentang Menjaga Harta)” dengan baik dan tepat waktu.

Dalam penyusunan tesis ini, peneliti banyak mendapatkan bantuan, pengarahan, bimbingan, kritik dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti ingin menghaturkan rasa hormat sebagai penghargaan dalam rasa terimakasih yang tulus kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku Ketua Prodi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya, memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Prof.Dr. Ach. Sani, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan saran dan kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Kedua Orang tua peneliti, yang senantiasa memberi semangat, memotivasi, mendampingi dan tiada henti mendoakan peneliti dalam proses penyelesaian tesis ini.

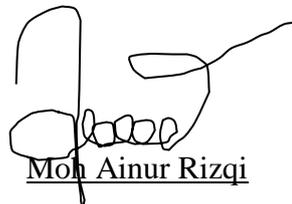
7. Alm Ahmad Fadol Bapak angkat tercinta dan tersayang yang selalu memberikan semangat, perhatian, doa, kasih sayang dan pengertian selama studi.
8. Seluruh keluarga yang selalu memberi semangat tiada henti demi membantu melancarkan proses menempuh kuliah sampai akhir.
9. Semua teman-teman satu angkatan prodi Ekonomi Syariah yang telah menemani selama dalam perkuliahan dan selalu kompak dalam semua hal
10. Teman-teman kontrakan EnJe seperjuangan
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namun memberikan banyak dukungan atas penyelesaian tesis ini.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan ini selanjutnya.

Akhirnya, peneliti berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat, khususnya bagi peneliti dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin.*

Probolinggo, 23 November 2020

Peneliti,



Moh Ainur Rizqi

NIM. 17801012

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
MOTTO.....	xiv
PERSEMBAHAN .....	xv
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xvi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....	xvii
ABSTRAK BAHASA ARAB.....	xviii
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian.....	16
C. Tujuan Penelitian .....	16
D. Manfaat Penelitian .....	16
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	17
F. Definisi Istilah.....	29
<b>BAB II : KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
<b>A. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Pengelolaan.....	31
2. Pengelolaan Dalam Islam .....	33
a. Pengelolaan Dalam Islam .....	33

b. Prinsip Pengelolaan Dalam Islam .....	34
c. Karakteristik Pengelolaan Dalam Islam .....	35
3. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan .....	36
a. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan .....	36
b. Fungsi, Tujuan, dan Manfaat TPI .....	37
c. Struktur Organisasi TPI .....	39
d. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan .....	41
e. Landasan Hukum lelang di Indonesia .....	43
f. Indikator Kinerja Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan TPI .....	44
g. Lelang Dalam Pandangan Islam .....	46
<b>B. Konsep Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah .....</b>	<b>48</b>
1. Pengertian Kesejahteraan .....	48
2. Prinsip Dan Faktor Kesejahteraan .....	53
3. Kesejahteraan Menurut Pakar Ekonomi .....	53
4. Indikator dan Kreteria Kesejahteraan .....	56
5. Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah .....	58
a. Pengertian Maqashid Syariah Imam Syatibi .....	58
b. Pokok Maqashid Syariah .....	60
<b>C. Kerangka Berpikir .....</b>	<b>64</b>
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>65</b>
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian .....	65
B. Kehadiran Penelitian .....	66
C. Latar Penelitian .....	67
D. Data Dan Sumber Penelitian .....	68
E. Teknik Pengumpulan Data .....	70
F. Analisis Data .....	74
G. Keabsahan Data .....	76
<b>BAB IV PAPARAN DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>79</b>
A. Gambaran Umum Latar Penelitian .....	79

B. Paparan Data dan Hasil Temuan .....	85
1. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo .....	85
2. Kendala-Kendala Proses Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.....	102
3. Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Kajian Dalam <i>Maqashid Syrariah</i> Tentang Menjaga Harta Perspektif Imam Al-Syatibi.....	107
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>116</b>
A. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo .....	116
B. Kendala-Kendala Proses Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.....	121
C. Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Kajian Dalam <i>Maqashid Syrariah</i> Tentang Menjaga Harta Perspektif Imam Al-Syatibi .....	126
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>134</b>
A. Kesimpulan .....	134
B. Saran.....	135

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Produksi Peerikanan Tangkap Tahun 2015-2019 .....	9
Tabel 1.3 Orisinalitas Penelitian .....	32
Tabel 2.1 Indikator Keluarga Sejahtera Berdasarkan Badan Pusat Statistik Tahun 2018 .....	55
Tabel 3.1 Sasaran Observasi .....	69
Tabel 3.2 Wawancara.....	71
Tabel 3.3 Dokumen.....	73
Tabel 4.1 Nama Desa Dan Jumlah Pendududuk Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.....	79
Tabel 4.2 Data Kondisi Fasilitas Pokok Dan Pemanfaatan TPI Paiton .....	94
Tabel 4.3 Data Fasilitas Fungsional Dan Pemanfaatan TPI Paiton .....	96
Tabel 4.4 Permasalahan Proses Lelang Di TPI Paiton.....	108
Tabel 4.5 Penjagaan Maqashid Syariah .....	114

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Presentase Produksi perikanan laut di wilayah utara dan selatan jawa timur 2015-2019 .....	4
Gambar 1.2 presentase tempat pelelangan ikan TPI di wilayah utara dan selatan jawa timur tahun 20015-2019 .....	6
Gambar 2.1 kerangka berfikir .....	63
Gambar 4.1 peta TPI Kecamatan Paiton .....	81
Gambar 4.2 produksi perikanan tangkap kecamatan paiton .....	88
Gambar 4.3 alur pendaratan hasil tangkap ikan di TPI Kecamatan Paiton.....	91

## **LAMPIRAN**

1. Dokumentasi wawancara
2. Foto wawancara
3. Surat ijin penelitian

## MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih"

(Surah Al-Ibrahim 7)

## **PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua yang telah memberi dukungan moral maupun material demi anaknya tercinta
2. Alm.ach Fadol selaku orang yang menyayangi dan peduli terhadap peneliti.
3. Teman-teman yang selalu membantu dan memberi semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

## ABSTRAK

Ainur Rizqi, Moh, 2020. *Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Tpi) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo (Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Tentang Menjaga Harta)*. Tesis, Program Pascasarjana Ekonomi Syariah. Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing (I): Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag. (II): Prof.Dr. Ach. Sani, M.Si.

Kata Kunci: Pengelolaan TPI, Maqashid Syariah

Tempat pelelangan ikan di Kecamatan Paiton menjadi sarana transaksi hasil laut, hasil tangkapan ikan yang dihasilkan oleh para nelayan yang seharusnya dilelang dan dikelola oleh TPI, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan TPI paiton dipandang belum optimal karena beberapa kendala dan fasilitas yang tersedia. Ikatan yang kuat antara nelayan dengan bakul/tengkulak mempengaruhi aktifitas perikanan di TPI paiton, Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Menganalisis Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 2) Menganalisis kendala-kendala Proses Lelang Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. 3) Menganalisis upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Kajian Dalam *Maqashid Syariaah* Tentang Menjaga Harta Perspektif Imam Al-Syatibi.

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan sumber data dalam penelitian ini meliputi: kepala TPI Kecamatan Paiton, tengkulak/bakul, Para Nelayan, dan Teknik Pengumpulan data: Observasi, Wawancara, dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif, yaitu: Reduksi data, penyajian data, verifikasi. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan ketekunan dan Treigulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Paiton sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik yaitu dengan fasilitas dan fungsionalnya sudah dimanfaatkan oleh para nelayan, Namun masih belum melaksanakan proses Lelang Ikan sendiri melainkan di lelang oleh tengkulak/ pengambek. 2) kendala-kendala TPI Kecamatan Paiton melakukan proses lelang *Pertama*, harga ikan yang dilelang oleh TPI paiton cenderung lebih murah. *Kedua* keterikatan modal kepada tengkulak *Pengambek* dan kurangnya akses permodalan bagi nelayan. *Ketiga* masih ada biaya pajak penjualan ikan. 3) dalam tinjauan Maqashid syariah Imam Syatibi tentang menjaga harta untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan Kecamatan Paiton sudah optimal yang dikategorikan dalam bentuk *Dharurriyat* seperti kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain. Terpenuhi aspek *hajiyyat* memahami syariat jual beli dan pemberian modal kepada nelayan, dan *tahsiniyyat* seperti menghindari diri dari pengecohan dan peniuan dalam proses transaksi lelang ikan.

## ABSTRACT

Ainur Rizqi, Moh, 2020. Management of Fish Auction Places (TPI) to Improve Fishermen Community Welfare in Paiton District, Probolinggo Regency (Study of Islamic Maqashid Imam Al-Syatibi About Safeguarding Assets). Thesis, Graduate Program in Islamic Economics. Postgraduate program at the Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor (I): Dr. H. Nur Asnawi, M. Ag. (II): Prof. Dr. Ach. Sani, M.Si.

Keywords: TPI Management, Maqashid Syariah

The fish auction in Paiton District is a means of transactions for marine products, fish catches produced by fishermen that should be auctioned off and managed by TPI, but the management and utilization of TPI Paiton is considered not optimal due to several constraints and available facilities. The strong bond between fishermen and baskets / middlemen affects fishery activities at TPI Paiton. Based on this background, this study aims to determine: 1) To analyze the management of fish auction places (TPI) to improve the welfare of fishermen in Paiton District, Probolinggo Regency. 2) Analyze the constraints of the Fish Auction Place (TPI) Auction Process in Paiton District, Probolinggo Regency. 3) Analyzing Efforts in Improving the Welfare of Fishermen Communities in Paiton Subdistrict, Probolinggo Regency A Study in Maqashid Syariah About Protecting Assets from the Perspective of Imam Al-Syatibi.

The research used a qualitative method with a case study approach, and the data sources in this study included: the head of the Paiton District TPI, middlemen / baskets, fishermen, and data collection techniques: observation, interviews, documentation, while the data analysis technique used descriptive qualitative analysis, namely : Data reduction, data presentation, verification. Checking the validity of the data was done with persistence and triangulation.

The results showed that: 1) the management of the Fish Auction Place (TPI) in Paiton District has carried out its duties and functions properly, namely the facilities and functions have been utilized by fishermen, but still have not carried out the fish auction process itself but are auctioned by middlemen / pengambang . 2) the obstacles of the Paiton TPI in conducting the auction process. First, the price of fish auctioned by the Paiton TPI tends to be cheaper. Second, the attachment of capital to pengambang middlemen and lack of access to capital for fishermen. Third, there is still fish sales tax. 3) According to Imam Syatibi's Maqashid sharia review regarding safeguarding assets to improve the welfare of fishermen in Paiton District, it has been optimally categorized in the form of Dharurriyat such as property ownership and the prohibition of taking other people's property. Fulfillment of the hajjiyyat aspect of understanding the shari'a of buying and selling and providing capital to fishermen, and tahsiniyyat such as avoiding deception and deception in the fish auction transaction process.

## مستخلص البحث

عين الرزقي، محمد، 2020. إدارة مزاد الأسماك لترقية مصلحة الأمة ببيطان بروبونجو (دراسة المقاصد الشرعية لإمام شاطبي). رسالة الماجستير، قسم الإقتصادي الشرعي كلية الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف الأول: د. نور أسناوي الحاج، والمشرف الثاني: د. احمد ساني.

### الكلمات الإشارية: إدارة مزاد الأسماك، المقاصد الشرعي

صارت إدارة مزاد الأسماك ببيطان بروبونجو الوسائلَ لمعاملات البحرية، يجب بيع أسماك الفلاحين بالمزاد وإدارتها، ولكن مع ذلك فإن إدارة مزاد الأسماك ببيطان بروبونجو لم تكن كاملاً بسبب المشكلات ونقص الوسائل الموجودة. إن الرابطة القوية بين الفلاحين والوسطين تؤثر الأنشطة السمكية في إدارة مزاد الأسماك ببيطان. نظراً إلى خلفية البحث فكانت أهداف هذا البحث هي: (1) تحليل إدارة المزاد الأسماك ببيطان. نظراً إلى الفلاحين ببيطان بروبونجو. (2) تحليل مشكلات عملية المزاد الأسماك في إدارة مزاد الأسماك ببيطان بروبونجو. (3) تحليل إدارة مواقع مزادات الأسماك (TPI) لتحسين رفاهية الصيادين في مقاصد الشريعة دراسة منظور الإمام الشاطبي في منطقة ببيطان بروبونجو.

منهج هذا البحث هو المدخل الكيفي بالدراسة الحالة، ومصادر البيانات في هذا البحث هي مدير إدارة مزاد الأسماك ببيطان والوسطين والفلاحين. وأدوات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والوثائق. وإما تحليل البيانات للبحث الوصفي هو تفسير تقليل البيانات وعرض البيانات والتحقق وصحة البيانات والتثليث.

ونتايج البحث، هي: (1) جرت إدارة مزاد الأسماك ببيطان بروبونجو على وظيفتها كاملاً يعني يستجدم الفلاحين الوسائل جيدةً، ويقضى الوسطين مزاد الأسماك.

(2) والعقوبات في إدارة مزاد الأسهم ببيطان بروبونجو هي أولاً، إجراء مزاد الأسهم بسعر أقل. ثانياً، التعلق برأس المال مع الوسطين. ثالثاً، هناك ضريبة مبيعات الأسهم. (3) نظراً إلى مقاصد الشرعي إمام شاطبي أن إدار مزاد الأسهم ببيطان كانت متكاملةً التي تتم تصنيفها في شكل الذريات وبالمعنى الإنجاز في الحفاظ على خمس أشياء هي الدين والروح والعقل والنسب والمال. تحققت جوانب الذريات فتققت كذلك الحاجيات والتحسينيات.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, potensi perikanan dimaksudkan sebagai potensi meningkatkan kesejahteraan dan menyelesaikan kemiskinan. Dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan jelas disebutkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah di samping meningkatkan taraf hidup nelayan, juga diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan penerimaan dan devisa negara, kesempatan kerja, kebutuhan konsumsi protein ikan, optimalisasi pengelolaan sumberdaya ikan, dan menjamin kelestarian. Mengenai konsep pengelolaan sendiri sebenarnya juga dengan tegas disebutkan Pasal 2 UU Perikanan, di mana pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.<sup>1</sup>

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra-produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Oleh karena adanya pembangunan tempat pelelangan ikan diharapkan mampu meningkatkan

---

<sup>1</sup> Marindi Briska Yusni, dan Eko Budi Santoso, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengembangan subsektor Perikanan Tangkap di Pesisir Selatan Kabupaten Tulungagung Dengan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Teknik ITS. Vol 6. No 02

produksi, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan perekonomian daerah.

Untuk itu Pemerintah menyiapkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan perlengkapannya serta jaminan terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam Pelabuhan Perikanan Pantai, sebagai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelaksanaan lelang.

Selanjutnya yaitu mengenai pandangan Islam bahwa manusia sebagai khalifah di bumi memiliki amanah dan bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi beserta isinya.<sup>2</sup> Pengertian khalifah bukan hanya pemimpin melainkan juga dapat diartikan sebagai pengelola, pemegang amanah untuk mengelola sumber daya yang ada di bumi ini dengan arif dan bijaksana.

Pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) yang baik dan optimalisasi dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Keberadaan TPI semestinya dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan dan pembangunan pelabuhan perikanan atau tempat pelelangan ikan dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (PAD).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Qur'an Surat Al-Baqarah : 30

<sup>3</sup> Sri Hartanti, Rinda Noviyanti, Lina Warlina, *Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Gebang Kabupaten Cirebon Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan*, *Jurnal Matematika Sains dan Teknologi*, 2019.vol 20. Nomor 1. Hal 20-29.

Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) menurut Wiyono merupakan salah satu fungsi utama dalam kegiatan perikanan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha dan kesejahteraan nelayan.<sup>4</sup> Jadi pelabuhan perikanan akan mendukung segenap usaha perikanan, termasuk dalam proses modernisasi nelayan tradisional serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun semua itu memerlukan suatu pengelolaan yang baik. Pengelolaan pelabuhan perikanan yang baik akan menunjang kelancaran operasi perikanan, pengolahan, maupun pemasarannya sehingga menjadi lebih terjamin. Disamping itu seluruh kegiatan masyarakat nelayan akan dapat dikonsentrasikan di pelabuhan perikanan, sekaligus berpengaruh positif terhadap pengembangan daerah-daerah di sekitarnya.

Menurut sejarahnya Pelelelangan Ikan telah dikenal sejak tahun 1922, didirikan dan diselenggarakan oleh Koperasi Perikanan terutama di Pulau Jawa, dengan tujuan untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh tengkulak/pengijon, membantu nelayan mendapatkan harga yang layak dan juga membantu nelayan dalam mengembangkan usahanya. Pada dasarnya sistem dari Pelelelangan Ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi.<sup>5</sup>

Jawa timur adalah salah satu provinsi yang berada di Indonesia yang memiliki potensi perikanan yang besar dan beragam. Potensi perikanan ini

---

<sup>4</sup> Dyah Pramitasari DKK, *Analisis Efisiensi Tpi (Tempat Pelelelangan Ikan) Kelas 1, 2 Dan 3 Di Jawa Tengah Dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*, Jurnal pasir laut, 2006, hal 12-21

<sup>5</sup> Dhini Nadia, dan Sunning, *Studi Penataan Prasarana Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) Juanda Berbasis Cluster*, Jurnal Teknik Waktu, 2014. Vol 12. Nomer 02. Hal 1-11

tentunya harus dikelola dengan baik sehingga dapat mensejahterakan masyarakat nelayan khususnya dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Potensi perikanan laut di provinsi Jawa Timur yang berada di wilayah perairan Selatan dan Utara, memiliki karakteristik yang berbeda.

Jumlah hasil tangkapan ikan di wilayah utara dan selatan Jawa Timur, rata-rata hasil tangkapan di Utara Jawa Timur adalah 29.958,10 ton dan selatan Jawa Timur adalah 104.955,30 ton. Prosentase jumlah hasil tangkapan di wilayah utara lebih besar yaitu 74% dibandingkan wilayah selatan Jawa Timur dengan nilai 26%. Berikut data hasil tangkapan ikan di wilayah utara dan selatan Jawa Timur tahun 2015 sampai 2019.

**Gambar 1.1**

**Prosentase Produksi Perikanan Laut di Wilayah Utara dan Selatan Jawa**



Dari prosentase diatas dapat dilihat bahwa wilayah utara memproduksi perikanan laut lebih besar dengan prosentase 74% dibandingkan dengan wilayah selatan dengan jumlah 26%.

Dengan adanya tempat pelelangan ikan (TPI) dapat menjadikan makmur masyarakat yang perprofesi sebagai nelayan, dan tempat pelelangan ikan (TPI) mampu mengelola atau mengolah tempat tersebut. Hal itu dapat dilihat dalam penelitian *Sri Hartanti Dkk*, yang menyatakan bahwa pemanfaatan tempat pelelangan ikan (TPI) secara optimal dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat nelayan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan.<sup>6</sup>

TPI merupakan fasilitas publik yang memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk dilakukan pengukuran mengenai kinerja agar dapat diketahui seberapa besar kinerja yang dilakukan oleh TPI saat ini sesuai dengan tujuan awal pembangunan TPI itu sendiri. Kinerja dapat diukur dari segi efesiensi TPI dalam melakukan kegiatan pelelangan ikan dan pengelolaan fasilitas. Pengukuran kinerja ini juga sangat penting agar dapat mengetahui kepuasan dari pihak pengguna jasa pelelangan, karena kepuasan pengguna pelelangan berdampak pada aktifnya kegiatan pelelangan dan pengembangan ekonomi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Sri Hartanti, Rinda Noviyanti, Lina Warlina, *Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Gebang Kabupaten Cirebon Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, Jurnal Matematika Sains dan Teknologi, 2019.vol 20. Nomor 1. Hal 20-29.*

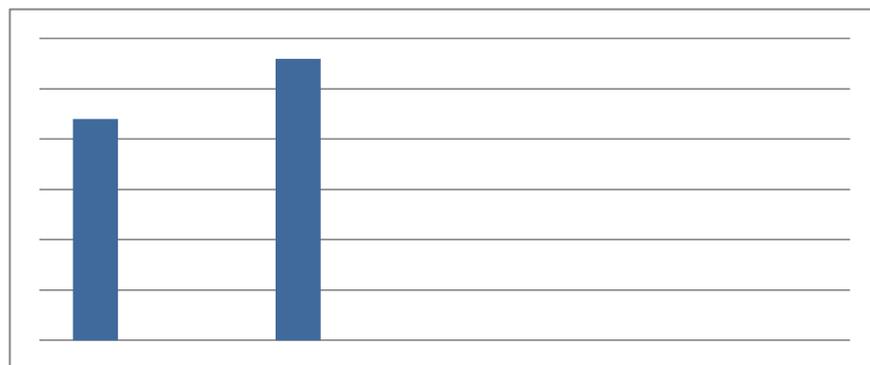
<sup>7</sup> Mardani, Mahdiana, Junaedi, *Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Peleleangan Ikan (TPI) Untuk Peningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Wilayah TPI Tegal Sari, Kota Tegal Jawa Tengah, jurnal Kelautan, Volome 11, No 1 2018, hlm 38-46*

Tempat pelelangan ikan yang ada di Jawa Timur berdasarkan statusnya yang aktif berjumlah 62 unit di wilayah selatan sebesar 44% yang berada di kabupaten Trenggalek, Banyuwangi, Jember, Malang, Pacitan, Blitar, Tulungagung, sedangkan di wilayah utara 56% yang berada di kabupaten Lamongan, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Bangkalan, Situbondo, Tuban, Sampang, Sidoarjo, Sumenep, dilihat gambar dibawah ini:

**Gambar 1.2**

**Prosentase Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Wilayah Utara dan Selatan**

**Jawa Timur Tahun 2015-2019**



*Sumber: Buku Statistik Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019*

Sebagaimana data di atas bahwa Tempat Pelelangan Ikan bagian Utara lebih banyak daripada bagian selatan yang salah satunya berada di wilayah/Kabupaten Probolinggo.. Kabupaten Probolinggo mempunyai potensi yang cukup besar dibidang perikanan dan kelautan yang terdiri dari subsektor perikanan tangkap, subsektor perikanan budidaya (kolam, tambak dan karamba) dan subsektor pengolahan perikanan yang potensial untuk dikembangkan. Jumlah produksi perikanan tangkap di Kabupaten Probolinggo selama tahun 2019 mencapai 18.252,60 ton, jumlah tersebut

meningkat jika dibandingkan dengan produksi tahun 2018 yang hanya mencapai 17.934,93 ton. Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Probolinggo Dedy Isfandi melalui Kepala Bidang, penangkapan ikan ini sebagian dilakukan di TPI dan tempat pendaratan ikan di setiap desa di kawasan pesisir. Ikan yang paling dominan ditangkap nelayan adalah (kelompok pelagis kecil) seperti ikan tembang, kembung, layang dan benggol, lemuru, tongkol.<sup>8</sup>

Menurut Martadiningrat, setidaknya terdapat 14,58 juta atau sekitar 90% dari 16,2 juta nelayan Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Ini terutama karena belum profesionalnya pengelolaan kelautan, selain belum berubahnya pola pikir nelayan menjadi ironis melihat potensi hasil laut yang besar, tetapi nelayan berada pada taraf hidup yang rendah bahkan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>9</sup>

Adapun jumlah keluarga dan prasejahtera kecamatan pesisir di kabupaten probolinggo bisa dilihat di tabel dibawah ini:

Tabel 1.1

jumlah keluarga kecamatan pesisir Kabupaten Probolinggo tahun 2014-2019

Kecamatan	Total Desa	Jumlah Keluarga	Pra Sejahtera
Tongas	7	19.662	4.780
Sumberrasih	4	18.066	3.347

<sup>8</sup> Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo 2019

<sup>9</sup> Martadiningrat, Yussuf Solichien.(2008). *Pola Pikir Tidak Berubah, 90 Persen Nelayan di Bawah Garis Kemiskinan*. IndonesiaOntime.com, diakses pada tanggal 4 April 2009.

<b>Paiton</b>	<b>8</b>	<b>19.552</b>	<b>9.187</b>
Kraksaan	5	21.697	5.046
Pajarakan	4	9.788	3.360
Gending	5	11.683	2.859
Dringu	5	15.200	2.104

*Sumber:* profil kabupaten probolinggo tahun 2014-2019

Diri tabel 1.1 Kabupaten probolinggo memiliki tujuh kecamatan pesisir mulai dari Paiton, Kraksaan, Pajarakan, Gending, Drimgu, Sumberasih, hingga tongas. Di tinjau dari seluruh jumlah keluarga kabupaten probolinggo, jumlah keluarga terbanyak berada di wilayah kecamatan Kraksaan, namun jumlah keluarga pra sejahtera atau keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan minimal terbanyak berada di wilayah pesisir kecamatan paiton sebanyak 9.187 keluarga.

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Probolinggo yang menjadi penelitian ini adalah Kecamatan Paiton. Paiton memiliki Tempat Pelelangan Ikan yang paling unggul dibandingkan dengan TPI lain di Kabupaten Probolinggo. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang di peroleh oleh TPI kecamatan paiton sebagai juara 1 lomba penyelenggara tempat pelelangan ikan teladan tingkat provinsi jawa timur pada tahun 2013 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dimana penjelasan tersebut didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara kepada kepala kantor TPI yang menjelaskan bahwa pada bulan juli 2019 ada kunjungan studi banding dari Kabupaten Situbondo

bahwasanya TPI paiton menjadi panutan bagi tempat pelelangan ikan lainnya.<sup>10</sup>

Perkembangan hasil tangkap ikan di Kecamatan Paiton mengalami penurunan, sebagaimana yang dijelaskan oleh salah satu pegawai di kantor TPI, hal tersebut disebabkan oleh faktor yang tidak menentu dan musiman yang tidak bisa di tebak, tetapi berbeda dengan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan perkembangan hasil tangkap ikan di Kecamatan Paiton meningkat setiap tahunnya:

Tabel 1.2

Produksi Perikanan Tangkap tahun 2015-2019

Subsektor perikanan	2015	2016	2017	2018	2019	Kenaikan Rata-rata(%)
Perikanan tangkap laut	9.588,40	9.665,20	13,068,39	17,493,82	17,945	87,15%

*Sumber:* Dinas perikanan dan Kelautan Kabupaten Probolinggo 2015-2019

Dalam periode 2015-2019, produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan rata-rata pertahun sebesar 87,15% yakni dari 9.588,40 ton tahun 2012 menjadi 17.945 pada tahun 2019.

TPI kecamatan paiton merupakan salah satu jenis kelembagaan formal yang memegang peranan yang cukup besar pada daerah penangkapan ikan. Para nelayan diharapkan menggunakan kelembagaan ini sebagai salah satu

<sup>10</sup> Wawancara kepada kepala Tempat Pelelangan Ikan pada tanggal 19 agustus 2019

sarana penjualan hasil tangkapan mereka. hanya saja, yang menjadi permasalahan adalah apakah kelembagaan TPI tersebut sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Apabila peraturan dan sistem yang berlaku pada TPI berjalamlah secara adil dan merata tanpa merugikan atau menguntungkan pihak-pihak tertentu, maka kelembagaan TPI tersebut dapat dikatakan sebagai wadah untuk menguntungkan, tetapi jika kelembagaan TPI tersebut hanya menguntungkan pihak tertentu saja, maka kelembagaan TPI tersebut merupakan wadah kelembagaan yang menyebabkan keterpurukan masyarakat nelayan.<sup>11</sup>

Melihat dari hasil produksi perikanan tangkap yang terdapat di TPI Kecamatan Paiton merupakan bentuk transaksi jual beli yang tidak lepas dari muamalah yang mana dalam sistem ekonomi Islam produksi termasuk dalam konteks harta, dimana menjaga harta juga dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah maupun muamalah. Adapun formula yang ditawarkan Islam di dalam memelihara atau menjaga harta yang sesuai dengan maqashid syariah adalah memprioritaskan perihal yang primer dan menjaga keutuhan yang primer tersebut dengan perihal-perihal pendukung lainnya.

Menurut ulama ushul fiqh, Imam Syathibi, maqashid syariah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada

---

<sup>11</sup> Mardani, Mahdiana, Junaedi, *Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Peleleangan Ikan (TPI) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan di Wilayah TPI Tegal Sari, Kota Tegal Jawa Tengah*, jurnal Kelautan, Volume 11, No 1 2018, hlm 38-46

kemaslahatan umat manusia. Sebagaimana dikemukakan dalam bukunya yang monumental, *al-Muwafaqot*, Imam Syathibi menyatakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu adalah dharuriyat, hajiyat, dan tahsiniyat.<sup>12</sup>

Imam Syathibi menguraikan tentang bagaimana menjaga/memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah, yaitu adanya ketetapan hukum yang dilegalkan oleh Allah SWT tentang diharamkannya mencuri dan sangsi atasnya, diharamkannya curang dan berkhianat di dalam bisnis, diharamkannya riba, diharamkannya memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, dan diwajibkan untuk mengganti barang yang telah dirusaknya; sehingga dengan demikian terjagalah/terpeliharalah harta.<sup>13</sup>

Tempat pelelangan ikan di Kecamatan Paiton menjadi sarana transaksi jual beli hasil laut, hasil tangkapan ikan yang dihasilkan oleh para nelayan yang seharusnya dilelang dan dikelola oleh TPI, tetapi pengelolaan dan pemanfaatan TPI paiton dipandang belum optimal karena beberapa kendala dan fasilitas yang tersedia. Ikatan yang kuat antara nelayan dengan bakul/tengkulak mempengaruhi aktifitas perikanan di TPI paiton, yang pada faktanya hasil tangkapan ikan yang dihasilkan oleh para nelayan di lelang oleh Pengambek/ tengkulak (yang memberikan modal) dan kemudian kepedagang. Penjelasan ini diperkuat dari hasil observasi dengan melakukan

---

<sup>12</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Musthofa Muhammad), jilid 2, h. 324.

<sup>13</sup> Al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Musthofa Muhammad), jilid 2, h. 6-7.

wawancara kepada Bapak Bahrul Ulum selaku kepala kantor TPI paiton yang menyatakan bahwa peran TPI Kecamatan Paiton hanya memberikan fasilitas penimbangan hasil tangkap ikan dan harga ikan yang dijual di TPI umumnya lebih mahal dibandingkan dijual dilaut lepas atau di luar TPI.<sup>14</sup>

Peran Pengambek/tengkulak adalah orang yang memberikan sebagian besar modal dalam usaha pembelian alat tangkap (kapal) dengan syarat hasil tangkapan ikannya harus dilelang oleh pengambek atau tengkulak, dan yang punya wewenang menjual ikan dari para nelayan adalah tengkulaknya masing-masing para awak kapal dan proses lelangnya dilakukan ketika para nelayan datang menangkap ikan.

Nelayan tidak mau atau enggan dalam melakukan lelang karena sudah terikat secara ekonomi dengan bakul/tengkulak. Nelayan yang melakukan transaksi dengan bakul atau tengkulak biasanya dikarenakan faktor minimnya permodalan, sehingga mempunyai kuasa mengatur transaksi jual beli hasil perikanan. Selain itu transaksi dianggap praktis dan tidak banyak prosedur.

Disamping itu koirul Anam mengatakan sektor perikanan tangkap di kota Probolinggo, belum tersentuh pembiayaan lembaga jasa keuangan (LJK) sehingga sulit berkembang.<sup>15</sup> Kepala dinas kelautan dan perikanan kabupaten probolinggo mengatakan potensi ikan dikabupaten probolinggo masih banyak yang belum tereksplorasi dengan baik, dampaknya kesejahteraan nelayan sangat rendah.

---

<sup>14</sup> Wawancara kepada kepala Tempat Pelelangan Ikan pada tanggal 19 agustus 2019

<sup>15</sup><https://ekonomi.bisnis.com/read/20161024/99/595438/perikanan-tangkap-di-probolinggo-belum-tersentuh-lembaga-pembiayaan>, di publikasikan 24 oktober 2016

Banyak literatur yang menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan yang dilelang oleh TPI akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan seperti dalam penelitiannya Agus Suherman dan Adhyaksa Dault yang memaparkan PPN Berondong memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut, dan merupakan penghubung antara nelayan dan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tidak langsung. Hasil penelitiannya menunjukkan dampak positif yaitu terjadinya peningkatan usaha dan terbukanya kesempatan kerja atau lapangan pekerjaan yang baru bagi masyarakat sekitar, dimana hal ini akan berpengaruh pada pendapatan. Hal ini dikarenakan tujuan dari PPN Brondong yaitu sebagai *support system* dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan mensejahterakan kehidupan para nelayan.<sup>16</sup>

Teuku junaidi *dkk.* dalam penelitian *Institutional And Management Analysis Of The Auction Fish Place (Afp) For Improving Fishermen's Welfare In Tegalsari Afp, Tegal City, Central Java*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya kelembagaan dan manajemen tempat lelang ikan di tegalsari telah berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, strategi manajemen tempat lelang ikan yang optimal adalah dengan memperbaiki sistem operasionalnya yang ada, salah satunya adalah fasilitas

---

<sup>16</sup> Suherman, Dault, *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur*, jurnal saintek perikanan, vol.5, No.1

air bersih dan akses modal bagi nelayan setempat.<sup>17</sup> Artinya dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tempat lelang ikan (TPI) perlu memenuhi fasilitas yang sangat dibutuhkan dalam operasioanalnya Sehingga kesejahteraan nelayan dapat ditingkatkan.

Endang Retnoyanti mengatakan dalam penelitiannya bahwa Dari sisi ekonomi pendapatan nelayan masih sangat rendah, sehingga mereka miskin, hal ini dikarenakan: keterbatasan modal, *skill*, adanya tekanan dari pemilik modal (sistem bagi hasil yang tidak adil), sistem perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (tidak ada regulasi yang tepat dan lemahnya otoritas atau pemerintah), budaya kerja yang masih tradisional atau *konvensional*.<sup>18</sup>

Dengan melihat potensi sumber daya ikan diwilayah laut selat madura yang begitu besar, Tempat Pelelangan Ikan yang dibawah naungan sektor perikanan tangkap merupakan sumber kekuatan sosial ekonomi nelayan, jika sektor ini dimanfaatkan secara maksimal serta digarap secara optimal oleh lembaga TPI maka akan menjadi sumber ekonomi yang besar.

Dan penelitiannya Chelsea E. Hunter Menyatakan bahwa baru baru ini mobilisasi sosial, penghidupan dan hubungan budaya dengan perikanan, keberadaan batas tatakelola tradisional yang relavan secara geografis dan sosial, dan penerapan pengelolaan bersama dibagian lain Polinesia Prancis merupakan faktor positif. Namun kurangnya kepercayaan masyarakat,

---

<sup>17</sup> Teuku Junaidi *dkk*, *Institutional And Management Analysis Of The Auction Fish Place (Afp) For Improving Fishermen's Welfare In Tegalsari Afp, Tegal City, Central Java*, E3S Web of Conferences **47**, 2018

<sup>18</sup> Endang Retnoyanti, *Nelayan Indonesai Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, Dan Hukum)*. Vol XVI, No3

heterogenitas sosial, gangguan pada institusi dan prakteknya, dukungan kelembagaan yang minimal adalah hambatan yang signifikan untuk bergerak menuju pengelolaan bersama yang sukses di morea.<sup>19</sup>

Berbeda dari penelitian Sri Hartanti *Dkk*, hasil penelitiannya bahwa besarnya potensi perikanan di TPI Gebang tidak menjamin tingkat kesejahteraan bagi masyarakat nelayan, karena nelayan lebih memilih bertransaksi diluar PPI kondisi ini disebabkan oleh ikatan permodalan antara nelayan dengan bakul/tengkulak dan transaksi ekonomi perikanan masih ditentukan oleh bakul atau tengkulak sebagai pemilik modal.<sup>20</sup>

Dari penelitian-penelitian diatas telah di paparkan bahwasanya dengan adanya pengelolaan yang baik berupa perencanaan, perorganisasian, memiliki kontrol, serta lembaga atau institusi yang menjadi panutan agar mendapatkan hasil yang baik pula. dan untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat nelayan perspektif maqashid syariah tentang menjaga harta.

Dari latar belakang diatas peneliti akan melakukan penelitian diwilayah pesisir utara kecamatan Paiton di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dengan judul penelitian **“PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI KECAMATAN PAITON KABUPATEN PROBOLINGGO (Kajian Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi Tentang Menjaga Harta)”**

---

<sup>19</sup> Chelsea E. Hunter *DKK*, *Maneuvering towards adaptive co-management in a coral reef fishery*, Marine Policy. Vol.98, page 77-84. 2018

<sup>20</sup> Sri Hartanti, Rinda Noviyanti, Lina Warlina, *Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Gebang Kabupaten Cirebon Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan*, *Jurnal Matematika Sains dan Teknologi*, 2019.vol 20. Nomor 1. Hal 20-29.

## **B. Fokus Penelitian**

Dalam konteks penelitian yang sudah dipaparkan diatas untuk mempermudah didalam memahami pembahasan, maka peneliti menyusun fokus penelitian sebagai barikut:

1. Bagaimana Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo?
2. Apa saja kendala-kendala Proses Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo?
3. Bagaimana Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Kajian Dalam *Maqashid Syrariah* Tentang Menjaga Harta Perspektif Imam Al-Syatibi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam mengangkat tema dan konteks penelitian ini sebagai berikut:

1. Menganalisis Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Masyarakat Nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
2. Menganalisis kendala-kendala Proses Lelang Ikan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
3. Menganalisis Upaya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Kajian Dalam *Maqashid Syrariah* Tentang Menjaga Harta Perspektif Imam Al-Syatibi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait:

1. Manfaat bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada pemerintah kota/ kabupaten yang menjadi daerah penelitian dalam menentukan kebijakan terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat nelayan, dan peneliti diharapkan mampu memberi masukan bagi pengelolaan TPI untuk perencanaan pengelolaan jangka panjang.

2. Manfaat bagi akademik

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara ilmiah, dan menjadi acuan bagi penelitian lain untuk menciptakan hasil karya yang lebih baik tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dalam studi ekonomi islam

3. Manfaat bagi peneliti

Memberikan pengalaman dan pengetahuan keilmuan penelitian ssebagai bekal dalam menuju tahap pendidikan lebih lanjut, dan diajukan untuk melengkapi tugas akhir untuk memenuhi syarat ujian program pascasarjana Strata Dua (S2) program magister ekonomi syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

**E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Peneltian**

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang berkaitan serta relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan

pendukung, pelengkap serta pembanding dalam menyusun Tesis ini sehingga lebih memadai. Selain itu, telaah pada penelitian terdahulu berguna untuk memberikan gambaran awal mengenai kajian terkait dengan masalah dalam penelitian ini.

Sri Hartanti *Dkk* (2019), dalam penelitiannya yang berjudul Strategi Pengelolaan pangkalan pendaratan ikan PPI Gebang Kabupaten Cirebon Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan, mendapatkan hasil bahwa besarnya potensi perikanan di TPI Gebang tidak menjamin tingkat kesejahteraan bagi masyarakat nelayan, karena nelayan lebih memilih bertransaksi diluar PPI kondisi ini disebabkan oleh ikatan permodalan antara nelayan dengan bakul/tengkulak dan transaksi ekonomi perikanan masih ditentukan oleh bakul atau tengkulak sebagai pemilik modal.<sup>21</sup>

Ni Putu Eka Widiastuti *Dkk* (2017), dalam penelitiannya yang berjudul *The Local Government's Supply Chain Strategy to Empower the Traditional Fishermen in Southern Coast of Java Island* hasil menunjukkan peran tempat pelelangan ikan yang telah diselenggarakan oleh Departemen Perikanan pemerintah kabupaten dapat mengurangi kesenjangan rantai pasokan dari nelayan ke perusahaan pengolah ikan dan konsumen rumah tangga. Apalagi, pengawas departemen perikanan mengakui bahwa pengelola ikan Tempat lelang yang terletak di setiap kabupaten di pantai selatan Pulau Jawa masih terhambat bakulan / para tengkulak. Bakulan di setiap tempat pelelangan ikan menentukan harga pasar ikan dan menyediakan modal kerja bagi nelayan

---

<sup>21</sup> Sri Hartanti, Rinda Noviyanti, Lina Warlina, *Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Gebang Kabupaten Cirebon Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan*, *Jurnal Matematika Sains dan Teknologi*, 2019.vol 20. Nomor 1. Hal 20-29.

ketika mereka mulai bekerja untuk mencari ikan di laut. Selanjutnya, hasil juga menunjukkan bahwa para nelayan - lokasi pelelangan ikan – ikan industri pengolahan / konsumen adalah untuk meningkatkan ekonomi nelayan daya saing, Departemen Perikanan harus mengawasi kegiatan operasi pelelangan ikan dan menetapkan indeks harga yang wajar untuk setiap jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan di setiap kabupaten.<sup>22</sup>

Choliq Sabana *dkk* (2016), dalam penelitian yang berjudul Kajian Strategi Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan TPI Pekalongan hasil menunjukkan TPI telah menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan dengan tingkat kesesuaian di antara tingkat kinerja dan tingkat kepentingannya sebesar 73% dan masih terdapat faktor yang penting pengaruhnya bagi kepuasan pelanggan, tetapi kinerjanya belum optimal, yaitu faktor kedisiplinan dan tanggung jawab. Posisi strategi TPI berdasarkan analisis SWOT berada kuadran II atau kuadran strategi kompetitif.<sup>23</sup>

Teuku Junaidi *dkk* (2018), yang berjudul *Institutional And Management Analysis Of The Auction Fish Place (Afp) For Improving Fishermen's Welfare In Tegalsari Afp, Tegal City, Central Java*, hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya kelembagaan dan manajemen tempat lelang ikan di tegalsari telah berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, strategi manajemen tempat lelang ikan yang optimal adalah dengan

---

<sup>22</sup> Ni Putu Eka Widiastuti *Dkk*, *The Local Government's Supply Chain Strategy to Empower the Traditional Fishermen in Southern Coast of Java Island*, International Conference on Business and Management Research, Vol 36, (2017)

<sup>23</sup> Choliq Sabana *dkk*, *kajian strategi pengembangan tempat pelelangan ikan TPI pekalongan*, jurnal Litbang, 2016, Vol 11, Hal 117-131

memperbaiki sistem operasionalnya yang ada, salah satunya adalah fasilitas air bersih dan akses modal bagi nelayan setempat.<sup>24</sup>

Dan penelitiannya Chelsea E. Hunter (2018) yang berjudul *Maneuvering towards adaptive co-management in a coral reef fishery*, Menyatakan bahwa baru baru ini mobilisasi sosial, penghidupan dan hubungan budaya dengan perikanan, keberadaan batas tatakelola tradisional yang relavan secara geografis dan sosial, dan penerapan pengelolaan bersama dibagian lain Polinesia Prancis merupakan faktor positif. Namun kurangnya kepercayaan masyarakat, heterogenitas sosial, gangguan pada institusi dan prakteknya, dukungan kelembagaan yang minimal adalah hambatan yang signifikan untuk bergerak menuju pengelolaan bersama yang sukses di morea.<sup>25</sup>

I Made Gunarsa Putra Dkk (2017), yang berjudul *Analisis Pagaruh Faktor Produksi, Sosial Demografi, Dan Modal Sosial Terhadap Produktivitas Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Tabanan* dengan hasil Kondisi kesejahteraan rumah tangga nelayan dikabupaten tabanan dengan meningkatkan modal, tenaga kerja, teknologi dapat meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan dan juga meningkatkan faktor demografi, modal sosial, produktifitas, produksi secara

---

<sup>24</sup> Teuku Junaidi dkk, *Institutional And Management Analysis Of The Auction Fish Place (Afp) For Improving Fishermen's Welfare In Tegalsari Afp, Tegal City, Central Java*, E3S Web of Conferences **47**, 2018

<sup>25</sup> Chelsea E. Hunter DKK, *Maneuvering towards adaptive co-management in a coral reef fishery*, Marine Policy. Vol.98, page 77-84. 2018

signifikan ]meningkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan di kabupaten tabanan.<sup>26</sup>

Marindi Briska, dan Eko Budi Santoso (2017), yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Pengembangan Subsektor Perikanan Tangkap Di Pesisir Selatan Kabupaten Tulungagung Dengan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal, dengan hasil penelitian bahwa untuk melakukan pengembangan subsektor perikanan tangkap di pesisir selatan Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan konsep PEL perlu memperhatikan 10 (sepuluh) faktor, antara lain: faktor klaster, faktor manfaat ekonomi, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya lokal, faktor pemasaran, faktor teknologi perikanan, faktor proses produksi, faktor modal, faktor sarana prasarana, dan faktor pengolahan. Adapun beberapa faktor yang masih memiliki permasalahan pengembangan perikanan tangkap antara lain faktor klaster, faktor pemasaran, faktor pengolahan, dan faktor sumber daya manusia.<sup>27</sup>

Steven W. Purcell Dkk (2017), dengan judul *Distribution of economic returns in small-scale fisheries for international markets: A value-chain analysis*, hasil penelitian ini ini menunjukkan Peningkatan tata kelola rantai nilai, misalnya. melalui koperasi nelayan atau sistem lelang, dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan nelayan, berpotensi mengurangi kebutuhan akan tingkat penangkapan ikan yang tinggi. Intervensi semacam

---

<sup>26</sup> I Made Gunarsa Putra Dkk, *Analisis Pengaruh Faktor Produksi, Sosial Demografi, Dan Modal Sosial Terhadap Produktivitas Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Tabanan*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.5 (2017)

<sup>27</sup> Steven W. Purcell Dkk, *Distribution Of Economic Returns In Small-Scale Fisheries For International Markets: A Value-Chain Analysis*, *Marine Policy* 86, Hal 9=16, (2017)

itu akan bermanfaat dari memahami pola rantai nilai di antara berbagai spesies yang dipanen dalam perikanan multispesies.<sup>28</sup>

P. Jeyanthi Dkk (2018), dengan judul *Institutional Development and Efficiency of Fishermen Cooperatives in Marine Fisheries: A Case Study from Kerala*, hasil penelitian menunjukkan koperasi nelayan memainkan peran penting dalam meningkatkan mata pencaharian nelayan dan kegiatan utama masyarakat. Efisiensi teknis rata-rata mempekirakan model VRS DEA adalah 96 dan 87% untuk masyarakat I dan II, faktor signifikan yang mempengaruhi efisiensi koperasi adalah jumlah pinjaman yang disalurkan mulai pembayaran pinjaman dan pengembalian dari layanan pemasaran ikan. Status hukum, manajemen keuangan dan perencanaan koperasi dan administrasi adalah indikator menilai efisiensi koperasi.<sup>29</sup>

Haryani dan Akhmad Fauzy (2019), yang berjudul *The Management Of Marine Protected Area Of raja Ampat Regency, West Papua Province Through Bioeconomic Model Approach*, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kawasan Konservasi Laut (KKL) telah ditetapkan di wilayah laut Kabupaten Raja Ampat. Untuk mengelola MPA dengan lebih baik, parameter yang terukur dan indikator yang jelas diperlukan. Keputusan pada indikator dapat dilakukan dengan pendekatan model bioekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan MPA akan meningkatkan tingkat panen dan pendapatan. Tapi "lebih besar lebih baik" tidak bisa diadopsi untuk

---

<sup>28</sup> Agnes Puspitasari Sudarmmo Dkk, *Social Economics Characteristics Of Coastal Small-Scale Fisheries In Tegal City, Indonesi*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4,(2015)

<sup>29</sup> P. Jeyanthi Dkk, *Institutional Development and Efficiency of Fishermen Cooperatives in Marine Fisheries: A Case Study from Kerala*, fishery Tecnology 55, Hal 79-85 (2018)

pengembangan MPA. Ukuran MPA yang optimal akan berkontribusi pada peningkatan hasil dan pendapatan dan dapat mengurangi tingkat upaya.<sup>30</sup>

Agar memberikan gambaran secara komprehensif berkenaan dengan penelitian ini maka peneliti memaparkan kajian-kajian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan tempat pelelangan ikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam konsep ekonomi islam. Berikut penelitian terdahulu bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3

Tabel orisinalitas penelitian

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Sri Hartatik, (2019), <i>Srategi Pengelolaan pangkalan pendaratan ikan PPI Gebang Kabupaten Cirebon Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan,</i>	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian bahwa besarnya potensi perikanan di TPI Gebang tidak menjamin tingkat kesejahteraan bagi masyarakat nelayan, karena nelayan lebih memilih bertransaksi diluar PPI	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan pendaratan ikan dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.	Peneliti terdahulu membahas pengelolaan TPI untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan secara umum	Penelitian ini tidak hanya fokus membahas mengenai pengelolaan TPI dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara umum, tetapi juga Manajemen pengelolaan untuk

<sup>30</sup> Haryani dan Akhmad Fauzy, *The Management Of Marine Protected Area Of raja Ampat Regency, West Papua Province Through Bioeconomic Model Approach*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 278, (2019)

			kondisi ini disebabkan oleh ikatan permodalan antara nelayan dengan bakul/tengkulak			kesejahteraan nelayan dalam kajian <i>Maqashid Syariah</i> .
2	Ni Putu Eka Widiastuti Dkk, 2017, <i>The Local Government's Supply Chain Strategy to Empower the Traditional Fishermen in Southern Coast of Java Island</i>	Penelitian Kualitatif	hasil menunjukkan peran tempat pelelangan ikan yang telah diselenggarakan oleh Departemen Perikanan pemerintah kabupaten dapat mengurangi kesenjangan rantai pasokan dari nelayan ke perusahaan pengolah ikan dan konsumen rumah tangga. Apalagi, pengelola ikan Tempat lelang yang terletak di setiap kabupaten di pantai selatan Pulau Jawa masih terhambat bakulan / para tengkulak.	meneliti tentang pengelolaan pendaratan ikan dalam meningkatkan ekonomi nelayan.	Peneliti terdahulu membahas pengawasan pengelolaan TPI untuk meningkatkan ekonomi nelayan dengan menetapkan harga ikan	Penelitian ini tidak hanya fokus membahas mengenai pengelolaan TPI dan kesejahteraan masyarakat nelayan secara umum, tetapi juga dalam kajian <i>Maqashid Syariah</i> .
3	Choliq Sabana dkk, 2016, <i>kajian strategi pengembangan tempat pelelangan ikan (TPI) pekalongan</i>	Penelitian Kuantitatif menggunakan analisis SWOT	Hasil penelitian menunjukkan TPI telah menunjukkan kinerja yang cukup memuaskan dengan tingkat kesesuaian di antara tingkat	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI)	Peneliti terdahulu hanya fokus pada perkembangan pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI)	Pada penelitian ini tidak hanya fokus membahas mengenai pengelolaan TPI, tetapi membahas mengenai peran tempat

			kinerja dan tingkat kepentingannya sebesar 73% dan masih terdapat faktor yang penting pengaruhnya bagi kepuasan pelanggan, tetapi kinerjanya blom optimal, yaitu faktor kedisiplinan dan tanggung jawab.			pelelangan ikan (TPI) untuk kesejahteraan masyarakat nelayan kajian Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .
4	Teuku Junaidi dkk, 2018 <i>Institutional And Management Analysis Of The Auction Fish Place (Afp) For Improving Fishermen's Welfare In Tegalsari Afp, Tegal City, Central Java</i>	Penelitian Kuantitatif dengan analisis SWOT	hasil penelitiannya menunjukkan kelembagaan dan manajemen tempat lelang ikan di tegalsari telah berjalan dengan lancar sesuai dengan peraturan yang berlaku, strategi manajemen tempat lelang ikan yang optimal adalah dengan memperbaiki sistem operasionalnya yang ada,	Sama-sama meneliti tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan	Peneliti terdahulu mendapatkan hasil bahwa pengelolaan berjalan dengan lancar	Penelitian ini fokus kepada pengelolaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan tetapi juga distribusi untuk kesejahteraan nelayan dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .
5	Chelsea E. Hunter ,2018, <i>Managing adaptive co-management in a coral reef fishery</i>	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan mobilisasi sosial, penghidupan dan hubungan budaya dengan perikanan, tatakelola tradisional yang	Sama-sama meneliti pengelolaan perikanan	Peneliti terdahulu fokus terhadap sosial (kehidupan) dan budaya	Penelitian ini fokus kepada pengelolaan tempat pelelangan ikan untuk kesejahteraan masyarakat dalam Perspektif

			<p>relevan secara geografis dan sosial, di Polinesia Prancis merupakan faktor positif. Namun kurangnya dukungan kelembagaan menjadi hambatan yang signifikan dalam pengelolaan bersama yang sukses di morea</p>			<p><i>Maqashid Syariah.</i></p>
6	<p>I Made Gunarsa Putra Dkk, 2017, <i>Analisis Pengaruh Faktor Produksi, Sosial Demografi, Dan Modal Sosial Terhadap Produktivitas Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Tabanan</i></p>	<p>Penelitian Kuantitatif</p>	<p>Peningkatan faktor produksi, sosial demografi, modal sosial, produktifitas, secara umum dapat emingkatkan kesejahteraan rumah tangga nelayan di Kabupaten Tabanan</p>	<p>Sama-sama meneliti kesejahteraan nelayan</p>	<p>Peneliti terdahulu fokus terhadap faktor produksi, sosial demografi dan modal sosial untuk kesejahteraan rumah tangga nelayan</p>	<p>Penelitian ini fokus kepada pengelolaan tempat pelelangan ikan dalam islam untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah.</i></p>
7	<p>Marindi Briska, dan Eko Budi Santoso, 2017, <i>Faktor-Faktor Pengembangan Subsektor</i></p>	<p>Penelitian Kuantitatif dengan konsep PEL</p>	<p>Hasil penelitian pengembangan subsektor perikanan tangkap memerlukan 10 faktor : faktor klaster, faktor</p>	<p>Sama-sama meneliti tentang sektor perikanan tangkap</p>	<p>Peneliti terdahulu fokus mengenai pengembangan dalam subsektor</p>	<p>Dalam penelitian ini tidak hanya fokus membahas mengenai pembentukan atau</p>

	<i>Perikanan Tangkap Di Pesisir Selatan Kabupaten Tulungagung Dengan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal</i>		manfaat ekonomi, faktor sumber daya manusia, faktor sumber daya lokal, faktor pemasaran, faktor teknologi perikanan, faktor proses produksi, faktor modal, faktor sarana prasarana, dan faktor pengolahan. Dan ada empat faktor permasalahan dalam pengembangan.		perikanan tangkap di pesisir selatan kabupaten tulungagung	pengelolaan TPI, tetapi membahas mengenai distribusi pengelolaan dalam islam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .
8	Steven W. Purcell Dkk, 2017, <i>Distribution of economic returns in small-scale fisheries for international markets: A value-chain analysis,</i>	Penelitian Kualitatif	hasil penelitian ini menunjukkan Peningkatan tata kelola, misalnya. melalui koperasi nelayan atau sistem lelang, dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan nelayan, berpotensi mengurangi kebutuhan akan tingkat penangkapan ikan yang tinggi	Sama sama meneliti tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan	Peneliti terdahulu fokus kepada pengelolaan melalui koperasi dan sistem lelang	Peneliti ini fokus dalam pengelolaan dan distribusi pengelolaan dalam islam untuk kesejahteraan nelayan dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .
9	P. Jeyanthi Dkk, 2018, <i>Institutional Development and Efficiency of Fishermen Cooperatives</i>	Penelitian Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan koperasi memainkan peranan penting dalam meningkatkankan mata	Sama-sama meneliti tentang sektor perikanan tangkap	Penelitian terdahulu fokus kepada peran koperasi dalam meningkat	Penelitian ini fokus kepada peran tempat pelelangan ikan dan pengelolaan untuk kesejahteraan

	<i>in Marine Fisheries: A Case Study from Kerala,</i>		pencapaian nelayan dan kegiatan utama masyarakat		kan mata pencaharian dan kegiatan utama masyarakat nelayan di kuala	masyarakat nelayan kajian Perspektif <i>maqashid syariah</i>
10	Haryani dan Akhmad Fauzy, 2019, <i>Pendekatan Bionomi Dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi Laut Kabupaten Raja Ampat Provinsi Raja Ampat</i>	Pendekatan Model Bionomi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan MPA akan meningkatkan tingkat panen dan pendapatan. Tapi "lebih besar lebih baik" tidak bisa diadopsi untuk pengembangan MPA.	Sama sama meneliti tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan	Penelitian terdahulu hanya fokus pada pembentukan tempat pelelangan ikan yang dinamakan MPA diraja ampat	Dalam penelitian ini tidak hanya fokus membahas mengenai pembentukan atau pengelolaan TPI, tetapi distribusi pengelolaan dalam islam untuk kesejahteraan nelayan dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> .

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, dapat ditemukan orisinalitas penelitian ini. Adapun orisinalitas penelitian ini yaitu, Pengelolaan dan distribusi tempat pelelangan ikan dapat berjalan dengan optimal, agar mencapai tujuan tersebut perlu perencanaan, perorganisian, pengawasan, dan evaluasi supaya berjalan efektif dan efisien. Dan pada konsep pengelolaan dan distrubusi dalam Islam yaitu pengelolaan untuk memperoleh hasil yang optimal dan dalam menjalankan pengelolaan harus berdasarkan aturan-aturan Allah SWT, pada dasarnya terdapat perbedaaan antara pengelolaan

Islam dengan konvensional. Namun keduanya berbeda dalam hal tujuan, bentuk, aturan teknis, penyebarluasan dan disiplin keilmuan. Selain itu yang menjadi orisinalitas dari penelitian sebelumnya ialah konsep kesejahteraan, dalam penelitian ini konsep kesejahteraan dalam kajian perspektif *Maqashid syariah*, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan *daruriyat* yaitu, menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. dan *tahsiniyat*.

#### **F. Definisi Istilah**

1. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah salah satu aktifitas disuatu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam kelompok aktifitas yang berhubungan dengan pendaratan atau pemasaran ikan.
2. Kesejahteraan adalah salah satu bagian yang harus terpenuhi untuk menciptakan kemaslahatan hidup melalui terpenuhi kebutuhan dasar berdasarkan penjagaan atas kebutuhan *Daruriyat* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).
3. Masyarakat nelayan adalah adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggi pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.
4. Maqashid Syariah merupakan indikator yang digunakan dalam melihat kesejahteraan dan proses pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dimana

berdasarkan tingkat kebutuhan manusia yang meliputi *Daruriyat* menjadi unsur pokok yang wajib diperhatikan yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sebelum *Hajiyat* dan *Tahsiniyat*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

##### 1. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.<sup>31</sup> Berrarti mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya.

Menurut Soewarno Handyaningrat, pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.<sup>32</sup>

Sedangkan menurut Suharsimi arikunta pengelolaan adalah subtantifa dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan , melaksanakan,

---

<sup>31</sup> Peter Salim dan Yenny Salim. 2002. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta:Penerbit Balai Pustaka.695

<sup>32</sup> Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.Jakarta: 1994. Haji Masagung.9

sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>33</sup>

Marry Parker Follet, mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat.<sup>34</sup>

- a. Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- b. proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.

Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan (manajemen) adalah suatu cara atau proses yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan agar berjalan efektif dan efisien.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas pengelolaan tidak akan terlepas dari kegiatan sumber daya manusia yang ada dalam suatu kantor

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, (jakarta : CV. Rajawali, 1988). 8

<sup>34</sup> Marry Parker Follet, *Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Rakyat*, POPULASI Vol 13 (1), Hal 1-18.

atau instansi, pengelolaan kegiatan ketatausahaan pada lembaga atau instansi merupakan hal yang pokok dalam menjalankan aktivitas antara lain : memberikan pelayanan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan lembaga atau instansi baik secara internal maupun eksternal, menyusun program kerja ketatausahaan, melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan/dana perguruan tinggi sesuai dengan petunjuk atau pedoman dan peraturan yang berlaku untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut diperlukan sumber daya manusia yang punya kemampuan, dedikasi kerja yang baik dan mengerti dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing agar tujuan tersebut tercapai.

## 2. Pengelolaan Dalam Islam

### a. Pengelolaan Dalam Islam

Pengelolaan dalam Islam adalah suatu pengelolaan untuk memperoleh hasil optimal yang bemuara pada pencarian keridhaan Allah. Oleh sebab itu maka segala sesuatu langkah yang diambil dalam menjalankan manajemen tersebut harus berdasarkan aturan-aturan Allah. Aturan-aturan itu tertuang dalam Al-qur'an, hadist dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat. Karena itu maka isi dari manajemen syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ilmu manajemen konvensional yang diwarnai dengan aturan Al-qur'an, hadist dan beberapa contoh yang dilakukan oleh para sahabat.

Pada zaman Rasulullah SAW. Pemikiran dan mekanisme kehidupan politik di negara Islam bersumber dan berpijak pada

nilai-nilai akidah. Serangkaian nilai-nilai layaknya sebuah sistem kehidupan yang menyentuh perilaku individu dan rangkaian hubungan sosial diantara mereka yang beragama. Al-qur'an merupakan sumber utama bagi kehidupan umat muslim, Al-qur'an bisa diposisikan sebagai syariah, sistem kehidupan atau sebuah metodologi kehidupan bagi manusia untuk mengarungi kehidupan.

Oleh karenanya pengelolaan dianggap sebagai ilmu sekaligus teknik (seni) kepemimpinan diawal perkembangan Islam, kristalisasi pemikiran manajemen dalam Islam muncul setelah Allah menurunkan risalah-Nya kepada Muhammad SAW, Nabi dan Rasul akhir zaman. Pemikiran manajemen dalam Islam bersumber dari Nash-Nash Alqur'an dan petunjuk-petunjuk sunah.

Pada dasarnya terdapat perbedaan mendasar antara manajemen syariah (Islam) dengan manajemen modern. Keduanya berbeda dalam hal tujuan, bentuk, aturan teknis, penyebarluasan dan disiplin keilmuannya.

Dari definisi tersebut diatas, maka lingkup pengelolaan dalam islam sangatlah luas, antara lain mencakup tentang pemasaran, produksi, mutu, keuangan, sumber daya alam dan sumber daya manusia.

#### b. Prinsip Pengelolaan dalam Islam

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapih, benar, tertib dan teratur arah pekerjaan yang jelas,

landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat darurat. Allah SWT sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik, sebagai mana yang dijelaskan dalam Al-qur'an surah Ahs-Shaff:4:<sup>35</sup>

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُومٌ ﴿٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang dijalanNya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh”

#### c. Karakteristik Pengelolaan dalam Islam

Telah dijelaskan bahwa dalam teori Pengelolaan modern terdapat derajat yang berbeda dalam menjelaskan teori yang komperhensif dan sempurna. Di antara karakteristik yang membedakan teori manajemen dalam islam dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh terhadap aktivitas manajemen dalam dan di luar organisasi (perusahaan, negara), dan hubungan perilaku individu terhadap faktor-faktor sosial yang berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi moral dalam manajemen, yakni mengatur bagaimana seharusnya individu berperilaku.<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Al-Qur'an Surah Ahs-Shaff:4

<sup>36</sup> Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hal.235

Pengelolaan dalam Islam memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut :

- a. Teori Pengelolaan dalam Islam merupakan teori yang konsisten dan terkait dengan falsafah sosial masyarakat muslim dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim.
- b. Pengelolaan dalam Islam konsisten terhadap variabel ekonomi dan motif materi serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan psikologis individu.
- c. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas manajemen, memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spritual
- d. Konsisten terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi serta menuntut ketaatan terhadap kebaikan.<sup>37</sup>

### 3. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

#### a. Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Tempat Pelelangan ikan ditinjau dari manajemen operasi, maka Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat penjual jasa pelayanan antara lain sebagai tempat pelelangan, tempat perbaikan jaring, tempat perbaikan mesin dan lain sebagainya. Disamping itu TPI merupakan

---

<sup>37</sup> *Ibit*, Hal.236

tempat berkumpulnya nelayan dan pedagang-pedagang ikan atau pembeli ikan dalam rangka mengadakan transaksi jual beli ikan. Nelayan ingin menjual hasil tangkapan ikannya dengan harga sebaik mungkin, sedangkan pembeli ingin membeli dengan harga serendah mungkin. Untuk mempertemukan penawaran dan permintaan itu, diselenggarakan pelelangan ikan agar tercapai harga yang sesuai, sehingga masing-masing pihak tidak merasa di rugikan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI), selain merupakan pintu gerbang bagi nelayan dalam memasarkan hasil tangkapannya, juga menjadi tempat untuk memperbaiki jaring, motor, serta kapal dalam persiapan operasi penangkapan ikan. Tujuan utama didirikannya TPI adalah menarik sejumlah pembeli, sehingga nelayan dapat menjual hasil tangkapannya sesingkat mungkin dengan harga yang baik serta dapat menciptakan pasaran yang sehat melalui lelang murni. Disamping itu, secara fungsional, sasaran yang diharapkan dari pengelolaan TPI adalah tersedianya ikan bagi kebutuhan penduduk sekitarnya dengan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pengelolaan TPI yang baik serta professional akan memotivasi para nelayan untuk menambah dan mengembangkan usahanya di bidang perikanan.

b. Fungsi, Tujuan, Manfaat Tempat Pelelangan Ikan

Fungsi Tempat Pelelangan Ikan secara operasionalnya antara lain:

- 1). Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang.
- 2). Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan

3). Mempermudah pengumpulan data statistik.

Tujuan dari sistem Pelelangan Ikan di TPI yang sesungguhnya adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk menjual hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul.

Berbagai kegiatan yang dapat dilaksanakan di TPI untuk mencapai tujuan yang diharapkan antara lain:

- 1) Meningkatkan animo masyarakat nelayan untuk melakukan transaksi jual beli di TPI
- 2) Meningkatkan jumlah pedagang pengumpul atau grosir yang menangani hasil tangkapan.
- 3) Meningkatkan fungsi dan peranan KUD sebagai organisasi ekonomi dan mampu bertindak sebagai penyangga pemasaran.

Adapun manfaat Tempat Pelelangan Ikan di TPI antara lain adalah:

- 1) Perolehan harga baik bagi nelayan secara tunai dan tidak memberatkan konsumen.
- 2) Adanya pemusatan ikatan-ikatan yang bersifat monopoli terhadap nelayan.
- 3) Adanya peningkatan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi (bea) Lelang.
- 4) Pengembangan Koperasi Unit Desa.

### c. Struktur Organisasi Tempat Pelelangan Ikan

Penyelenggaraan pelelangan Ikan pada setiap TPI sebaiknya adalah dari organisasi nelayan dalam bentuk KUD. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KUD bertanggungjawab kepada Pemda setempat melalui Dinas Perikanan Daerah.

Tujuan adanya struktur organisasi dalam suatu lingkungan kerja secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan tugas pekerjaan mempunyai kemungkinan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif
- 2) Pelaksanaan pekerjaan mempunyai kemungkinan dapat dilaksanakan lebih mudah
- 3) Koordinasi mempunyai kemungkinan untuk dilaksanakan dengan baik.
- 4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian mempunyai kemungkinan lebih efektif dan efisien.

Disamping itu, adanya juga struktur organisasi pada lingkungan kerja, dapat memberikan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta kedudukan masing-masing pelaksana, sehingga diharapkan tidak terjadi kesimpangsiuran dalam pekerjaan yang dapat menghambat kelancaran pencapaian tujuan.

Adapun struktur organisasi penyelenggara atau pelaksana pelelangan ikan di TPI pada umumnya terdiri dari:

- 1) Pimpinan Pelelangan, tugasnya antara lain adalah memimpin dan mengkoordinir kegiatan pelelangan ikan sehari-hari.
- 2) Juru tulis atau tenaga administrasi pelelangan ikan, tugasnya antara lain membuat catatan dan laporan kegiatan pelelangan meliputi jumlah kapal, produksi ikan, nilai produksi dan bea lelang serta melaksanakan kegiatan tata usaha pelelangan termasuk surat-menyerat.
- 3) Juru Lelang, tugasnya antara lain adalah melaksanakan tata pelelangan secara terbuka, mengumumkan pemenang lelang dan mencatat dalam buku catatan khusus mengenai pemilik ikan, pedagang atau pembeli pemenang lelang, jumlah dan jenis ikan yang dilelang serta besarnya nilai lelang.
- 4) Juru timbang, tugasnya adalah melaksanakan penimbangan ikan yang masuk TPI dan memberi label atau nota yang berisi mengenai nama pemilik ikan, jenis dan berat ikan yang telah ditimbang.
- 5) Kasir (Bendahara Khusus), tugasnya adalah menagih atau menerima uang lelang secara tunai kepada atau dari pedagang atau pembeli yang melaksanakan pelelangan, jumlahnya sesuai dengan yang tertera didalam karcis lelang. Tugas lainnya adalah menyetorkan hasil pungutan bea lelang kepada Pemda Tingkat I dan Pemda tingkat II. Penyetoran tersebut langsung diberikan kepada pemegang kas Pemda setempat. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari baik bendaharawan khusus, juru tulis atau administrasi, juru lelang

maupun juru timbang bertanggungjawab kepada pimpinan pelelangan ikan.

d. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Aktivitas pengelolaan pelelangan ikan di TPI merupakan salah satu aktivitas di suatu pelabuhan perikanan yang termasuk dalam kelompok aktivitas yang berhubungan dengan pendaratan dan pemasaran ikan. Pelelangan ikan memiliki peran yang cukup penting untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam pemasaran ikan. Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan di tempat pelelangan ikan guna mempertemukan penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang disepakati bersama.<sup>38</sup>

Menurut Lubis,<sup>39</sup> tipe pengelolaan tempat pelelangan ikan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) termasuk kepada tipe pengelolaan oleh Pemerintah Daerah. Pengelolaan tempat pelelangan ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah TK I/Propinsi c/q Dinas Perikanan dan Kelautan setempat atau adanya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Propinsi menyerahkan lagi pengelolaan lelang ikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui Dinas Perikanan dan Kelautan setempat dan beberapa Pemda Propinsi atau Kabupaten menyerahkan lagi ke KUD. Kemudian hasil retribusi yang dikenakan kepada nelayan dan pembeli diserahkan ke kas Pemerintah Daerah.

---

<sup>38</sup> Dwiyanti, H. *Kajian Pengelolaan Aktivitas Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Sukabumi Jawa Barat* (Bogor: fakultas perikanan dan ilmu kelautan, 20010)

<sup>39</sup> Lubis, *Pengantar Pelabuhan Perikanan*, (Bogor: fakultas perikanan dan ilmu kelautan, 20006)

Menurut Faubiany bahwasanya prosedur pengelolaan tempat pelelangan ikan TPI adalah sebagai berikut.<sup>40</sup>

- 1) Kapal melaporkan kedatangannya ke pengawas perikanan (WASKI), dicatat dokumen dan mendapatkan nomor urut lelang;
- 2) Proses pembongkaran ikan dengan menyortir ikan berdasarkan jenis dan mutu lalu ditempatkan di dalam keranjang (*trays*);
- 3) Penimbangan hasil tangkapan di dermaga dan diawasi oleh juru timbang dari koperasi Mina Jaya kemudian diberi label volume ikan dan nama kapal;
- 4) Ikan disusun di lantai TPI berdasarkan nomor urut lelang yang didapatkan oleh setiap kapal;
- 5) Juru lelang mengumumkan dan memanggil peserta lelang untuk memulai proses pelelangan;
- 6) Ikan dilelang oleh juru lelang dimana jumlah peserta lelang kurang lebih 70 orang dan harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Penawaran yang dilakukan bersifat meningkat sampai tercapai harga penawaran tertinggi;
- 7) Seluruh hasil transaksi dicatat oleh juru bakul. Pencatatan hasil transaksi lelang meliputi: jenis, ukuran, berat dan harga ikan, nama nelayan dan nama pemenang lelang. Setelah proses pelelangan selesai, maka data diserahkan kepada petugas operator pelelangan;

---

<sup>40</sup> Faubiany, *Kajian Sanitasi Di Tempat Pendaratan Ikan Dan Tempat Pelelangan Ikan Di Muara Angke Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Ikan* (Bogor: fakultas perikanan dan ilmu kelautan, 2008)

- 8) Peserta pemenang lelang umumnya melakukan pencatatan hasil transaksi pemenang lelang yang biasanya langsung mengemasi ikannya. Setelah mencatat hasil transaksi ikan, pemilik kapal menerima uang dari petugas kasir; dan
- 9) Pembayaran oleh pemenang lelang dan penerimaan hasil penjualan.

e. Landasan Hukum Lelang di Indonesia

Pelelangan di Indonesia memiliki aturan dan landasan hukum dalam pengaturan kegiatan maupun cara pelelangan. Landasan hukum penyelenggaraan pelelangan ikan di Indonesia diatur oleh beberapa ketentuan yang berlaku, yaitu:

- 1) PP No 64 Tahun 1957 pasal 7, tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat di Lapangan Perikanan laut, Kehutanan dan Karet Rakyat kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1;
- 2) PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 3) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor: 139 Tahun 1997/902/Kpts/PL.420/9/97/03/SKB/M/IX/1997 tentang Penyelenggaraan Pelelangan Ikan; dan
- 4) SK Gubernur Nomor 2074/2000 tanggal 10 Agustus 2000 Tentang Penetapan Presentase Pengenaan Retribusi Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan dan Biaya Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Koperasi Perikanan Mina Jaya yang dipungut dari nelayan sebesar 3% dan bakul sebesar 2%, sedangkan bagian Koperasi Perikanan Mina Jaya sebesar 2% dari 5% retribusi yang diterima

f. Indikator Kinerja Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan TPI

Peran indikator kinerja bagi organisasi sektor publik adalah memberikan tanda atau rambu-rambu bagi manajer dan pihak luar untuk menilai kinerja organisasi. Indikator kinerja akan bermanfaat apabila digunakan untuk mengukur sesuatu. Dengan demikian peran utama indikator kinerja adalah alat sebagai pengukur kinerja.<sup>41</sup>

Adapun menurut Mahmudi melalui konsep pengukuran *value for money* (VFM) merupakan konsep penting dalam organisasi sektor publik. *Value for money* memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Hal ini berarti bahwa setiap rupiah harus dihargai secara layak dan digunakan sebaik-baiknya. Konsep *value for money* terdiri dari:

- 1) Ekonomi, memiliki pengertian bahwa sumber daya *input* hendaknya diperoleh dengan harga lebih rendah (*spending less*), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis, ekonomi merupakan perbandingan antara *input* dengan nilai rupiah untuk memperoleh *input* tersebut; dan
- 2) Efisiensi, terkait dengan hubungan antara *output* berupa barang atau pelayanan yang dihasilkan dengan sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* tersebut. Secara matematis, efisiensi merupakan perbandingan antara *output* dengan *input* atau dengan istilah lain *output* perunit *input*. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dikatakan efisien

---

<sup>41</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi kedua (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Manajemen, 2010)

apabila mampu menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya (*spending well*).

Pembuatan indikator *input* dan *output* memerlukan pemahaman mengenai konsep dasar *input* dan *output* sebagai komponen dasar kedua dari sistem pengukuran kinerja, untuk itu dapat diketahui mengenai deskripsi tersebut, yaitu:

#### 1) *Input*

*Input* adalah semua jenis sumber daya masukan yang digunakan dalam suatu proses tertentu untuk menghasilkan *output*. *Input* tersebut dapat berupa bahan baku untuk proses, orang (tenaga, ketrampilan dan keahlian), infrastruktur seperti gedung dan peralatan, teknologi (*hardware* dan *software*). Pengukuran *input* adalah pengukuran sumber daya yang dikonsumsi oleh suatu proses dalam rangka menghasilkan *output*. Proses tersebut dapat berbentuk program atau aktivitas. Ukuran *input* mengindikasikan jumlah sumber daya yang dikonsumsi untuk suatu program, aktivitas dan organisasi. Pengukuran *input* dilakukan dengan cara membandingkan *input* sekunder dengan *input* primer. Dengan kata lain, pengukuran *input* adalah untuk mengetahui harga per unit *input*.

#### 2) *Output*

*Output* adalah hasil langsung dari suatu proses. Pengukuran *output* merupakan pengukuran keluaran langsung dari suatu proses. Ukuran *output* menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran *output* ini berbentuk kuantitatif dan keuangan atau kuantitatif nonkeuangan.

Setelah penentuan indikator *input* dan *output* selesai dilakukan tahap berikutnya, yaitu mendesain pengukuran ekonomi dan efisiensinya. Ukuran ekonomi mengindikasikan alokasi biaya, yaitu mengukur biaya *input* (*cost of input*). Ukuran ekonomi berupa beberapa anggaran yang dialokasikan. Pemanfaatan sumber daya di bawah anggaran menunjukkan adanya penghematan, sedangkan melebihi anggaran menunjukkan adanya pemborosan. Ukuran efisiensi mengukur biaya *output* (*cost of output*). Ukuran efisiensi didasarkan pada dua ukuran, yaitu *input* dan *output*. Ukuran efisiensi dapat dinyatakan dalam bentuk biaya per unit *output*.<sup>42</sup>

g. Lelang Dalam pandangan Islam

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana pembeli menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan harga lebih tinggi sampai pada batas harga tertinggi dari salah satu pembeli, lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual. Dalam kitab-kitab fiqih atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah Bai' Al-muzayadah (adanya penambahan). Islam

---

<sup>42</sup> Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi kedua (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Manajemen, 2010)

memperbolehkan jual beli dalam bentuk lelang, seperti yang disebutkan dalam hadist berikut:

Artinya: “Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, *”Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?”* Lelaki itu menjawab, *”Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.”* Nabi SAW berkata, *”Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.”* Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, *”Siapa yang mau membeli barang ini?”* Salah seorang sahabat beliau menjawab, *”Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.”* Nabi SAW bertanya lagi, *”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?”* Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, *”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.”* Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut... (HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi)<sup>43</sup>

Dari hadist diatas lelang sebagai bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Dalam Islam juga memberikan kebebasan keleluasaan dan keluasan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku di masyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak hak orang lain secara tidak sah. Seperti yang di sebutkan dalam QS AnNisa’ Ayat 29:

---

<sup>43</sup> Mardani, *Ayat-Ayat dan hadis Ekonomi syariah*, PT Rajagrafindo Persada, jakarta 2012, Hal.192

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”<sup>44</sup>*

Dari pengertian diatas merupakan jawaban atas bagaimana yang sebenarnya harus dilakukan dalam menjalankan sistem lelang dimana dalam sistem Islam sangat menjaga sekali kejujuran tanpa adanya manipulasi ataupun kecurangan-kecurangan dalam menjalankan sistem lelang.

## **B. Konsep Kesejahteraan Perspektif Maqashid Syariah**

### **1. Pengertian Kesejahteraan**

Kesejahteraan berasal dari kata dasar sejahtera, aman, sentosa, makmur dan selamat atau terbebas dari kesusahan, gangguan dan lain sebagainya. Kesejahteraan berarti suatu keadaan dimana seseorang merasa bahwa dirinya aman, selamat, tentram, senang dan makmur<sup>45</sup>. Seseorang dikatakan sejahtera bila kebutuhan mereka terpenuhi baik jasmani maupun rohani.

<sup>44</sup> Al-Quran, AnNisa’ Ayat 29

<sup>45</sup> Sugondo, Dendi, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pusat Bahasa, 2008), 1140

Sedangkan definisi Kesejahteraan dalam konsep dunia modern adalah sebuah kondisi dimana seorang dapat memenuhi kebutuhan pokok, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan dan memiliki pekerjaan yang memadai yang dapat menunjang kualitas hidupnya sehingga memiliki status sosial yang mengantarkan pada status sosial yang sama terhadap sesama warga lainnya. Kalau menurut HAM, maka definisi kesejahteraan kurang lebih berbunyi bahwa setiap laki laki ataupun perempuan, pemuda dan anak kecil memiliki hak untuk hidup layak baik dari segi kesehatan, makanan, minuman, perumahan, dan jasa sosial, jika tidak maka hal tersebut telah melanggar HAM.<sup>46</sup>

Adapun pengertian kesejahteraan menurut UU No 11 tahun 2009<sup>47</sup> tentang ketentuan umum kesejahteraan masyarakat memuat pengertian kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhi kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial kehidupannya dengan menjunjung tinggi hak asasi dan kewajiban sesuai pancasila. Sedangkan kesejahteraan dalam Al-Qur'an Surah Quraaisy ayat 1-4:

---

<sup>46</sup> Ikhwan Abidin Basri, Islam dan Pembngunan Ekonomi, (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), 24.

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial, 2

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۖ إِذْ لَفِيهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۖ فَلْيَعْبُدُوا  
 رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۖ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ  
 خَوْفٍ ۖ

Artinya: Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.

Dalam ayat tersebut bisa disimpulkan bahwa konsep kesejahteraan terbagi menjadi empat indikator yaitu: 1) Sistem nilai Islami, 2) kekuatan ekonomi (industri dan perdagangan), 3) pemenuhan kebutuhan dasar dan sistem distribusi, 4) keamanan dan ketertiban sosial.<sup>48</sup> Dan dalam Surah Al-Baqarah:126:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا ءَامِنًا وَاَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ  
 الثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ  
 قَلِيلًا ۗ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۖ

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: "Ya Tuhanku, Jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Allah

<sup>48</sup> Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, (Jakarta Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 28.

*berfirman: "Dan kepada orang yang kafirpun aku beri kesenangan sementara, kemudian aku paksa ia menjalani siksa neraka dan Itulah seburuk-buruk tempat kembali".*

Dalam ayat tersebut berisi do'a memohon anugerah supaya negeri aman<sup>49</sup>. Kesejahteraan diperoleh hanya diperoleh dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah Swt. Ajaran Islam mengajarkan konsep berbagi, membagi nikmat, membagi kebahagiaan, dan ketenangan bukan hanya untuk individu melainkan untuk semua umat manusia.<sup>50</sup> Dan dalam Qur'an Surah Thaha:117-119:

فَقُلْنَا يَتَّعَدُمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ  
فَتَشْقَى ۖ إِنَّ لَكَ إِلَّا تَجُوعٌ فِيهَا وَلَا تَعْرِى ۖ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ  
فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ۖ

*Artinya: Maka Kami berkata: "Hai Adam, Sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang, Dan Sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya".*

Kesejahteraan yang digambarkan pada ayat tersebut tercermin di surga yang di huni oleh Nabi Adam a.s. dan Siti Hawa sesaat sebelum mereka

<sup>49</sup> Kementerian Agama RI, *Syaamil Al-Qur'an Miracle The Reference*, (Bandung: Sygma, 2010), hlm.36

<sup>50</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I*, (Surabaya; Binal Ilmu, 1988), hlm. 223

turun melaksanakan tugas di bumi. Surga diharapkan menjadi bayang-bayang arah pengabdian yang dihuni kelak secara hakiki di akhirat. Masyarakat yang mewujudkan bayang-bayang surga itu yaitu masyarakat yang sejahtera.<sup>51</sup>

Dalam islam perlu mewujudkan kesejahteraan dengan cara memberikan dorongan atau motivasi seperti yang telah dikisahkan ayat-ayat tersebut, serta dengan petunjuk bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan.

Ayat-ayat tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi perhatian utama dalam kesejahteraan, yaitu:

- a. Membebaskan semua manusia yang terbelenggu karena perbudakan, bukan hanya perbudakan seperti kasus-kasus asisten rumah tangga tetapi perbudakan dengan menutup ruang kreativitas dan inovasi dari pribadi masing-masing.
- b. Pemerintah menyediakan makanan untuk rakyat di musim paceklik atau kelaparan.
- c. Perhatikan anak yatim terdekat.
- d. Memperhatikan kaum miskin<sup>52</sup>

## 2. Prinsip dan Faktor Kesejahteraan

Adapun prinsip dan faktor ekonomi adalah:

---

<sup>51</sup> Jamhari Makruf (eds), *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016), hlm. 4.

<sup>52</sup> Jamhari Makruf (eds), *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*,... hlm. 7.

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan dari kepentingan individu.
- b. Melepas kesulitan harus diprioritaskan dibanding memberi manfaat.
- c. Kerugian yang besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, hanya yang lebih kecil harus dapat diterima atau diambil untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Kesejahteraan individu dalam kerangka etika Islam diakui selama tidak bertentangan dengan kepentingan sosial yang lebih besar atau sepanjang individu itu tidak melangkahi hak-hak orang lain. Jadi menurut Al-Qur'an kesejahteraan meliputi faktor:

- a. Keadilan dan Persaudaraan Menyeluruh.
- b. Nilai-Nilai Sistem Perekonomian.
- c. Keadilan Distribusi Pendapatan.

### 3. Kesejahteraan Menurut Pakar Ekonomi

Kesejahteraan ekonomi merupakan cabang ilmu ekonomi yang menggunakan teknik ekonomi mikro untuk menentukan secara serempak efisiensi alokasi dari ekonomi makro dan akibat distribusi pendapatan yang saling berhubungan.<sup>53</sup> Maka dari itu perlu ilmu kesejahteraan ekonomi

---

<sup>53</sup> Drs. Lincoln Arsyad, Msc. *Ekonomi Mikro*, (Jakarta: Gemapress, 1999), 23.

dalam membangun suatu kegiatan ekonomi tersebut tidak hanya mengarah diri pada kebutuhan hidup manusia perorang dan jangka pendek, akan tetapi juga memberi surplus bagi kesejahteraan banyak orang dalam negara.

Adam Smith dalam bukunya "*Wealth of Nations*" menyatakan bahwa kesejahteraan akan tercipta apabila GNP atau barang yang diproduksi telah mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih rendah. Maka akan menciptakan pertumbuhan ekonomi sehingga akan tercipta lapangan produksi bagi masyarakat. Hal ini membuat masyarakat terpenuhi. Sehat ini membuat masyarakat terpenuhi kebutuhan primernya.<sup>54</sup>

Irfan Syauqi Beik Irfan Syauqi Beik juga berpendapat bahwa kesejahteraan adalah manakala rumah tangga atau keluarga dianggap mampu baik secara materiil maupun secara sepritual. Secara ekonomi produktif, secara ibadah juga produktif.<sup>55</sup>

Menurut Hasan Aedy kesejahteraan adalah apabila rumah tangga atau keluarga dianggap mampu baik secara materi maupun secara spiritual. Secara materi kebendaannya diperoleh secara halal dan digunakan untuk

---

<sup>54</sup> Ismail Kucukaksoy, "*Adam Smith's Conceptual Contributions To International Economics Based on The Wealth of Nations*", *Business and Economic Horizons*, 4 (January, 2011), hlm.113.

<sup>55</sup> Irfan Syauqi Beik Dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers,2016) hal 77

ibadah sehingga yang dituju pada hakikatnya adalah untuk kebahagiaan akhirat.<sup>56</sup>

Mohammad Hatta, Kesejahteraan adalah salah satu bagian yang harus terpenuhi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kesejahteraan dipandang sebagai perasaan hidup yang setingkat lebih tinggi dari kebahagiaan. Orang merasa hidupnya sejahtera apabila ia merasa senang, tidak kurang suatu apa dalam batas yang mungkin dicapainya, jiwanya tenang lahir dan batin terpelihara, ia merasakan keadilan dalam hidupnya, terlepas dari kemiskinan yang menyiksa dan bahaya kemiskinan yang mengancam.<sup>57</sup>

Mengenai konsep kesejahteraan Umer Chapra menjelaskan bahwa dengan *falah* dan *hayatan thayyibah* bisa tercipta kebahagiaan dunia dan akhirat. Karena kebahagiaan merupakan suatu refleksi dari kedamaian pikiran atau *al-nafs al-muthmainnah*, seperti yang termaktub dalam (QS. Al-Fajr (89):27), bahwa hal ini tidak dapat dicapai kecuali perbuatan manusia tersebut selaras dunia batinnya.

Menurut Abu Yusuf Kesejahteraan adalah kebutuhan rakyat yang terpenuhi karena adanya proyek, pengadaan fasilitas infrastruktur supaya meningkatkan produktifitas tanah, kemakmuran rakyat serta pertumbuhan ekonomi.,dengan terpenuhinya pelayanan publik maka akan tercipta

---

<sup>56</sup> Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.113.

<sup>57</sup> Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 161.

kesejahteraan masyarakat<sup>58</sup> Pemikiran Abu Yusuf condong pada ekonomi publik, selama pelayanan publik, sistem ekonomi publik dikelola dan terpenuhi dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Sedangkan menurut Al-Ghazali kesejahteraan adalah tercapainya suatu kemaslahatan. Kemaslahatan yaitu terpeliharanya suatu tujuan syara' (*maqashid syari'ah*). Manusia tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin kecuali setelah mencapai kesejahteraan yang sebenarnya melalui pemenuhan semua kebutuhan-kebutuhan rohani dan jasmani. Agar tercapai sebuah kemaslahatan, Al-Ghazali menjabarkan sumber kesejahteraan yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>59</sup>

#### 4. Indikator dan Kreteria Kesejahteraan

Untuk mengukur kesejahteraan dapat dilihat dari lihat dari segi materi, segi fisik, mental, dan spritual. Bahwasanya kesejahteraan bukan hanya dilihat dari keseluruhan kebutuhan tanpa terganggunya kebutuhan yang lain. Biro Pusat Statistik Indonesia<sup>60</sup> menerangkan bahwa dalam mengukur kesejahteraan rumah tangga di suatu wilayah ada enam yaitu: pendapatan, konsumsi atau pengeluaran dalam rumah tangga, keadaan tempat tinggal, fasilitas tempat tinggal, kesehatan anggota keluarga, pendidikan anggota rumah tangga. Dan penjelasan terperinci seperti dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>58</sup> Adiwarmarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 236

<sup>59</sup> Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumudin* (Surabaya: Bina Ilmu, 2010), hlm. 53-56.

<sup>60</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia 2005

Tabel 2.1: Indikator keluarga sejahtera berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2018

No	Indikator Kesejahteraan	Kreteria	skor
1	Pendapatan Rumah Tangga	Sejahtera (Rp 667.362-828.917 )	3
		Sejahtera Sedang (Rp 505.807-Rp 667.361)	2
		Rendah ( Rp 344.250-505.806)	1
2	Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga	Rentan Miskin (> Rp.401.220/Kapita/bulan)	3
		Miskin (Rp 401.220/kapita/bulan)	2
		Rendah (< Rp 401.220/kapita/bulan)	1
3	Keadaan tempat tinggal	Permanen	3
		Semi permanen	2
		Non permanen	1
4	Fasilitas tempat tinggal	Lengkap	3
		Terbatas	2
		Kurang Lengkap	1
5	Kesehatan anggota keluarga	Baik (<25% sering sakit)	3
		Cukup (25%-50% sering sakit)	2
		Kurang (>50% sering sakit)	1
6	Pendidikan anggota rumah tangga	Tinggi (>80% anggota RT mampu pendidikan layak sesuai usia)	3
		Sedang (50%-80% anggota RT mampu pendidikan layak sesuai usia)	2
		Kurang (<50% anggota RT mampu pendidikan layak sesuai usia)	1

Sumber: BPS 2018

Selanjutnya pemberian nilai diberikan skor berdasarkan Tabel diatas. Kemudian keseluruhan nilai tersebut dijumlahkan dan hasil dari perhitungan inilah yang menggambarkan tingkat kesejahteraan, barulah dapat menentukan apakah masyarakat disuatu wilayah tersebut sejahtera.

Berdasarkan nilai BPS, nilai untuk tingkat kesejahteraan, yaitu

a). Tingkat kesejahteraan yang tergolong tinggi: nilai >14

b). Tingkat kesejahteraan yang tergolong sedang: nilai 11-14

c). Tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah: nilai <11

## 5. Kesejahteraan perspektif *maqashid Syariah*

### a. Pengertian *Maqashid Syariah* Imam Syatibi

*Maqashid syari'ah* secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshud* berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syariah* berarti jalan menuju air, atau berarti juga jalan menuju ke arah sumber kehidupan. Awalnya *syariah* menunjuk pengertian "*ad-din*" atau agama dalam makna totalitas. Dalam al-Quran *syariah* berarti jalan terang dan nyata untuk keselamatan dan kesuksesan manusia di dunia dan akhirat.<sup>61</sup>

*Syariah* dalam kaitannya dengan air memiliki makna cara dan tujuan. *Syariah* sebagai cara atau jalan, dan air sebagai sesuatu yang hendak dituju menjadikannya sesuatu yang sangat penting. Hal ini berarti bahwa pentingnya peranan *syariah* dalam memperoleh sesuatu yang sangat penting (disimbolkan dengan air).<sup>62</sup>

Secara terminologi, *maqashid syari'ah* merupakan tujuan akhir dari *syariah* yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.<sup>63</sup> Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa *maqashid syari'ah* adalah tujuan yang menjadi target setiap teks dan hukum partikular untuk direalisasikan

<sup>61</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 1-2.

<sup>62</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syathibi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 63

<sup>63</sup> Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Jogjakarta: Total Media, 2009), hlm.159.

dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jama'ah, dan umat.<sup>64</sup> Sedangkan menurut Jaser Auda, *maqashid syari'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban atas pertanyaan kenapa zakat dijadikan rukun Islam, apa manfaat puasa, mengapa dilarang minum alkohol, dan pertanyaan sejenisnya tentang hukum Islam, karena mencakup hikmah di balik hukum.<sup>65</sup>

Dalam penggunaan ungkapan *maqashid*, imam Syatibi tidak menjelaskan secara terperinci. Ia menggunakan kata yang berbeda-beda namun memiliki makna yang sama, yaitu kemaslahatan atau kesejahteraan manusia. Kata-kata itu antara lain; *maqashid al-syariah*, *al-maqashid al-syar'iyah*, dan *maqashid min syar'i al-hukm*. *Maqashid syari'ah* berakhir pada kemaslahatan. Bertujuan untuk tegaknya kemaslahatan sosial, yang harus dipertanggungjawabkan untuk dirinya sendiri dan kepada Allah. Diturunkannya syariah untuk dilaksanakan sesuai *maqashid* atau tujuannya agar tercipta kehidupan yang adil, kebahagiaan sosial, dan ketenangan bermasyarakat.<sup>66</sup>

#### b. Pokok *Maqashid Syariah*

Dalam kitab *al-Muwafaqat*, perhatian Syatibi terhadap kebutuhan *daruriyat* mengacu pada empat hal pokok, yaitu ibadah, adat,

---

<sup>64</sup> Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 17.

<sup>65</sup> Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah* (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 31.

<sup>66</sup> Ika Yunia Fauzan dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pramedia Group, 2017), hal 45

muamalat, dan jinayat. Adapun ibadah tertuju pada menjaga agama misalnya keimanan dan pelaksanaan perintah wajib (rukun Islam), adat tertuju pada menjaga jiwa dan akal misalnya makan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Muamalat tertuju pada perlindungan keturunan dan harta, sedangkan jinayat berkaitan dengan amar ma'ruf dan juga nahi munkar.<sup>67</sup>

Dalam pandangan ekonomi Syatibi, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan *daruriyat* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*) dan harta (*hifz al-mal*), sebelum *hajiyyat*.<sup>68</sup> dan *tahsiniyat*.<sup>69</sup> Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Lebih lanjut, Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rezeki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

#### 1) Menjaga Agama (*hifz al-din*)

Indikator individu dalam memelihara agama adalah dengan cara semaksimal mungkin menjalankan rukun iman dan Islam.

Rukun iman dan Islam merupakan dua dasar agama yang akan

---

<sup>67</sup> Membedah kitab *al-Muwafaqat*. <http://rolandgunawan.blogspot.com/2007>

<sup>68</sup> *Tahsiniyat* (bersifat perbaikan) yaitu kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru'ah dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik. Lihat Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. xvi.

<sup>69</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, II (Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah), Hlm. 8.

mendorong manusia memahami hakekat kehidupannya, apabila tidak terpenuhi akan membahayakan kehidupannya dunia dan akhirat. Bentuk ibadah seperti sholat berjamaah, puasa, haji, dan zakat merupakan program Islam dalam mewujudkan lingkungan yang baik, yang di dalamnya disertai dengan apresiasi sosial bagi yang mematuhi norma moral dan hukuman bagi yang melanggarnya.<sup>70</sup>

## 2) Menjaga Jiwa (*hifz al-nafs*)

Syatibi menegaskan tentang pentingnya pemenuhan penghidupan manusia dalam menjamin kemaslahatan. Penghidupan manusia bergantung pada terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Karena dalam menggapai ridho Allah SWT. dibutuhkan kesehatan fisik yang kuat agar dapat beraktifitas. Tanpa fisik yang kuat seseorang akan kesulitan memenuhi kebutuhan, baik dunia maupun akhirat. Seseorang akan kesulitan dalam beramal sholeh, beribadah dengan baik, dan usaha kebaikan lain tanpa kondisi fisik yang sehat dan terjaga (bahaya kematian). Oleh karena demikian, segala bentuk yang dapat menunjang kesehatan fisik (terhindar dari bahaya kesehatan dan kematian) menjadi mutlak dilakukan seperti terpenuhinya sandang, pangan, dan papan.

## 3) Menjaga Akal (*hifz al-aql*)

---

<sup>70</sup> Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hlm. 104..

Syariat hadir dalam memberikan perlindungan terhadap hambaNya agar menjaga akalnya. Caranya yaitu dengan mendorong kemampuan manusia untuk berfikir atau meningkatkan intelektualnya. Bahkan menurut Syatibi, hal-hal yang dituntut untuk memenuhi kualitas intelektual merupakan cara mewujudkan kemaslahatan. Karena Allah memuji manusia yang selalu memperbaiki dirinya dengan meningkatkan kualitasnya agar menjadi pribadi yang bertaqwa.

Kehidupan berkualitas apabila ditunjang dengan akal yang sehat. Menghindari terganggunya akal dan mengupayakan peningkatannya adalah kewajibannya manusia. Kewajiban manusia menjauhi setiap hal yang dapat mengganggu kesehatan akal. Sedangkan upaya peningkatannya menurut Yusuf Qaradhawi adalah dengan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan.<sup>71</sup>

#### 4) Menjaga Keturunan (*hifz al-nasl*)

Dalam *al-muwafaqat* karangan Syatibi, menjaga keturunan merupakan bagian dari aspek muamalah (*habl min al-nas*). Perlindungan keturunan oleh syariah memberikan ketegasan bahwa sebagai seorang hamba manusia memiliki hak untuk menikah, memiliki anak, dan membesarkan anak-anak. Keberlanjutan hidup yang baik dalam sebuah keluarga

---

<sup>71</sup> Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2007), Hal 29

bergantung pada persiapan dan perencanaan seseorang terhadap keluarganya, seperti penanaman nilai-nilai spiritual, fisik dan mental yang kuat melalui pendidikan akhlak, baik di keluarga maupun di lembaga pendidikan

#### 5) Menjaga Harta (*hifz al-mal*)

Harta adalah amanah dari Allah SWT, yang akan di pertanggung jawabkan. Bentuk pertanggungjawaban pemeliharanya dengan memperhatikan halal dan haramnya proses pendapatan, pengelolaan dan pengembangannya. Jika harta tanpa kontrol haram dan halalnya dapat menjadi bumerang yang menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dunia dan akhirat, seperti peringatan Allah dalam al-Quran:

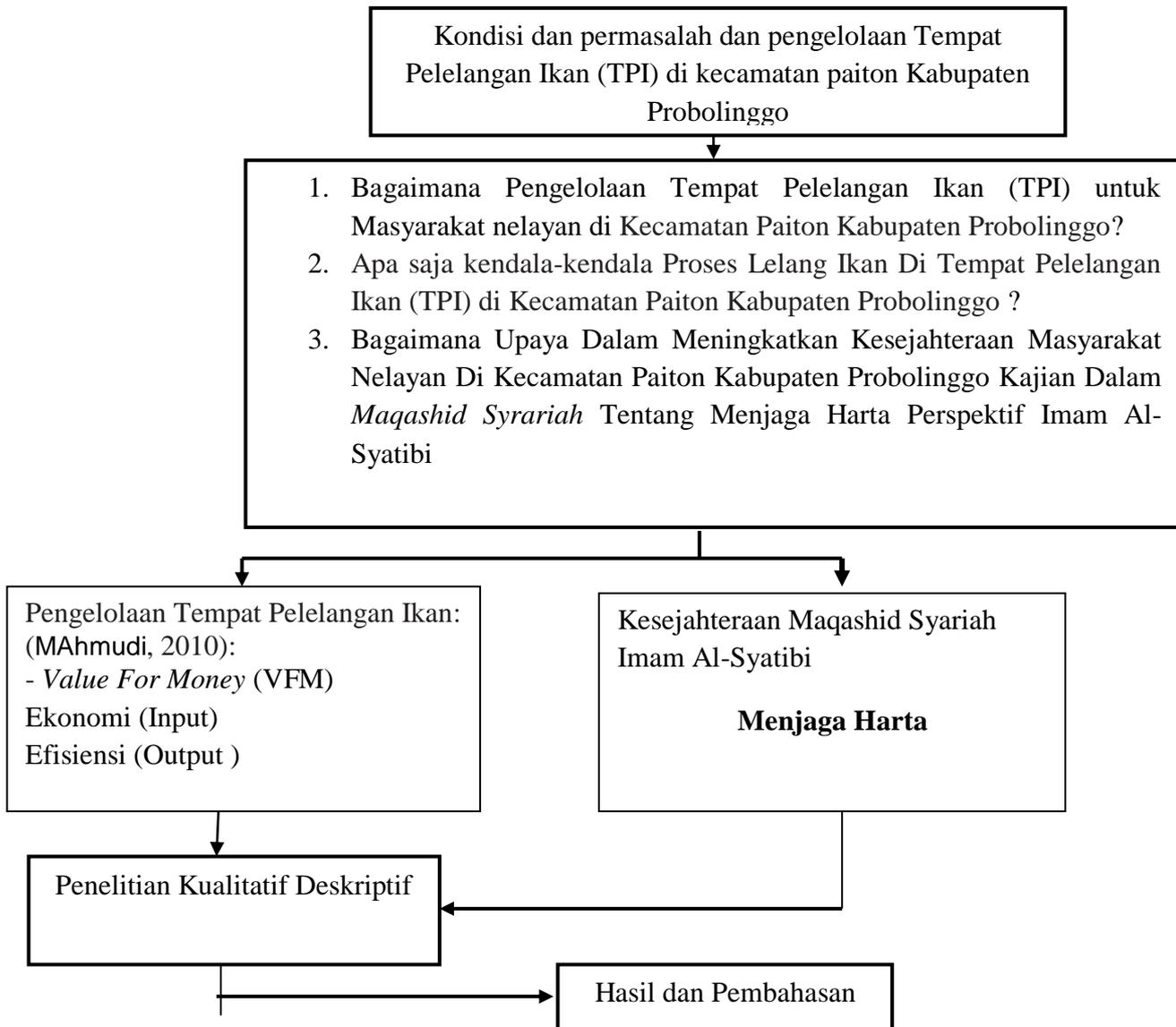
*“Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi. (QS.al- Munafiqun:9)”*

### **C. Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kajian pustaka yang telah dipaparkan pada penelitian ini akan menghasilkan pengembangan pengelolaan TPI untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan kajian maqashid syariah di kecamatan paiton kabupaten probolinggo, berikut kerangka berpikir pada penelitian ini:

#### **Gambar 2.1**

### Kerangka Berpikir



Sumber: *Diolah oleh Peneliti, 2019*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) memegang peranan penting dalam suatu pelabuhan perikanan dan perlu dikelola dengan sebaik-baiknya agar mencapai manfaat yang optimal. Tempat pelelangan ikan (TPI) kecamatan Paiton adalah suatu lingkungan kerja yang salah satu fungsinya sebagai pusat pemasaran dan distribusi hasil tangkapan, fungsi tersebut dapat diartikan bahwa hasil tangkapan ikan yang didapatkan oleh para nelayan di lelang di tempat pelelangan ikan agar mendapatkan suatu harga yang stabil, dan suatu saat akan meningkat atau akan menurun secara drastis, namun di tempat pelelangan ikan di kecamatan paiton hasil tangkapan ikan yang diperoleh oleh para nelayan masih di lelang oleh pedagang-pedagang perorangan setempat tidak dilelang oleh lembaga/instansi pemerintah perikanan yang dapat memberikan kontribusi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan perekonomian daerah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dan mendisripsikan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan serta kajian dalam perspektif Maqashid Syariah

Untuk mencapai tujuan tersebut dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting dari suatu

kejadian, fenomena, dan gejala sosial yang merupakan makna dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga bagi pengembangan konsep teori.<sup>72</sup> Dan menggunakan pendekatan studi kasus karena merupakan strategi penelitian dimana didalam prosesnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu, kasus kasus dibatasi menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu tertentu.<sup>73</sup>

## **B. Kehadiran Penelitian**

Subyek penelitian ini adalah Tempat Pelelangan Ikan di kecamatan Paiton dengan tujuan mengembangkan pengelolaan TPI untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dalam kajian maqashid syariah sehingga peneliti menjadi instrumen sekaligus sebagai pengumpul data yang terlibat langsung dilapangan. Sehingga kehadiran peneliti dilapangan menentukan ketajaman data yang didapatkan dan kedalaman hasil peneliitian. Sebab peneliti merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data dan sekaligus pelapor penelitian. Pada penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif kehadiran peneliti menjadi keharusan, karena peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data.<sup>74</sup>

Pada penelitian ini peneliti terlibat langsung sebagai peneliti yang ikut serta dalam beberapa kegiatan yang dilakukan di TPI kecamatan paiton dalam jangka waktu tertentu selama peneliti di lapangan. Hal ini peneliti lakukan

---

<sup>72</sup> M.Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta:Ar-Ruzz media, 2017), 25

<sup>73</sup> Jonh W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010), 20.

<sup>74</sup> Noeng Mujhir, *Metode Penelitian Kualitatif* (YogYakarta: Rokr Sarasin, 2003), 7.

agar mempermudah dan leluasa dalam mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan, selain itu partisipasi langsung peneliti dapat menambah ilmu baru secara alamiah.

### **C. Latar Penelitian**

Penjabaran penelitian meliputi lokasi, lama waktu penelitian dan atau subyek penelitian. Lokasi penelitian pada penelitian ini dilakukan di TPI kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo, alasan peneliti mengambil lokasi penelitian di kecamatan Paiton adalah Tempat Pelelangan ikan dikabupaten Probolinggo yang menjadi pernah mendapat penghargaan juara 1 lomba penyelenggara tempat pelelangan ikan teladan tingkat provinsi Jawa Timur pada tahun 2013 yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan juga TPI kecamatan pling unggul dibandingkan dengan TPI lain di kabupaten Probolinggo, dikarenakan fasilitas dan sarana yang sudah memadai, namun masih belum melakukan sistem lelang yang akan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan dan meningkatkan perekonomian daerah.

Dengan melakukan penelitian di kecamatan paiton ini, peneliti bermaksud dapat mengembangkan pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) sehingga dapat melaksanakan sistem lelang yang dilakukan lembaga atau instansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah khususnya nelayan di kecamatan paiton.

#### **D. Data dan Sumber Penelitian**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini dalam bentuk Kualitatif. Data Kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>75</sup> Yang termasuk data Kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum tempat pelelangan ikan (TPI) meliputi: sejarah singkat, letak geografis, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Pengelolaannya, keadaan TPI, keadaan Nelayan, serta sarana dan prasarana, serta aktivitas pengelolaannya tempat pelelangan ikan (TPI) di kecamatan Paiton.

Dalam penelitian ini data diperoleh diklasifikasikan menjadi dua yaitu data primer dan sekunder.

##### **1. Data primer**

Data Primer merupakan data pokok yang diambil oleh peneliti langsung dilapangan. Data primer dan sekunder ini merupakan bahan utama dalam pengambilan data yang diperoleh dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak terkait dalam pengembangan pengelolaan TPI di kecamatan Paiton yang dilakukan langsung oleh peneliti. Data primer ini dalam penelitian ini merupakan informan yang terdiri dari Kepala TPI beserta karyawan lainnya, pedagang atau tengkulak, dan para nelayan di daerah kawasan pesisir kecamatan Paiton.

##### **a. Kepala TPI Paiton**

---

<sup>75</sup> Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian.....h. 2

Data yang dibutuhkan mengenai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton, serta dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan apakah memberi dampak Positif terhadap Masyarakat, Data Produksi dan data Kapal dan sebagainya.

b. Pedagang atau Tengkulak

Data yang dibutuhkan mengenai harga jual beli bongkar muat ikan, serta proses lelang yang dilakukan kepada nelayan dan sebagainya.

c. Nelayan

Data yang dibutuhkan mengenai manfaat yang diperoleh masyarakat nelayan dengan adanya Tempat Pelelangan Ikan dan sebagainya.

Dalam menentukan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *Snowball Sampling* karena tidak dapat ditentukan besarnya, namun ditentukan berdasarkan pertimbangan informasi sehingga peneliti mengidentifikasi dan menentukan informan yang diambil, yang terdapat dalam suatu jaringan.<sup>76</sup>

2. Data Sakunder

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder yang peneliti ambil dari buku, media informasi, jurnal, penelitian terdahulu, publikasi berupa dokumen atau data, buku laporan dan dokumentasi

---

<sup>76</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung:Alfabeta, 2016).

yang berhubungan dengan teori-teori pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun penjelasan secara rinci sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Karena penelitian yang dilakukan adalah termasuk jenis penelitian kualitatif, maka observasi yang peneliti lakukan adalah observasi pengamatan. Dalam hal ini peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan dengan mengamati hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan dan prasaan.<sup>77</sup>

Dalam observasi ini Peneliti menggunakan observasi terstruktur atau terencana yaitu, peneliti datang ke tempat penelitian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan melakukan pengumpulan data menyatakan terstruktur kepada pihak pengelola pelelangan ikan dan pedagang maupun masyarakat nelayan, jadi mereka mengetahui aktifitas peneliti dari awal sampai akhir. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terstruktur atau terencana dalam observasi, hal ini untuk menghindari

---

<sup>77</sup> Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal 79

kalau suatu data yang di cari merupakan data yang masih bersifat rahasia. Observasi ini dilakukan dari tanggal 15 Juli-1 September 2019 di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di kecamatan paiton kabupaten probolinggo. Adapun hal yang diamati oleh peneliti di TPI Paiton sebagaimana pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Sasaran Observasi**

No	Kondisi yang diamati	Konteks
1	Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan	Untuk memperoleh data tentang pelayanan, fungsi, fasilitas, dan kinerja di Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo
2	Kesejahteraan Nelayan	Untuk memperoleh data tentang kesejahteraan nelayan di Kecamatan Tempat Pelelangan ikan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

## 2. Wawancara

*Wawancara*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada responden.<sup>78</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepala TPI dan masyarakat nelayan, pedagang, dan pengelola tempat pelelangan ikan (TPI) di kecamatan paiton dengan menggunakan teknik wawancara percakapan informal yaitu permunculan pertanyaan secara spontan dalam arus alami suatu

---

<sup>78</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal 39.

interaksi yang terjadi saat pengamatan sedang berlangsung.<sup>79</sup> Jenis wawancara ini termasuk jenis wawancara tak terstruktur atau *Interview bebas, inguides interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.<sup>80</sup>

Pada pengumpulan data wawancara peneliti terdahulu menyiapkan pedoman wawancara yang memuat mengenai konsep pengelolaan dan tujuan Tempat Pelelangan Ikan, serta dampak terhadap masyarakat nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Adapun jumlah informan yang akan di wawancarai ada 5 orang dan pihak yang akan di wawancarai adalah 1 Kepala TPI, 1 tengkulak, dan 3 nelayan.

**Tabel 3.2 Wawancara**

No	Informan	Kisi-kisi Pertanyaan
1	P.Bahrul Ulum (Kepala TPI)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah Berdirinya TPI Kecamatan Paiton</li> <li>2. Tujuan dan Visi, Misi TPI Paiton</li> <li>3. fasilitas TPI</li> <li>4. pengelolaan TPI</li> <li>5. Sistem lelang</li> <li>6. Peran TPI dalam meningkatkan Kesejahteraan</li> <li>7. kendala-kendala dalam proses Lelang</li> <li>8. Pemasukan daerah</li> </ol>
2	Hj.Rahmah (Tengkulak)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Lelang</li> <li>2. penentuan harga jual beli</li> <li>3. Akses modal</li> <li>4. Bagi hasil</li> </ol>

<sup>79</sup> Michel Quin Patton, *Metode Evakuasi Kualitatif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2006) hal 186

<sup>80</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal 132.

		5. Lokasi penjualan
3	H.Hamid,Azmi dan P.Sipol (Nelayan)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan sebelum dan sesudah adanya TPI</li> <li>2. Kontribusi TPI</li> <li>3. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga</li> <li>4. Keadaan tempat tinggal</li> <li>5. Fasilitas tempat tinggal</li> <li>6. Kesehatan anggota keluarga</li> <li>7. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan</li> <li>8. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan</li> </ol>

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan dokumen-dokumen penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat memperoleh data yang lengkap dan valid bukan berdasarkan perkiraan.<sup>81</sup> Dilakukan peneliti langsung agar peneliti mampu memaknai secara sistematis melalui data dan dokumentasi yang terkumpul. Dokumen yang diambil peneliti berupa tulisan, gambar-gambar, catatan dan arsip mengenai kegiatan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), profil, struktur, organisasi, data milik kecamatan paiton dan hal lainnya yang berkaitan dengan Pengembangan pengelolaan TPI di kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian di TPI Paiton sebagaimana tabel 3.3:

---

<sup>81</sup> Basrowi, Suwandi, *memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal 160

Tabel 3.3 Dokumen

No	Jenis Dokumen	Keterangan
1	Gambaran umum lokasi Penelitian a. profil Wilayah pesisir Kecamatan Paiton b. Profil Tempat Pelelengan Ikan Paiton b. Visi Misi c. Struktur Organisasi	Dokumen TPI
	Data Keterangan a. Kepala TPI b. Jumlah nelayan c. Produksi	Dokumen TPI

#### F. Teknik Analisi Data

Setelah pengumpulan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data tentang manajemen pengelolaan, dan bagaimana pedagang/ tengkulak mau bekerja sama dengan instansi atau lembaga pemerintah. Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena data yang ada akan tampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.

Sebagai sifat data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka seluruh analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu *deskriptif*. Karakteristik analisis kualitatif adalah bahwa antara pengumpulan data dan analisis data merupakan proses simultan. Dari pengumpulan data kemudian

dilakukan reduksi data untuk memilih data yang relevan dengan masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini. Disini peneliti menggunakan teknik analisis data model *Miles* dan *Huberman*. Aktivitas analisis data model *Miles* dan *Huberman* dilakukan secara interaktif dengan tiga langkah sebagai berikut :<sup>82</sup>

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan sebagainya. Sehingga dengan tahap ini data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk membaca data yang didapatkan di lapangan dengan memisahkannya dengan tema tertentu..

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian ini penulis menyajikan data dengan mengelompokkan data dari lapangan untuk mempermudah peneliti mengklarifikasi dan memahami yang sedang terjadi di lapangan

3. Verifikasi (*Conclusion drawing*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan yang dilakukan

---

<sup>82</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 247

peneliti sesuaikan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dengan mencocokkan hasil data yang telah diolah dan dianalisis sebelumnya mengenai pengembangan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk kesejahteraan nelayan kajian dalam *Maqashid Syariah*.

#### **G. Keabsahan Data**

Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, perlu dilakukan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik ketekunan/keajengan pengamatan dan teknik triangulasi untuk memeriksa data agar diperoleh hasil penelitian se-akurat mungkin.

##### **1. Ketekunan/ Keajengan Pengamatan**

Keajengan pengamatan berarti mencari secara konsisten interpretasi dengan berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan tentatif, dan mencari apa yang bisa diperhitungkan atau tidak. Dengan teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan dan menelaah secara terperinci dan hasil temuan dan data yang telah dikumpulkan.

##### **2. Triangulasi**

Triangulasi teknik merupakan teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Sehingga ada

triangulasi dari sumber/informan, triangulasi pengumpulan data, dan triangulasi waktu.<sup>83</sup>

Adapun triangulasi dengan menggunakan metode berarti peneliti mengecek derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data seperti metode wawancara dan metode observasi. Disini peneliti melakukan triangulasi sumber dan metode dengan melakukan beberapa hal.<sup>84</sup>

*Pertama*, peneliti membandingkan hasil wawancara satu informan dengan informan lainnya terkait Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Terhadap jawaban atas pertanyaan yang sama, peneliti melakukan perbandingan apakah keterangan yang disampaikan oleh informan pertama bersesuaian, dibenarkan, dikuatkan ataukah justru dibantah dan diklarifikasi oleh keterangan informan lainnya. Jika ternyata ditemukan keterangan yang disampaikan justru dibantah akan diklarifikasi kebenarannya, peneliti kembali akan melakukan wawancara untuk mencari kebenaran atas keterangan yang disampaikan tersebut.

*Kedua*, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan dokumentasi terkait Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan dalam proses wawancara selanjutnya dilakukan cross-check dengan dokumen-dokumen yang

---

<sup>83</sup> Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 170

<sup>84</sup> Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis keArahRagam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers.

terkait dengan keterangan dari informan tersebut. *Ketiga*, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan terkait Pengelolaan TPI. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh informan akan dibandingkan dengan catatan lapangan hasil pengamatan di Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Peneliti membandingkan apakah yang diungkapkan informan dalam wawancara benar-benar terjadi atau dilaksanakan di lapangan.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

##### **1. Profil Wilayah Pesisir kecamatan paiton Kabupaten Probolinggo**

Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Paiton kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo berada pada koordinat antara 1120 51" – 1130 30" BT dan 70 40" – 80 10" LS. Secara administratif memiliki 24 Kecamatan namun yang masuk kedalam wilayah pesisir hanya 7 kecamatan terdiri dari Jabungsisir, Randutatah, Karanganyar, Pondokkelor, Sukodadi, Sumberanyar, Sumberejo, Binar. dan yang menjadi objek penelitian di kawasan pesisir kecamatan paiton Kabupaten Probolinggo.

Adapun letak geografis kecamatan Paiton terletak di Kabupaten Probolinggo yang berada dibagian timur dengan batas-batas:

Utara : Selat Madura

Timur : Kabupaten Situbondo

Selatan : Kecamatan Pakuniran dan Kotaanyar

Barat : Kecamatan Kraksaan dan Besuk

Ditinjau dari ketinggian diatas permukaan air laut, Kecamatan paiton berada pada ketinggian 0 sampai 250 meter diatas permukaan air laut. ibukota Kecamatan Paiton kira-kira berada pada 6 meter diatas permukaan air laut. Adapun jumlah penduduk di kecamatan Paiton yaitu dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 4.1**

Tabel Nama Desa dan Jumlah Penduduk di kecamatan Paiton  
Kabupaten Probolinggo.

No	NamaDesa	Luas Wilayah	Penduduk		Jumlah Kepala Keluarga
			L	P	
1	Jabung sisir	2,92 km <sup>2</sup>	1.577	1.669	936
2	Randutatah	1,75 km <sup>2</sup>	819	859	547
3	Karanganyar	5,27 km <sup>2</sup>	2.878	3.071	1.779
4	Pondokkelor	1,97 km <sup>2</sup>	1.986	1.952	966
5	Sukodadi	1,76 km <sup>2</sup>	1.991	1.913	1.228
6	Sumberanyar	3.82 km <sup>2</sup>	3.317	3.249	1.965
7	Bhinor	13,97 km <sup>2</sup>	1.181	1.88	693

*Sumber:* profil Desa pesisir provinsi jawa timur

Karakteristik masyarakat pesisir kecamatan paiton Probolinggo,berbudaya agraris yaitu petani dan nelayan.Penduduknya sebagian besar merupakan suku Jawa dan Madura yang terkenal ulet, lugas, terbuka, dan kuat dalam mengarungi kehidupan (berjiwa wiraswastatinggi). Perpaduan masyarakat dan budaya yang masih asli dicerminkan dengan gotong royong dan pengaruh Islam yang sangat kuat. Masyarakat pesisir mayoritas mata pencaharian nelayan dengan basis warganya beragama islam sangat memungkinkan adanya kearifan lokal dengan dasar agama islam

yang bisa digunakan sebagai profil kearifan lokal asli dipesisir sebagai acuan dalam pengelolaan masyarakat yang peduli terhadap lingkungan. Sehingga dalam kehidupan masyarakat pesisir, jalannya perekonomian, agama dengan kelestarian lingkungan bisa berjalan beriringan tanpa ada salah satu yang tersisih.

Salah satu cara masyarakat pesisir kecamatan Paiton Probolinggo dalam menghadapi masa paceklik (penghasilan menangkap ikan berkurang) adalah dengan Andun yaitu suatu proses perpindahan sementara dalam usaha penangkapan ikan oleh nelayan dikarenakan beberapa kendala cuaca. Andun adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan membawa kapal dan seluruh anggotanya yang berkenan untuk ikut kelokasi yang ditentukan oleh kapten kapal. Umumnya para nelayan pada pesisir Probolinggo pergi ke daerah Paiton (perbatasan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Situbondo) dan Kabupaten Pasuruan, Pada bulan-bulan Agustus hingga September dan awal awal November.

Pemandangan yang sering dijumpai di perkampungan nelayan Kecamatan Paiton Probolinggo adalah lingkungan hidup yang kumuh serta rumah-rumah yang sangat sederhana. Lapisan sosial di masyarakat pesisir Kecamatan Paiton Probolinggo sudah lebih pada tingkatan yang lebih maju. Karena masyarakatnya tidak hanya mengandalkan penghasilan sebagai nelayan, tapi juga di berbagai sektor lainnya yang masih berhubungan dengan laut maupun pesisir, yaitu pariwisata,

## 2. Profil Tempat Pelelangan Ikan

Tempat pelelangan ikan TPI merupakan salah satu tempat pendaratan ikan yang ada dikecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berlokasi di jalan Lapangan Tembak, Dusun Pesisir, Desa Sumber Anyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo dengan titik koordinat 07°42'24.72" LS dan 113°31' 25.57' BT. Tempat Pelelangan Ikan TPI memiliki potensi perikanan dipelabuhan cukup baik, dinas kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk mengelolanya. Sehingga tahun 2012 Tempat Pelelangan Ikan TPI Paiton resmi dikelola oleh dinas kelautan dan perikanan sehingga TPI Paiton menjadi sentra usaha perikanan tangkap bagi nelayan sekitar dari dalam maupun luar daerah Kecamatan Paiton. Adapun letak geografi TPI Paiton sebagai berikut:

#### **Gambar 4.1**

Peta Tempat Pelelangan Kecamatan Paiton



Sumber: *Google Map*

## Visi dan Misi

Dinas kelautan dan perikanan kabupaten Probolinggo mempunyai tugas melaksanakan fungsi desentralisasi dibidang kelautan dan perikanan Kota Probolinggo, dalam melaksanakan fungsinya berpedoman pada:

### Visi

“Menuju pembangunan perikanan berbasis Industri”

### Misi

- Mengoptimalkan sumber daya perikanan secara berkelanjutan
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan
- Pengembangan Industrialisasi perikanan
- Peningkatan sumber daya manusia

Adapun fungsi Tempat Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Melaksanakan pelayanan dan penataan tempat tambat labuh, bagi kapal perikanan yang melakukan kegiatan bongkar muat di dermaga Tempat Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
2. Melaksanakan pengawasan dan kontroling terhadap kegiatan pendaratan, pemasaran/penjualan, pengolahan terhadap nelayan dan pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

3. Melakukan pengawasan, penertiban dan penarikan retribusi pada obyek kegiatan yang ada di Tempat Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

Adapun Obyek kegiatan perikanan di Tempat Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Retribusi tambat labuh kapal perikanan
2. Retribusi bongkar muat kapal perikanan
3. Retribusi roda dua dan roda empat
4. Retribusi pasar ikan

Tujuan Tempat Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.
2. Meningkatkan aktivitas perikanan yang dilakukan oleh pelaku kegiatan perikanan rakyat tradisional, usaha kecil menengah dan usaha industri perikanan.
3. Terwujudnya kualitas sistem agribisnis bagi petani ikan dan nelayan yang memadai.
4. Terwujudnya pengetahuan dan ketrampilan aparat, petani ikan dan nelayan.

## **B. Paparan Data Dan Hasil Temuan**

### **1. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo**

Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Paiton yang melaksanakan tugas dan fungsinya adalah mengelola sarana dan prasarana serta melakukan pelayanan terhadap segenap aktifitas kegiatan nelayan baik yang bersifat pembinaan maupun yang bersifat informasi. TPI kecamatan Paiton dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap segenap aktifitas ekonomi perikanan yang implementasinya sebagai pelayanan kegiatan kapal, pembinaan dan informasi terhadap kegiatan nelayan dalam hal penggunaan alat tangkap yang baik untuk meningkatkan produksi perikanan yang bermutu sehingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, selain itu Tempat Pelelangan Ikan TPI Kecamatan Paiton adalah tempat dimana para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara lelang, secara umum pengembangan dan pembangunan tempat pelelangan ikan TPI dapat memajukan ekonomi disuatu wilayah.

Untuk mendukung berjalannya penelitian ini maka penelitian ini menggunakan teknik wawancara dalam pengumpulan data dan informasinya, informan yang akan di wawancarai berjumlah 5 orang sebagai berikut:

#### **a. Bapak Bahrul Ulum**

Beliau adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tinggal di Kecamatan Pakuniran, pendidikan terakhirnya adalah S1. Beliau di

percayaikan sebagai kepala TPI oleh dinas perikanan Kabupaten Probolinggo

b. Ibu HJ.Rahmah

Tinggal di Kelurahan Kalibuntu Kecamatan Kraksaan pendidikan terakhirnya adalah tamat SD selain iburumah tangga Beliau adalah tengkulak dan pedagang yang setiap harinya pergi ke TPI Paiton untuk bekerja.

c. Bapak H.Hamid

Salah satu masyarakat nelayan yang tinggal di Desa Pondokkelor kecamatan Paiton pendidikan terakhir SMP, beliau adalah nelayan aktif di TPI Paiton yang setiap hari pergi bekerja sebagai seorang nelayan dan menjual hasil tangkap ikannya kepada tengkulak.

d. Ibu Azmi

Beliau tinggal di desa Pondokkelor Kecamatan Paiton yang berumur 42 tahun, pendidikan terakhir SD, selain ibu rumahtangga beliau perprofesi sebagai pedagang kecil di TPI Paiton dan suaminya perprofesi sebagai nelayan.

e. Bapak Sipol

Tinggal di Desa Karanganyar kecamatan Paiton, pendidikan terakhir SD, beliau adalah salah satu nahkoda kapal dimana tugasnya adalah mengkoordinir para anggota awak kapalnya dalam melakukan aktifitas nelayan.

Pengelolaan tempat pelelangan ikan (TPI) yang baik dan optimal dalam operasionalnya merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan

pembangunan perikanan tangkap. Keberadaan TPI semestinya dapat menimbulkan dampak pengganda bagi pertumbuhan ekonomi lainnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tempat pelelangan ikan kecamatan paiton dapat menjadikan makmur masyarakat nelayan, dan tempat pelelangan ikan mampu mengelola atau mengolah tempat tersebut. Dari hasil penelitian bahwasanya pengelolaan tempat pelelangan ikan TPI dan pelayanannya di Kecamatan Paiton sudah berjalan dengan baik hal ini seperti yang dikatakan Kepala Tempat Pelelangan Ikan Bapak Bahrul Ulum:

“Pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kecamatan Paiton sudah berjalan dengan baik dan berkembang dari setiap tahunnya. Pengelolaan TPI paiton menjadi acuan bagi Tempat Pelelangan Ikan di wilayah lainnya dan tentunya dengan perkembangan dan fasilitas TPI untuk saat ini sangat sangat membantu masyarakat melakukan aktifitas pemasaran dan membantu pihak nelayan khususnya”.<sup>86</sup>

Dengan penjelasan beliau bahwa dengan ini kegiatan dan pengelolaan yang sudah berjalan dengan baik, maka ada tolak ukur agar pengelolaan tersebut efisien dan optimal, maka dengan ini beliau menjelaskan dapat diukur dengan kinerja pelayanan dan operasional, fasilitas dan aktifitas Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton.

#### a. Produksi Tempat Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton

Pangkalan Pendaratan Ikan atau dikenal Tempat Pelelangan Ikan TPI Paiton adalah salah satu sarana untuk memproduksi ikan yang bermutu baik, dengan asumsi bahwa ikan yang diproduksi di Tempat

---

<sup>86</sup> Ulum, *Wawancara* (Probolinggo 05 September 2020)

Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo mampu bersaing di pasar lokal maupun di pasar internasional. Jenis ikan yang didaratkan di TPI Paiton bervariasi setiap hari, karena dipengaruhi oleh cuaca dan musimnya. Kondisi alam perairan yang tidak bisa di prediksi menyebabkan kendala bagi nelayan dalam menentukan waktu operasi penangkapan ikan yang baik.

Hal ini diperkuat oleh wawancara terhadap bapak sipol selaku nelayan di kecamatan Paiton sebagai berikut:

“ollenah jukok tak mesti karnah cuaca ben musim beкто *pettengan* biasanah se nangkep jukok ben boleh *teraan* tak lakoh, coman meccek jering ben peralatan sebede ekapal neng TPI, ben macem macem jukok tak mesti sepegek tapeh rata kebenyaan jukok lajeng, cakalan, madeih, kendui, ben nus tapeh jarang, delem benarenah bisa sekitar 10 tonan deri kabbi kapa”<sup>87</sup>.

Dari hasil wawancara dengan informan diatas artinya “bahwa tidak mestinya pendapatan ikan hasil tangkap dikerenakan cuaca dan pada waktu gelap bulan (*Penttengan*) para nelayan melakukan aktifitas menangkap ikan (*majeng*) dan apabila terang bulan (*teraan*) para nelayan melakukan aktifitas memperbaiki jaring (*Pajeng*) dan perelatan kapal di TPI Paiton, jenis ikan yang dominan di daratkan di TPI Kecamatan Paiton setiap harinya adalah jenis ikan layang, tonggkol, kembung, cakalang, teri, cumi-cumi-kerisi, dengan kuntitas ikan yang didaratkan pada saat bulan gelap rata-rata 10 ton per hari”, dan waktu terang bulan kapal-kapal nelayan banyak yang melakukan *docking* atau memperbaiki

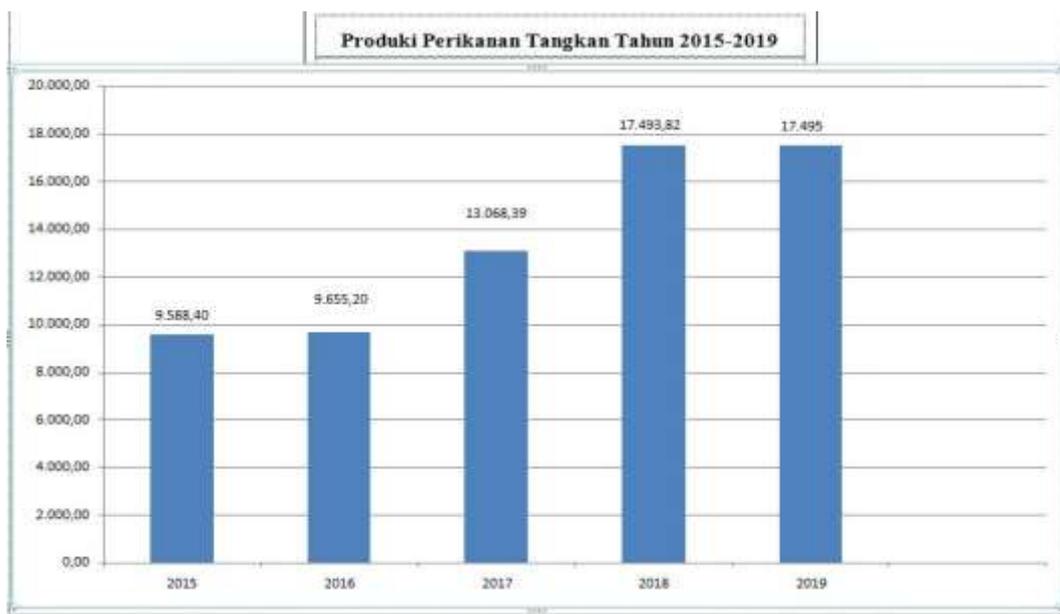
---

<sup>87</sup> Sipol, Wawancara (Probolinggo 07 September 2020)

kapalnya. Untuk lebih jelasnya produksi dan nilai produksi ikan yang didaratkan di TPI Paiton pada tahun 2015-2019 yang didapat peneliti dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Gambar 4.2**

**Produksi Perikanan Tangkap Kecamatan Paiton**



*Sumber:* Dokumen Tempat Pelelangan Ikan Kecamatan Paiton

Berdasarkan gambar diatas , menunjukkan bahwa perkembangan jumlah produksi ikan dan nilai produksi ikan yang didaratkan di TPI Paiton setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah sedikit. Pada tahun 2015 produksi ikan sebesar 9.588,40, tahun 2016 sebesar 9.665,20, tahun 2017 sebesar 13,068,39, tahun 2018 sebanyak 17,493,82 dan pada 2019 produksi ikan di TPI Paiton naik sebesar 17.945.

Produksi perikanan laut antara lain sangat tergantung pada perahu atau kapal yang digunakan atau dimiliki nelayan. Mengingat sifat ikan yang sering bermigrasi atau berpindah tempat maka *fishing ground* atau lokasi penangkapan juga berpindah, dengan demikian, maka motorisasi kapal atau perahu akan dapat meningkatkan hasil tangkapan.<sup>88</sup>

Peningkatan produksi ikan di TPI Paiton disebabkan oleh penyediaan sarana produksi penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Paiton yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga mempermudah bagi nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapannya dan juga mudah mendapatkan kebutuhan melaut, walaupun penyediaannya masih ada kekurangannya. Pelabuhan perikanan dapat diartikan suatu panduan dari wilayah perairan, wilayah daratan dan sarana-sarana yang ada di basis ikan penangkapan dan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasarannya.

Hal ini dapat diketahui dari wawancara terhadap Hj.Rahmah selaku pedagang atau bakul dengan pertanyaan peneliti tentang Proses penggunaan sarana dan fasilitas di TPI Paiton sebagai berikut.

“Dalam pemasaran ikan saya selaku pedagang sangat terbantu dengan menyedian sarana produksi penangkapan ikan di TPI paiton karena TPI yang dibangun oleh dinas kelautan dan perikanan membantu para nelayan dalam mendaratkan hasil tangkapan yang telah di bongkar muat dikapal dan proses menyortiran”<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Hanafiah, dan Saefuddin, *Tata Niaga Hasil Perikanan* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006) 200

<sup>89</sup> Hj.Rahmah, *Wawancara* (Probolinggo 07 septmber 2020)

b. Kinerja Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan TPI di Kecamatan Paiton

Pelayanan kapal, pada proses bongkar muat hasil tangkapan di TPI Paiton, aktivitas bongkar muat mulai dari pukul 22.00 WIT - pukul 03.00 WIT, karena di TPI Paiton tidak menggunakan sistem antrian. Mekanisme pelayanan yang tidak menentu dikarenakan kapal tangkap ikan yang datangnya tidak bisa diprediksi, dimana waktu pelayanan adalah saat dimulainya pelayanan sampai selesainya. Sebagaimana penjelasan yang ditanyakan peneliti tentang jam aktifitas kinerja Pengelolaan TPI Paiton kepada Kepala TPI Paiton Bapak Bahrul Ulum menjawab:

“kegiatan aktifitas pengelolaan pelelangan ikan biasanya dari jam 22.00-03.00 dini hari karena para nelayan biasanya pada waktu gelap bulan waktu datang pada dini hari dan para nelayan berangkat dari TPI Paiton dari jam 15.00 dan kapal berlabuh lagi pada waktu tengah malam sampek pagi sehingga waktu pelayan TPI tidak menentu, pada waktu tengah malam para pedagang dan pembeli ikan datang ke TPI untuk membeli ikan atau lelang dari pedagang atau bakul dengan tujuan untuk dijual kebalik dipasar tradisional”.<sup>87</sup>

Aktivitas pembongkaran ikan yang paling ramai antara pukul 23.00 WIT 04.00 WIT, karena pada dini waktu kapal tangkap ikan melakukan bongkar muat di TPI Paiton, bukan hanya pedagang dan pembeli ikan. Aktivitas pembongkaran ikan pada dini hari dilakukan untuk pemasaran lokal di pasar tradisional.

---

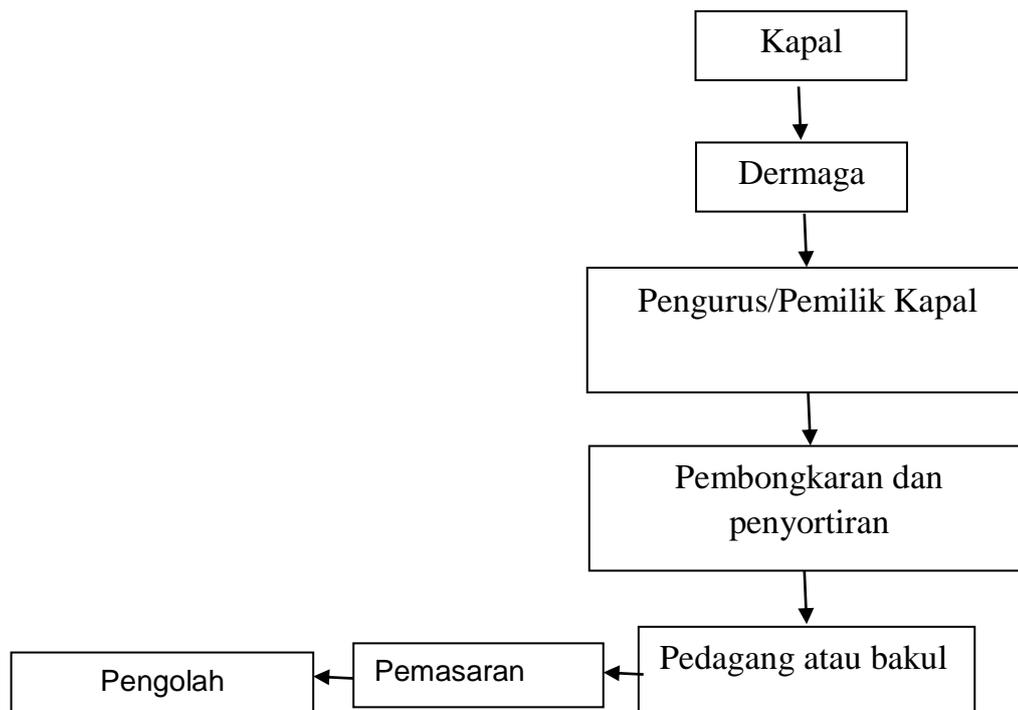
<sup>87</sup> Zaini, *Wawancara* (Probolinggo, 07 september 2020)

Pelayanan dermaga bongkar muat maupun tambat labuh di TPI Paiton , sudah ada pengaturan *space* atau ruang untuk kegiatan bongkar muat dan tambat labuh kapal, sehingga tidak dapat menghambat bagi aktivitas kapal-kapal nelayan yang melakukan bongkar muat hasil tangkapannya. Untuk dapat memberikan pelayanan yang aman dan nyaman, otoritas pelabuhan dapat mengatur *space* untuk kegiatan bongkar muat dan tambat labuh kapal perikanan. Adapun alur dari pendaratan hasil tangkap ikan di TPI Paiton bisa dilihat di gambar dibawah ini:

**Gambar 4.3**

Alur Pendaratan Hasil Tangkapan Ikan Di TPI Kecamatan

Paiton



Sumber: diolah Peneliti 2020

Dari skema diatas menjelaskan alur pendaratan ikan hasil tangkap dari menambatkan kapal disisi dermaga di TPI Paiton kemudian pemilik kapal mengurus proses pembongkakan dan penyortiran lalu dilalukan proses lelang dengan pedagang atau bakul yang kemudian dilakukan pemasaran dengan para konsumen dan kemudian dikelola dengan fasilitas TPI.

Fasilitas pelayanan yang disediakan adalah dermaga berukuran 100 x 200 meter yang dipergunakan sebagai area bongkar muat hasil perikanan, serta dipergunakan untuk tambat labuh bagi kapal nelayan. Dermaga ini ditunjang dengan dermaga semen cor sebagai sarana untuk kegiatan bongkar muat hasil tangkapan nelayan yang menggunakan perahu motor.

, Pelabuhan Perikanan pada hakekatnya merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan, berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi. Selanjutnya dikatakan bahwa, sektor perikanan tangkap memerlukan fasilitas pendaratan ikan atau pelabuhan khusus untuk melayani aktifitas bongkar muat ikan dari laut ke darat untuk kemudian dipasarkan kepada konsumen.<sup>88</sup>

#### c. Fasilitas Pokok di TPI Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

---

<sup>88</sup> Murdiyanto, *Pelabuhan Perikanan. ED 2.* (Bogor, fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 2003)

Fasilitas-fasilitas yang ada di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paiton adalah fasilitas pokok dan fasilitas fungsional. Fasilitas pokok yang terdapat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paiton antara lain dermaga, kolam pelabuhan, breakwater, jalan dalam kompleks, drainase, alur pelayaran dan pagar Keliling pelabuhan perikanan. Adapun fasilitas pokok TPI Paiton bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 4.3**

Data kondisi Fasilitas Pokok dan Pemanfaatan TPI Paiton

No	Fasilita Pokok	Ukuran Terpasang	Kondisi	Pemanfaatan
1	Dermaga	500 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
2	Kolam Pelabuhan	400 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
3	Breakwater	500-900 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
4	Alur Pelayaran	6 m	Baik	Dimanfaatkan
5	Jalan	700 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
6	Drainese	600 m	Baik	Dimanfaatkan
7	Pagar Keliling	700 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan

*Sumber:* Data Tempat Pelelangan Ikan Paiton

Berdasarkan tabel diatas memaparkan data kondisi Tempat Pelelangan Ikan di Paiton menurut Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 1 6/MEN/2006 pasal 22 ayat 1 tentang pelabuhan perikanan adalah fasilitas pokok pelabuhan perikanan meliputi: fasilitas pelindung, dermaga, kolam pelabuhan, alur pelayaran,

lahan pelabuhan, jalan dan drainase. Adapun fasilitas pokok yang ada di TPI kecamatan Paiton yaitu, dermaga, kolam pelabuhan, Breakwater ialah bangunan yang digunakan untuk melindungi dermaga berupa batuan memanjang, alur pelayaran, jalan dalam koplek pelabuhan, Drainese, pagar keliling. Adapun fassilitas pokok yang ada di TPI paiton sebagai berikut.

*Dermaga* di TPI paiton terbuat dari beton dengan ukuran panjang 250 x 500 m dalam kondisi yang baik yang diperuntukan sebagai tempat tambat labuh dan bongkar muat basil tangkapan bagi kapal perikanan. Dermaga adalah struktur yang berfungsi sebagai tempat untuk bertambat dan berlabuhnya kapal, bongkar muat hasil tangkapan, dan mengisi bahan perbekalan untuk melaut.

*Kolam* pelabuhan di TPI Paiton saat ini dibentuk oleh dinas kelautan dan perikanan Kabupaten probolinggo dengan kedalaman 10m m dan luas kolam pelabuhan 400 m<sup>2</sup>. Pada Kolam pelabuhan tidak terjadi sedimentasi, sehingga dasar perairan kolamnya cenderung tetap. Kolam pelabuhan berfungsi sebagai alur pelayaran dan sebagai kolam untuk olah gerak kapal.

*Breakwater* adalah bangunan yang digunakan untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang air laut. breakwater di TPI Paiton terbuat dari batu-batu besar dengan mengelili dari sisi kanan dan timur dengan memanjang kearah laut dengan panjang 500-900

m, breakwater ini berfungsi melindungi kapal waktu berlabuh dari gelombang air laut di TPI Paiton.

*Alur Pelayaran* di TPI Paiton saat ini tidak dilengkapi dengan rambu-rambu atau alat bantu navigasi, hal ini tidak menyulitkan nelayan karena para nelayan tersebut telah sangat menguasai jalur pelayaran di TPI Paiton, meskipun mereka melakukan pelayaran pada malam hari. Kedalaman alur pelayaran di TPI Paiton 10 meter. Alur pelayaran adalah bagian perairan pelabuhan yang merupakan pintu masuk kolam pelabuhan sampai ke dermaga. Alur pelayaran berfungsi sebagai jalan masuk atau keluar bagi kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan perikanan atau pangkalan pendaratan ikan.

*Jalan Komplek* Untuk kelancaran pendistribusian hasil tangkap nelayan, jalan dalam komplek Pangkalan Tempat Pelelangan Ikan Paiton dalam kondisi yang sangat baik, jalannya di cor beton. Panjang jalan komplek menuju dan keluar Pangkalan Tempat Pelelangan Ikan adalah 4 x 700 meter.

*Drainase* Drainase adalah saluran air limbah yang berfungsi sebagai saluran pembuangan limbah cair yang berasal dari limbah rumah tangga maupun limbah hasil aktifitas pengolahan hasil perikanan di TPI Paiton. Saluran air limbah di TPI Paiton berbentuk selokan disekeliling areal TPI Paiton. Lebar saluran air limbah ini adalah 50 cm yang terbuat dari beton.

*Pagar Keliling* adalah sebuah bangunan tembok yang mengelilingi Tempat Pelelangan Ikan Paiton yang berfungsi sebagai pelindung atau pembatas yang berguna untuk melindungi area yang dikelilingi yang panjangnya kurang lebih 700m

d. Fasilitas Fungsional Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang berfungsi untuk meningkatkan nilai pemanfaatan dari fasilitas pokok yang dapat menunjang kelancaran aktifitas di pelabuhan. Fasilitas fungsional yang terdapat di TPI Paiton antara lain: pasar ikan, instalasi listrik, Gudang es, tangki BBM/pom mini, instalasi air bersih, tempat perbaikan jaring, kantor, pos keamanan, kios, mes Petugas, tempat peribadahan/musholla, Pelabuhan perikanan memiliki berbagai fasilitas dalam menunjang kegiatan nelayan untuk meningkatkan produksi hasil tangkapannya yaitu fasilitas pokok, dan fasilitas fungsional.

**Tabel 4.4**

Data Fasilitas Fungsional dan Pemanfaatan TPI Paiton

No	Fasilita Fungsional	Ukuran Terpasang	Kondisi	Pemanfaatan
1	Pasar Ikan	600 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
2	Instalasi Listrik	850 KVA	Baik	Dimanfaatkan
3	Gudang es	200 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan

4	Tangki BBM/Pom Mini	200 m <sup>2</sup>	Rusak	Tidak Dimanfaatkan
5	Instalasi air bersih	Ada	Baik	Dimanfaatkan
6	Tempat Perbaikan Jaring	300 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
7	Kantor	250 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
8	Pos Keamanan	50 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
9	Kios	4 unit	Baik	Dimanfaatkan
10	Tempat Peribadahan/ Musholla	100 m <sup>2</sup>	Baik	Dimanfaatkan
11	Mes petugas	1 unit	Baik	Dimanfaatkan

*Sumber:* Tempat Pelelangan Ikan Paiton

*Pasar Ikan* Adalah tempat memasarkan hasil tangkapan nelayan dimana terjadi pertemuan antara penjual dengan pembeli ikan, atau tempat melakukan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli ikan. Pasar ikan yang ada di TPI Paiton merupakan tempat yang membantu para nelayan memasarkan ikan hasil tangkapannya. luas bangunan pasar ikan di TPI paiton adalah 600 m dimana sudah dimanfaatkan dengan baik. Proses penanganan ikan di TPI Paiton bersih dan higienis. Dimana di TPI Paiton sudah ada instalasi air bersih untuk kegiatan pencucian ikan maupun membersihkan pasar ikan, sehingga bau amis tidak mengganggu kenyamanan pembeli maupun pedagang di TPI Paiton.

*Instalasi Listrik* di TPI Paiton berasal dari PLTU pembangkit listrik setempat dengan kapasitas 850 KAV. Listrik digunakan untuk penerangan di gedung TPI dan gedung perkantoran di TPI Paiton serta

untuk kebutuhan bagi aktifitas pedagang dan nelayan yang ada TPI Paiton. Biaya atas pemakaian listrik ditanggung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Sorong untuk kegiatan perkantoran dan untuk kegiatan aktifitas pedagang ditanggung mereka dengan membayar iuran antara pedandang lainnya.

*Gudang es* di TPI Paiton dikelola oleh pihak swasta gudang es di TPI Paiton bisa menampung 20 ton atau 850 balok es dalam satu hari dengan berat 25 kg/balok. Harga es di TPI Paiton 15 ribu/balok. Produksi es tersebut sudah mencukupi untuk kebutuhan nelayan di TPI Paiton. Dengan penjelasan dari responden yaitu bpk Abdul kamil sebagai berikut. “ *Dalam hal produksi es balok disini kisaran 850 Balok, ya perkiraan 20 tonan dalam satuan Kg dalam hal produksi tidak menentu sesuai kebutuhan biasanya pembeli yang bnyak pada waktu malam hari karena nelayan melakukan bongkar muat saat pada malam hari*”.<sup>89</sup>

*Tanggki BBM/ Pom Mini* (bahan bakar rninyak) solar atau Pom Mini di TPI Paiton berjumlah 1 unit, digunakan untuk menampung bahan bakar solar dan premium untuk kebutuhan melaut bagi kapal-kapal nelayan. Namun Pom mini yang ada di TPI Paiton bulum dimanfaatkan dengan baik atau sudah rusak dimana para nelayan untuk berlayar dalam membeli bahan bakar masih pergi ke Pom Besar yang lokasinya cukup jauh dari TPI Paiton.

---

<sup>89</sup> Kamil, *Wawancara* (Probolinggo 07 september 2020)

*Instalasi air Bersih* Instalasi fasilitas yang harus dimiliki oleh pelabuhan perikanan. Menurut Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: PER.16/MEN/2006 pasal 23 ayat (2) huruf b, bahwa fasilitas yang wajib ada pada pelabuhan perikanan untuk operasionalnya adalah salah satunya fasilitas air bersih. Instalasi air bersih di TPI Paiton sudah berfungsi. Instalasi air bersih ini dalam kondisi baik. Fungsi air tawar di pelabuhan perikanan adalah sebagai bahan perbekalan dalam aktivitas operasional penangkapan ikan, air minum dan untuk pembersihan hasil tangkapan serta fasilitas yang tersedia.

*Tempat perbaikan Jaring* Tempat perbaikan jaring di TPI Paiton sudah dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya para nelayan memperbaiki jaring di Lantai bangunan dermaga yang terbuat dari bahan cor beton dan dalam kondisi baik dengan luas lantai cor beton 300 m<sup>2</sup>. Para nelayan dapat memperbaiki jaring yang lebih dekat dengan kapal sehingga mempermudah nelayan menurunkan jaring ke lantai cor di TPI Paiton.

*Kantor* Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Paiton adalah tempat pengadministrasian dan pelayanan kepada nelayan yang melakukan aktivitas kegiatan di Pangkalan Pendaratan Ikan. Luas bangunan Kantor TPI Paiton adalah 250 m<sup>2</sup> yang merupakan bangunan rumah. Kondisi kantor TPI Paiton berkondisi baik dan berfungsi. Kantor administrasi TPI Paiton juga sebagai pos pengawasan dan pemantauan kegiatan dermaga.

*Pos keamanan* adalah pos Satpat untuk mengamankan dan menjaga ketertiban serta penjaga di jalur masuk ke TPI Paiton kepada segenap aktifitas kegiatan nelayan yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan. Luas bangunan 54 m<sup>2</sup> yang terbuat dari bahan beton. Bangunan pos keamanan dalam kondisi baik dan berfungsi.

*Kios* Untuk mempermudah mendapatkan kebutuhan melaut bagi nelayan, di area Tempat Pelelangan Ikan TPI Paiton terdapat 8 unit kios yang diusahakan oleh masyarakat disekitar TPI paiton guna menyediakan kebutuhan nelayan yang melakukan aktivitas di TPI Paiton.

*Tempat peribadahan/musholla* Tempat ibadah yaitu Mushola adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan ibadah bagi masyarakat disekitarnya dan khusus masyarakat nelayan yang ada di sekitar TPI Paiton yaitu Musholla dengan luas bangunan masjid 100 m<sup>2</sup> dalam kondisi baik dan juga dimanfaatkan dengan baik.

*Mes petugas* atau rumah dinas adalah tempat hunian petugas Pelelangan Ikan Paiton yang di bangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, diperuntukan bagi petugas TPI Paiton, guna efisiensi dan efektifitas kegiatan di Pangkalan Pendaratan Ikan. Jumlah Rumah Dinas Petugas Tempat Pelelangan Ikan sebanyak 1 unit dengan fasilitas 4 kamar dengan kondisi baik.

## **2. Kendala Kendala Proses Lelang Ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo**

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kecamatan Paiton merupakan salah satu tempat para nelayan menjual hasil tangkapan ikan. Menurut peraturan yang berlaku di TPI Paiton, hasil tangkapan ikan harus dijual melalui lelang di TPI. TPI Paiton menjadi fasilitator antara nelayan dan bakul (pembeli) ikan dengan cara sistem lelang. Para bakul juga mendapat keuntungan sistem lelang, mereka dapat membeli hasil tangkapan nelayan dan nelayan memperoleh pendapatan dari menjual ikan. Sistem lelang dilakukan dengan harga yang disepakati dengan cara lelang. Berikut penjelasan dari kepala TPI Paiton.

“ Tempat pelelangan Ikan (TPI) paiton berfungsi mengelola sarana dan prasarana dimana menyiapkan untuk aktifitas nelayan maupun pedagang atau bakul, dimana hasil tangkapan ikan para nelayan dijual melalui sistem lelang, dan ada tawar menawar dimana ikan akan dilelang dengan penawaran yang paling tinggi. Namun sistem lelang ini sendiri belum kelola oleh pihak TPI itu sendiri melainkan oleh para bakul/ tengkulak karena keterikan modal kerja dengan nelayan”.<sup>90</sup>

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwasanya sistem lelang yang dilakukan oleh TPI Paiton masih belum maksimal karena semua nelayan menjual ikan hasil tangkapannya kepada bakul/ tengkulak tanpa memalui proses sistem lelang. Menurut pengurus TPI paiton praktek tersebut jelas merugikan

---

<sup>90</sup> Ulum, *Wawancara* (05 September 2020)

Tempat Pelelangan Paiton karena dampak yang ditimbulkan oleh praktek penjualan tanpa melalui proses lelang tersebut yaitu merosotnya pendapatan TPI Paiton, pendapatan pajak menurun. Selain itu menurut para nelayan yang peneliti wawancara. “ *sesungguhnya para nelayan menginginkan penjualan ikan yang dilakukan proses lelang oleh Tempat Pelelangan Ikan meskipun harga lebih murah sedikit tetapi kami puas karena harga yang stabil meskipun ikan melimpah, jika ikan melimpah atau banyak harga cenderung sangat murah dan itu jelas sangat merugikan para nelayan*”.<sup>91</sup> Sehingga muncul ketidakadilan. Para nelayan menerjang ombak mempertaruhkan nyawa mendapat lebih sedikit dari pedagang atau bakul yang hanya duduk diam menunggu di TPI menunggu ikan. Namun berbeda dari yang diungkapkan bapak Sipol bahwa.

*“engkok lebi mele ajuak ke tengkulak deri pada degeng TPI paiton polanah prosesah mlarat kalaben harge mude'en pole, engkok kan degeng tentoh terro harga sepaleng larang nak*”.<sup>92</sup>

Dari penjelasannya bahwa bapak Sipol lebih memilih proses lelang dengan bakul atau tengkulak dikarenakan mekanisme proses lelang dari pelelangan Paiton yang begitu rumit, dan harga yang cenderung lebih murah sedangkan ibu Azmi yang menginginkan harga yang lebih mahal.

Ada tiga jenis bakul ikan yang ada di TPI Paiton yaitu bakul kecil, bakul sedang dan bakul besar klasifikasi ini didasarkan pada modal dan daerah pemasaran ikan.

---

<sup>91</sup> Sipol, Wawancara (07 September 2020)

<sup>92</sup> Sipol, Wawancara (05 September 2020)

- a. Pedagang/bakul Kecil, dengan skala modal yang kecil biasa para ABK (anggota kapal) nelayan mempunyai hutang lebih kecil kepada pedagang kecil sebagai tanda keterikatan dimana bagian ikan yang diperoleh anggota kapal harus dijual kepadanya. Dan biasanya membeli ikan dalam jumlah sedikit dengan daerah pemasaran juga sangat terbatas atau bersifat lokal saja, bakul ini menyalurkan ikan yang dibelinya langsung pada konsumen atau usaha usaha pengolahan ikan bersekala kecil seperti pemindangan, pengasapan dan pengasinan.
- b. Pedagang/bakul sedang, bakul ini mempunyai skala modal yang tidak besar, biasanya bakul sedang juga menjual ikan kepada bakul sedang, sedangkan bakul sedang memasarkan ikan mencakup daerah-daerah sekitar Paiton, Kota Probolinggo, pasa-pasar besar di Kabupaten Probolinggo dan lain- lain. Tetapi kadang-kadang bakul ikan jenis menjual ikannya pada pedagang pengepul jadi tidak langsung menyalurkan ikannya pada konsumen yang datang langsung ke TPI Paiton. Ikan-ikan yang dibeli biasanya mempunyai nilai ekonomi tinggi, seperti ikan tongkol, layang, dorang, layur, cumi-cumi dan lain-lain.
- c. Pedagang/bakul besar, dengan skala modal yang besar bakul jenis ini melakukan kontrak dengan pemilik kapal dengan pemberian hutang modal sebesar 50-200 juta. Biasanya bakul besar membeli ikan dalam jumlah yang besar, pedagang besar biasanya menampung ikan dari hasil kapal keseluruhan kepada pemilik kapal tetapi tak jarang mereka

mengikuti lelang. Pemasaran pedagang besar ini dipasarkan pabrik-pabrik pengolahan ikan, dan keluar Kabupaten Probolinggo sampai Pulau Bali.<sup>93</sup>

Proses pelelangan ikan dan sistem pelelangan yang dilakukan pedagang atau bakul di TPI Paiton merupakan faktor yang mempengaruhi nelayan. Menurut informan yang ditemui saat penelitian, mekanisme pelelangan di TPI Paiton tidak begitu rumit, saat kapal mendaratkan hasil tangkapannya kemudian langsung diangkut ke TPI, kemudian pihak bakul atau pemberi modal mengumpulkan pembeli kemudian pelelangan dimulai. Nelayan yang terlibat dalam aktivitas pelelangan di TPI Paiton adalah nelayan purse seine, nelayan pancing, nelayan payang, nelayan rampus, pedagang. Sistem administrasi nelayan dan para pembeli yang ingin mengikuti pelelangan juga tidak begitu rumit, dan pihak pengelola hanya menagih biaya pajak retribusi sebesar 5000 dalam setiap 100 kg penjualan ikan.

Adanya retribusi pelelangan ikan yang harus dibayarkan sesuai dengan Peraturan Gubernur provinsi Jawa Timur No 05 Tahun 2019 Tentang Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai. Terkait dengan pembayaran retribusi setiap kali menjual hasil tangkapan di TPI, nelayan mengaku tidak pernah merasa terbebani namun mereka belum merasakan hak yang diterima dari penyaluran kembali dana retribusi. Hak

---

<sup>93</sup> Hj.Rahmah *Waeancara* (Probolinggo 07 septiyember 2020)

tersebut berupa dana kesejahteraan oleh TPI Paiton dalam bentuk dana sosial, dana tabungan, dana paceklik yang diberikan setiap bulan dan dalam kondisi-kondisi tertentu. Adapun hasil wawancara terhadap bapak Sipol selaku nelayan sebagai berikut.

*“moleh lakoh kapal masuk dermaga tpi trus matoron juko’, jukok sabek kranjeng sesuai jenisah dan dibawa ke kennengnah tembengan ambeen, etembeng tros ngelakonin proses lelang pedagang ben pengambem, mareh proses lelang buruh majer biaya pajak engak jasa timbang kebersihan ben jasa angkak”*

Bapak Sipol menyampaikan setelah kapal pulang dari kerja langsung memasuki dermaga TPI Paiton kemudian melakukan proses bongkar muat yang disesuaikan dengan jenis ikan masing ditempatkan di keranjang yang bisa menampung berat 100-120kg dalam 1 keranjang, kemudian ikan dibawa ke tempat timbangan *pengambek* (tengkulak) untuk melakukan proses lelang antara pedagang dan *Pengambek*, setelah proses lelang selesai baru membayar pajak TPI, jasa timbangan, jasa kebersihan, dan jasa tukang angkut ikan.

Sedangkan arti lelang disini adalah proses jual beli yang dilakukan secara terbuka secara umum dan dilakukan pula kegiatan tawar menawar secara terbuka yang memiliki jumlah yang sudah ditentukan dengan nilai terendahnya. Sehingga Tempat Pelelangan Ikan Paiton ini bertujuan untuk mendapatkan harga ikan yang optimal atau stabil, serta mendapatkan harga yang wajar dan tidak merugikan bagi para nelayan ataupun bakul.

Faktor yang cukup menentukan sikap keengganan nelayan terhadap pengelolaan lelang di TPI kecamatan Paiton yaitu adanya keterikatan modal

antara nelayan dengan bakul atau pedagang dimana bisa diakui sebagai kontrak kerja, yakni dari hasil penjualan pemberi modal (pedagang) menerima keuntungan sebesar 20% jika penjualan hasil ikan nelayan 10.000.000. maka pedagang/ pemberi modal membayar 8.000.000 kepada nelayan dengan begitu keuntungan pemberi modal yaitu 2.000.000. dari keseluruhan awak kapal yang ada di Tempat Pelelangan Ikan Paiton sudah terikat kontrak kerja kepada pedagang pedagang yang ada, dengan ketentuan tersebut para nelayan tidak bisa menjual hasil tangkap kepada orang lain ataupun pihak pengelola TPI Paiton. Dan kurang adanya keyakinan dan pengetahuan nelayan tentang fungsi dan tugas serta tata cara pelaksanaan pelelangan yang cukup formal sehingga membuat jarak yang cukup jauh antara pengelola TPI dengan nelayan. Hal tersebut kurang mendapatkan perhatian dari para pembina pelelangan sehingga pemasaran hasil tangkapan hanya cenderung menguntungkan pihak bakul dan merugikan nelayan itu sendiri. Seperti yang dikatakan responden selaku pemilik kapal yang ada di TPI Paiton sebagai berikut.

“ Dengan kurangnya modal untuk membeli kapal saya meminta pinjaman modal kepada pedagang dengan sistem hutang dengan syarat ikan yang kami tangkap nanti akan dilelangnya sehingga aspek ini pihak nelayan atau pemilik kapal tidak serta merta menjual kepedagang lain manakala belum melunasi hutang sebagai kontrak kerja tanpa membagi kerugian yang kami dapat”.<sup>94</sup>

Hampir seluruh nelayan mengalami permasalahan kurangnya permodalan baik dalam hal operasional melaut maupaun untuk perbaikan

---

<sup>94</sup> H. Hamid, *Wawancara* (Probolinggo 10 september 2020)

unit penangkapannya. Nelayan nelayan ini tidak memiliki akses ke bank untuk meminjam modal, faktor yang lain adalah para nelayan mengaku lebih memilih menjual ikan di bakul atau tengkulak daripada di TPI Paiton karena waktunya lebih fleksibel. Waktu pendaratan ikan sebagian nelayan *purse seine* terjadi pada rentang waktu pukul 23.00-04.00 WIB. Dan nelayan payang jam 11.00-15.00 WIB. Karena alasan efektifitas waktu dan efisiensi biaya terkait tambahan biaya untuk penanganan ikan agar tetap segar, nelayan lebih memilih langsung menjual hasil tangkapan kepada bakul atau tengkulak daripada proses lelang TPI Paiton. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan bapak Sipol selaku nelayan:

*“ bekto deteng lakoh majeng perkiraan jem 11 malem sampek 4 pagi, para nelayan trus jege jukok tetap seger sopajeh hasel penjuelnah larangan, jukok patoron langsung timbang marehlah tak dentek abit”*

Bapak Sipol menyampaikan bahwa rentang waktu datang melaut jam 23:00-04:00 pagi, nelayan tetap menjaga kualitas ikan tetap segar supaya harga yang diperoleh lebih tinggi, ikan yang diturunkan setelah proses bongkar muat langsung dibawa kemudian ditimbang menurutnya proses ini tidak rumit dan lebih cepat, berikut tabel kendala-kendala pengelolaan ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton sebagai berikut:

**Tabel 4.4**

Permasalahan Proses Lelang Ikan di TPI Paiton

No	Permasalahan	Keterangan
1	Harga ikan	Harga ikan yang dilelang Tempat

		Pelelangan Paiton cenderung lebih murah
2	Keterikatan modal dengan tengkulak	Kurangnya akses permodalan bagi para nelayan
3	Proses pelelangan ikan	Mekanisme yang di anggap begitu rumit oleh nelayan
4	Retribusi pelelangan ikan	Masih ada biaya pajak penjualan kepada TPI Paiton
5	Waktu pelelangan ikan	Tidak menentunya waktu kapal nelayan berlabuh dan melakukan bongkar muat, dan proses lelang dengan tengkulak lebih fleksibel.

### **3. Upaya Dalam Meningkatkan kesejahteraan Nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Kajian Perspektif *Maqashid Syariah* Tentang Menjaga Harta**

Dalam penelitian ini membahas mengenai kesesuaian kegiatan upaya dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan Paiton dan sistem lelang dengan *maqashid syariah* tentang menjaga harta menurut Imam Syatibi, beliau melihat bahwa sesungguhnya syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara mutlak.<sup>95</sup> Semua kewajiban dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Dalam ungkapan tersebut menggambarkan dengan jelas bagaimana eratnya hubungan antara syariat islalm dengan kemaslahatan, ekonomi islam yang merupakan salah satu bagian dari Syariat Islam, tujuannya tentu tidak lepas dari tujuan utama Syariat Islam. Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dan

---

<sup>95</sup> Al-Syatibi, *Al-Munafaqat*, hal 8

kesejahteraan dunia dan akhirat (*falah*), serta kehidupan yang baik, dan terhormat (*al-hayah al-tayyibah*). Ini merupakan definisi kesejahteraan dalam pandangan Islam, yang tentu saja berbeda secara mendasar dengan pengertian kesejahteraan dalam ekonomi konvensional yang sekuler dan materialistik.<sup>96</sup>

Al-Shāṭibī membagi kemaslahatan tersebut pada tiga tingkatan, yaitu: *pertama*, kemaslahatan *ḍarūrī* (primer). Kemaslahatan ini adalah kepentingan yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan dunia akhirat. *Kedua*, kemaslahatan *hājji* (sekunder), yakni kepentingan yang harus ada demi terwujudnya kemaslahatan yang tanpanya kemaslahatan hidup masih dapat dipertahankan, akan tetapi dalam kesulitan dan tidak normal. *Ketiga*, kemaslahatan *taḥsinī* (tersier), yakni perwujudan kepentingan yang tidak bersifat *ḍarūrī* dan tidak bersifat *hājji*. Dengan kata lain, jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup.<sup>97</sup>

Adapun formula yang ditawarkan Islam di dalam memelihara atau menjaga harta yang sesuai dengan maqoshid syariah adalah memprioritaskan perihal yang primer dan menjaga keutuhan yang primer tersebut dengan perihal-perihal pendukung lainnya. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa, maqoshid syariah terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Formula maqoshid syariah di

---

<sup>96</sup> Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics* (Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989), h. 59

<sup>97</sup> al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, h. 8

dalam memelihara atau menjaga harta adalah tetap memprioritaskan perihal yang primer yaitu menjaga agama, dan dengan menjaga keutuhan yang primer dengan perihal lainnya, termasuk diantaranya adalah menjaga harta. Para ulama ushul sepakat bahwa perihal yang primer yaitu menjaga agama tidak bisa digantikan kedudukannya, dan perihal menjaga harta tidak bisa menempati perihal yang primer menggeser posisi menjaga agama. Dan juga, bahwa perihal menjaga harta adalah penting adanya untuk menjaga keutuhan agama hingga dikatakan bahwa harta yang rusak dapat mempengaruhi kemurnian agama. Namun demikian, para ulama ushul tidak berselisih paham terhadap perbedaan kedudukan dan posisi dari menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta<sup>85</sup>. Yang menjadi analisis atau indikator untuk membedah pengelolaan tempat pelelangan ikan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dalam kajian maqashid syariah tentang menjaga harta. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kecamatan Paiton sebagai berikut:

Ditematkannya menjaga harta dalam maqashid syariah al-Syatibhi yaitu dengan adanya aturan kepemilikan harta yang ketat, sehingga lahirnya aturan dalam mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya, diabaikan aturan ini maka akan mengancam eksistensi menjaga harta. Seperti yang sudah dijelaskan mengenai bagaimana nelayan Kecamatan Paiton mendapat modal dari tengkulak (*pengambek*), ketika berhubungan dengan modal nelayan. Berdasarkan pengalaman, modal untuk

---

<sup>85</sup>Al-Syathibi, *al-Muwafaqot fi Ushul al-Syariah*, (Kairo: Musthofa Muhammad), jilid 2, h. 326

nelayan tidak didapatkan dari hasil perjudian maupun menipu orang lain melainkan dengan cara yang halal.<sup>102</sup>

“ saya meinjamkan uang atau modal dengan ikatan sebagai kontak kerja. Saya membantu kepada para nelayan yang kekurangan modal dalam membeli kapal dengan syarat hasil tangkap ikan saya yang lelang, dan yang bertanggung jawab menjualnya kepedagang adalah saya , tentunya modal yang saya berikan kepada nelayan saya dapatkan dengan carayang halal, biar nanti penghasilan yang saya dapat barokah.“

Kebaikan dalam mengelola harta akan diperoleh dari usaha-usaha yang telah dianjurkan oleh agama termasuk didalamnya memerhatikan kehalal modal yang diberikan kepada nelayan, perhatian nelayan terhadap modal yang diberikan pedagang menjadi penting karena keberkahan menjadi tolak ukur mencapai ridho Allah, sehingga mencegah praktek yang dilarang oleh agama.

Namun pemberian modal yang diberikan tengkulak sama-sama menguntungkan bagi nelayan dikarenakan para nelayan dibantu dalam hal kekurangan modal usaha yang sangat minim dan pedagang mengambil keuntungan dari hasil penjualan ikan tangkap sebesar 2% namun para nelayan belum merasa dirugikan akan hal itu seperti penjelasannya Bapak H.hamid:

*“yeh tak rogi cong polanah engkok kapal mingek jukok dengan gratis tak usa majer atau melleh ditengah laut, kabbi nelayan mingek jukok polanah manfaatgih sumber daya alam ye gun modal melleh kapal bik bikakasih engak jering mesin, ben enlain-lain, malah engkok gik bisa shodaqoh bik bisa bantu tetanggeh se korang mampu, kadeng setiap engkok bede rejeki pasti nyabek amal ka masjid sebagai ras*

---

<sup>102</sup> Hj.Rohmah Wawancara (probolinggo 20 September 2020)

*syokkor sengkok, deddi engkok tak manfaatih rejeki se berik Allah secarah foya-foya ben tadek manfaatah lebih baik kan shodaqoh agih.”*

Bapak H.Hamid menyampaikan bahwa tidak ada kerugian yang didapat soalnya kapal menangkap ikan dengan cara menangkap artinya tidak membeli dan dijual lagi, semua nelayan menangkap ikan dengan memanfaatkan sumber daya alam (laut) dengan modal kapal membeli kapal dan perabotannya (alat yang dipakai buat menangkap ikan), dan Bapak H.Hamid disamping mendapatkan penghasilan tak lupa pula untuk bershodaqoh dan membantu tetangganya yang dirasa kurang mampu, dan tidak memanfaatkan rezeki yang diberi oleh Allah SWT secara foya-foya yang tidak ada manfaatnya lebih baik di shodaqohkan saja. Harta yang banyak bukanlah indikator kesuksesan seseorang hamba, kesuksesan dimata Allah hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan mampu untuk menggunakan dan memanfatkannya buat diri sendiri dan orang lain, serta agama.

Menurut Menurut Imam Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya. Masyarakat menengah keatas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya guna diperuntukan pada masa yang akan datang. selain pemberian modal dari tengkulak untuk nelayan Paiton adapula yang harus juga diperhatikan yaitu konsep

kemaslahatan dalam sistem ekonomi dalam menjaga harta bahwa ada tiga pokok yaitu dengan mencatat, dengan persaksian, dan juga dengan pernyataan dokumentasi<sup>86</sup>. Hal ini sudah di terapkan di TPI Paiton seperti yang sudah dikatakan oleh ibu Hj.Rahmah selaku tengkulak sebagai berikut:

“Transaksi jual beli proses lelang ikan yang dilakukan secara bersama-sama antara saya dengan yang punya kapal, jadi kapal datang bongkar muat kemudian ditimbang dilakukan pencatatan ke dalam buku nota dimana saya dan pemilik kapal sama-sama mencatat kemudian dicocokkan kembali untuk menjaga terjadinya kesalahan dari 1 pihak.”

Dari penjelasan ibu Hj.Rahmah dapat disimpulkan bahwa dengan pencatatan, persaksian serta dokumentasi yang dilakukan oleh pihak tengkulak dan nelayan Paiton adalah bentuk kemaslahatan dalam menjaga harta dalam sistem ekonomi islam dengan maksud menghilangkan keraguan diantara belah pihak yang melakukan transaksi dari hal-hal yang mengurangnya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya dalam proses lelang ikan di TPI kecamatan Paiton.

**Tabel 4.5**

Penjagaan Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta

No	Maqashid Syariah Tentang Menjaga Harta	Keterangan
1	Menjaga Harta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendapatkan modal dengan cara yang halal</li> <li>- Melakukan pencatatan, persaksian, dan dokumentasi dalam proses Transaksi lelang</li> </ul>

<sup>86</sup> Lihat, Ali Musa Husain, *Maqshodu Hifdzu al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah*, Disertasi, h. 147-150

		<p>ikan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Shodaqoh</li><li>- Tidak foya-foya atau boros</li></ul>
--	--	---

*Diolah Peneliti 2020*

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Untuk Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo**

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan salah satu 'ujung tombak' pemasaran hasil tangkapan di daerah pesisir yang berfungsi sebagai institusi/ lembaga pembentuk harga, yang diharapkan dapat memuaskan pelaku utama pelelangan yaitu pembeli (bakul) dan penjual (nelayan). Untuk itu peningkatan kualitas proses dan implementasi pelelangan ikan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Sebagai perangkat pemasaran hasil tangkapan di daerah pesisir, pelelangan dapat membentuk harga secara transparan sesuai dengan permintaan dan penawaran sehingga mampu menjamin peningkatan pendapatan baik dari sisi penyedia ikan maupun di sisi pembeli.

Adapun pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton sudah baik dan optimal dalam operasionalnya yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Dan sudah menimbulkan dampak penganda bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat nelayan Paiton yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan. Hal tersebut sesuai dengan temuan peneliti di lapangan bahwa Tempat Pelelngan (TPI) Paiton sudah menjalankan pelayanan dan operasioanalnya dengan baik dan fasilitas yang sudah memadai membuat peningkatan dalam usaha dan pendapatan masyarakat nelayan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.08/Men/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan bahwa TPI adalah Tempat Pemasaran Ikan (TPI) yang merupakan salah satu fasilitas fungsional dari pelabuhan perikanan. Pemasaran ikan dapat dilakukan secara langsung atau melalui pelelangan. Adapaun tugas dan fungsinya adalah mengelola sarana dan prasarana serta melakukan pelayanan terhadap segenap aktifitas kegiatan nelayan baik yang bersifat pembinaan maupun yang bersifat informasi. TPI kecamatan Paiton dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap segenap aktifitas ekonomi perikanan yang implementasinya sebagai pelayanan kegiatan kapal, pembinaan dan informasi terhadap kegiatan nelayan dalam hal penggunaan alat tangkap yang baik untuk meningkatkan produksi perikanan yang bermutu sehingga meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Paiton.

Seperti yang jelaskan diatas bahwa dalam Pemberian Pelayanan dan operasional fasilitas di TPI Kecamatan Paiton berdampak positif bagi nelayan Paiton dengan meningkatnya produksi ikan yang disebabkan penyediaan sarana produksi penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Paiton yang dibangun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sehingga mempermudah bagi nelayan untuk mendaratkan hasil tangkapan ikan, selain pelayanan fungsi TPI paiton sudah optimal sesuai dengan teori yang ada bahwa fungsi dan tujuannya sebagai berikut:

- a. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang

Upaya memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang ini sudah dilaksanakan dengan baik dengan menyiapkan sarana dan fasilitas pokok yang ada di TPI Paiton antara lain dermaga, kolam pelabuhan, breakwater, jalan dalam kompleks, drainase, alur pelayaran dan pagar Keliling pelabuhan perikanan yang sudah sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006 pasal 22 ayat 1 tentang pelabuhan perikanan adalah fasilitas pokok pelabuhan perikanan.

Kemudian TPI Paiton menyiapkan Fasilitas Fungsional antara lain, pasar ikan, instalasi listrik, Gudang es, tangki BBM/pom mini, instalasi air bersih, tempat perbaikan jaring, kantor, pos keamanan, kios, mes Petugas, tempat peribadahan/musholla, TPI Paiton memiliki berbagai fasilitas dalam menunjang kegiatan nelayan untuk meningkatkan produksi hasil tangkapannya maupun kegiatan pemasaran dengan sistem lelang yang dilakukan nelayan, tengkulak, dan pedagang yaitu fasilitas pokok, dan fasilitas fungsional yang dibutuhkan masyarakat nelayan di Kecamatan Paiton dalam meningkatkan usaha dan produksi dibidang perikanan.

b. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan

Pemberian pembinaan yang diadakan Tempat Pelelangan Ikan di kecamatan paiton oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Probolinggo biasa diadakan kegiatan sosialisasi dan pelatihan yang biasa dihadiri bakul dan nelayan bagaimana menjaga mutu ikan hasil tangkap tetap segar, pemindangan, ikan asap, untuk memberi motivasi kepada

bakul ikan dan nelayan dalam meningkatkan usaha perikanan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bakul dan keluarga nelayan.

c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan

Perikanan merupakan suatu kegiatan ekonomi dan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber dayaperikanan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan. Untuk itu Pemerintah Provinsi menyiapkan Tempat Pelelangan Ikan dan perlengkapannya serta jaminan terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam TPI, sebagai sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelaksanaan lelang.

Manfaat dari adanya TPI Paiton sangat jelas dapat dirasakan oleh masyarakat Nelayan Paiton, karena Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Paiton merupakan lini terpenting dalam Pelabuhan Perikanan untuk itu masyarakat nelayan dapat pula merasakan mafaat dari adanya TPI Paiton, diantaranya adalah : terdapat beberapa ruko atau kios yang dapat di sewa sebagai sarana berdagang, seperti : berjualan nasi, lauk pauk, sembako, es batu, pakaian dll. Dan dapat membuka kesempatan kerja dalam hal perikanan sehingga mengurangi angka pengangguran.

d. Meningkatkan pendapatan daerah

Terdapat peraturan retribusi yang harus di bayar oleh penjual/nelayan dan pembeli/pengusaha/pedagang, dimana peraturan tersebut terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi No. 3 Tahun 2011 yang

didalamnya terdapat pemberlakuan retribusi bagi nelayan sebesar 2,5% dari nilai hasil jual dan 2,5% bagi pedagang/pembeli dari jumlah hasil yang dibeli dari nelayan. Sehingga jumlah yang di peroleh sebanyak 5% yang sebagian harus di setorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi. Namun hal ini masih belum berjalan di Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.

e. Mempermudah data statistik

Dalam membuat data Tempat Pelelangan Paiton Kesulitan hal ini belum terstruktur organisasi proses lelang itu sendiri oleh lambaga TPI, ini menyebabkan kesulitan mengontrol para bakul dan nelayan saat proses lelang berlangsung.

Dalam pandangan ajaran Islam, segala sesuatu harus dilakukan secara rapih, benar, tertib dan teratur arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap dan cara mendapatkannya yang transparan merupakan awal perkataan yang dicintai Allah SWT. Tidak boleh seorang muslim melakukan sesuatu tanpa perencanaan, tanpa adanya penelitian, kecuali sesuatu yang bersifat darurat. Allah SWT sangat mencintai perbuatan-perbuatan yang terjaga dengan baik.<sup>103</sup>

Tujuan kinerja pengelolaan sistem lelang dengan rapih benar dan baik perlunya adanya stuktur organisasi dalam penyelenggara atau pelaksana pelelangan ikan agar memberikan secara jelas tugas dan tanggung jawab serta kedudukan masing masing pelaksana di TPI Paiton sesuai dengan teori, yaitu

---

<sup>103</sup> Al-Qur'an Surah Ahs-Shaff:4

stuktur organisasi penyelenggara atau pelaksana Pelelangan ikan pada umumnya:

1. Pimpinan Pelelelangan
2. Juru Tulis atau Tenaga Administrasi
3. Juru Lelang
4. Juru Timbang
5. Kasir (Bendahara Khusus)

Dari perlunya stuktur atau perorganisasian dilihat dari hasil observasi peneliti dan wawancara penulis, bahwa hal tersebut belum berjalan dan terealisasi dengan baik, dengan adanya stuktur yang terealisasi dan pengelolaan yang optimal akan membantu TPI Paiton melakukan Proses Lelang sendiri oleh lembaga yang tentu bertujuan mendapatkan harga ikan yang wajar, dan menambah pendapatan daerah dan tidak merugikan nelayan maupun pedagang atau bakul.

## **B. Kendala Kendala Proses Lelang ikan di Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo**

TPI Paiton dalam pengelolaan sistem lelang ditekankan pada proses pembenahan tata kerja pelelangan ikan di TPI Paiton.<sup>104</sup> Yaitu dengan mengedepankan keteraturan, ketertiban masyarakat nelayan, menata sistem pelelangan dengan membuat aturan restibusi, kesiapan bakul dalam mengikuti lelang dan menarik minat nelayan untuk melakukan lelang di TPI dengan

---

<sup>104</sup> Ulum, *Wawancara* (05 September 2020)

fasilitas dan sistem kerja yang menguntungkan pihak nelayan, bakul, dan TPI secara keseluruhan. Sehingga nelayan tidak lagi menjual ikan kepada pembeli (bakul) tanpa melalui proses lelang agar tidak merugikan pihak TPI serta dapat menguntungkan di semua pihak yang terlibat dalam proses pelelangan ikan.

Dengan adanya pembenahan tata kerja pelelangan di TPI Paiton dengan mengedepankan keteraturan dan ketertiban masyarakat nelayan serta menata kembali sistem pelelangan ikan dapat menghilangkan keterikatan modal pada nelayan yang saat ini terjadi di TPI Paiton agar praktik pelelangan ikan dapat berjalan dengan baik sesuai aturan yang ada. Selain itu, sistem retribusi pajak lelang dapat berjalan dengan baik, harga jual ikan stabil, dan pendapatan nelayan dapat naik sehingga kesejahteraan hidup diantara semua pihak yang terlibat akan menjadi lebih baik.

Keterikatan modal yang terjadi di TPI Paiton Kecamatan Probolinggo merugikan pihak TPI. Dengan kegiatan tidak resmi itu, keuntungan dan hasil pungutan retribusi kepada pemerintah daerah maupun provinsi menjadi berkurang. Hasilnya, keterikatan modal makin ramai dengan mengabaikan semua aturan yang menurut para pelaku perdagangan ikan memberatkan. Sedangkan, jika pengelolaan sistem lelang ikan di TPI Paiton yang sistematis mulai dari kapal nelayan datang sampai kesepakatan harga sebagaimana dijelaskan dalam bab II Mekanisme Pelelangan bagi TPI dapat berjalan dengan baik.

Pelelangan yang efektif memerlukan pengelolaan yang baik, transparan, dan memiliki keinginan untuk menjaga mutu produk yang dilelang. Semakin efektif dan efisien pelelangan ikan, semakin besar kemungkinan diperoleh harga yang optimal.

Dalam praktek lelang yang ada di TPI Paiton menurut observasi peneliti adalah keterikatan nelayan dengan pemberi modal atau tengkulak proses lelang dalam islam di sebut juga *muzayadah* berasal dari kata *zayadah* yang berarti tambah-menamba, yaitu menawar lebih tinggi dari pada yang lain.<sup>105</sup> Lelang adalah transaksi dalam Islam yang merupakan bagian dari mu'amalat dikenal sebagai bentuk penjualan barang di depan umum dengan sistem tawar menawar tertinggi.

Lelang dalam pandangan Islam di perbolehkan, seperti pada hadis HR Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan At-Tirmizi. Rasulullah SAW menawarkan 2 benda milik lelaki Anshar, rosul bertanya "*siapa yang mau membeli barang ini ?*" salah seorang sahabat beliau menjawab, "*saya mau membelinya dengan harga satu dirham*", lalu Nabi SAW bertanya lagi, "*ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal ?*" lalu salah seorang sahabat beliau ada yang menjawab lagi, "*saya mau membelinya dengan harga dua dirham*". Maka Nabi SAW memberikan 2 barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut.

---

<sup>105</sup> Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara PenterjemahPentafsiran Al-Qur'an), 160.

Dari hadist tersebut Nabi SAW memperbolehkan jual beli dalam bentuk lelang, jual beli lelang yang dilakukan juga harus sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa rukun dan syarat lelang yang dapat diaplikasikan dalam panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok diantaranya, transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela; objek lelang harus halal dan bermanfaat; kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual; kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan; dan tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun realita yang terjadi di TPI Paiton dalam praktik lelang oleh tengkulak selaku pemberi modal sebagai pengikat lelang terjadi saat nelayan kekurangan dalam akses permodalan. Pemberian modal diawali dengan pemberian uang dari tengkulak (bakul) kepada juragan kapal. Pemberian uang tersebut dengan kesepakatan hasil ikan tangkap dijual kepadanya. Namun, uang tersebut sebenarnya sebagai uang pengikat atas hasil tangkapan ikan nanti yang dihasilkan oleh nelayan. Hasil tangkapan ikan langsung diberikan kepada pembeli (bakul) yang sudah memberi uang tersebut tanpa melalui proses pelelangan tanpa melibatkan pihak kantor TPI Paiton sehingga dalam retribusi tidak berjalan dengan baik.

Sebagai penyelenggaran pelelangan ikan pengelola TPI berhak melakukan pungutan retribusi. Sesuai dengan undang-undang tentang pemerintahan daerah (terakhir UU No 23 tahun 2014) pengelolaan tempat

pemasarannya ikan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota yang didaerahnya terdapat TPI mengatur pedoman pelaksanaan pelelangan ikan melalui peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota.

Secara umum hal-hal yang diatur hampir sama yakni ; *pertama* kewenangan pengelola, *kedua* tata cara pungutan dan penyetoran retribusi, *ketiga* pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, sanksi dan pemanfaatan retribusi. Hal yang membedakan antara lain; Pihak yang mengoperasikan TPI berupa dinas perikanan atau dipihak ke-tigakan yakni koperasi, Besaran komposisi retribusi antara nelayan dan bakul, pemanfaatan hasil retribusi dan kewajiban bakul untuk menyerahkan deposit.

Berapa permasalahan pelelangan ikan di TPI Kecamatan Paiton yang menyebabkan lelang tidak berjalan dengan baik yaitu:

Keterikatan modal antara tengkulak dan nelayan di Kecamatan Paiton sangat kuatnya hubungan sosial, sehingga tengkulak selalu hadir setiap nelayan membutuhkan bantuan pinjaman baik kebutuhan subsistem dasar (pemberikan pekerjaan tetap, sarana prasarana, jasa pemasaran dan bantuan teknis) dan jaminan kritis berupa pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga.

Seperti yang dijelaskan peneliti sbelumnya bahwa peran *pengambek* atau tengkulak di TPI kecamatan Paiton sebagai pembeli ikan sekaligus memenuhi kebutuhan modal usaha dan membiayai kosumsi rumah tangga nelayan. Kosekuensinya nelayan berkewajiban menjual ikannya kepada *pengambak*. Pola hidup nelayan yang kosumtif sehingga jarang dapat

melunasi hutangnya, sehingga ketergantungan nelayan kepada *pengambak* akan terus menerus. Bagi nelayan keberadaan *pengambak* sangat membantu untuk mendapatkan pinjaman segera tanpa syarat yang diberlakukan jika meminjam ke perbankan.

Dari kendala-kendala dalam proses lelang maka keberadaan akses keuangan seperti koperasi atau perbankan menjadi salah satu solusi pemecahan permasalahan pelelangan ikan karena dapat menggantikan peran *pengambak* atau tengkulak yang membuat nelayan menjadi ketergantungan. Koperasi harus mampu menggantikan peran *Pengambak* dalam memenuhi dan menjamin kebutuhan nelayan.

Menurut Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2008 bahwa jika diambil-alih, pemerintah kabupaten/kota untuk mengelola TPI secara baik dan seluruh retribusi masuk kas daerah. Nelayan di Kecamatan Paiton bisa mendapatkan dana asuransi, dana paceklik, biaya kesehatan dan tabungan nelayan, sehingga dapat meningkatkan minat nelayan dalam mengikuti proses pelelangan di TPI Paiton.

### **C. Upaya Dalam Meningkatkan kesejahteraan Nelayan di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo Kajian Perspektif *Maqashid Syariah* Tentang Menjaga Harta**

Dalam pandangan ekonomi Syatibi, kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan *daruriyat* yaitu menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-`aql*), keturunan

(*hifz al- nasl*) dan harta (*hifz al-mal*), sebelum *hajiyat*.<sup>106</sup> dan *tahsiniyat*.<sup>107</sup>

Kebutuhan *daruriyat* merupakan kebutuhan pokok yang mesti terpenuhi oleh manusia agar mencapai kemaslahatan hidup. Imam Syatibi telah mengemukakan bahwa bahwa kemaslahtan manusia tercermin dalam kemampuannya dalam kebutuhan *daruriyat* mengacu pada empat hal pokok, yaitu ibadah, adat, muamalat, dan jinayat. Adapun ibadah tertuju pada menjaga agama misalnya keimanan dan pelaksanaan perintah wajib (rukun Islam), adat tertuju pada menjaga jiwa dan akal misalnya makan minum, pakaian, dan tempat tinggal. Muamalat tertuju pada perlindungan keturunan dan harta, sedangkan jinayat berkaitan dengan amar ma'ruf dan juga nahi munkar.<sup>108</sup> Menjaga harta merupakan cerminan dari kegiatan ekonomi yang wajib hukumnya untuk dipatuhi dan diamalkan oleh setiap orang guna untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Menurut Imam Syatibi menjaga atau memelihara harta sesuai dengan ketentuan maqashid syariah yaitu dilarangnya mencuri dan sangsi atasnya, dilarang curang dan berkhianat di dalam berbisnis, dilarangnya riba, dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, kewajiban mengganti barang yang telah dirusaknya. Masyarakat menengah keatas pada umumnya menyimpan sebagian pendapatannya guna diperuntukan pada masa yang akan datang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Tempat

---

<sup>106</sup> *Tahsiniyat* (bersifat perbaikan) yaitu kemaslahatan yang merujuk kepada moral dan etika, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju muru'ah dan berjalan di atas metode yang lebih utama dan jalan yang lebih baik. Lihat Jauhar, *Maqashid Syari'ah*, hlm. xvi.

<sup>107</sup> Abu Ishaq Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushul Al-Syari'ah*, II (Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah), Hlm. 8.

<sup>108</sup> Membedah kitab *al-Muwafaqat*. <http://rolandgunawan.blogspot.com/2007>

Pelelangan Ikan Kecamatan Paiton terhadap kesejahteraan nelayan di kecamatan Paiton dapat ditarik sebuah analisis kesimpulan bahwa kesejahteraan untuk nelayan jika dikaitkan dengan maqashid syariah maka kegiatan tersebut masuk dalam katagori *Daruriyat*. Hal tersebut menurut peneliti ditujukan memenuhi kebutuhan Primer yaitu meliputi sandang, pangan dan papan.

Para nelayan merupakan objek yang membutuhkan dana usaha dan fasilitas TPI Paiton untuk mempertahankan kelangsungan mata pencaharian dalam rangka memenuhi kebutuhan primer, yang tidak hanya berguna untuk kepentingan individu, akan tetapi juga untuk mencukupi kebutuhan seluruh keluarganya. Pengelolaan TPI paiton sangat berarti karena nelayan dapat mengembangkan dan meningkatkan kegiatan usaha dalam hal perikanan, sebagaimana dalam pandangan Syatibi menegaskan bahwa kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rejeki manusia, pemenuhan kebutuhan hidup, dan perolehan apa yang dituntut kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya, dalam pengertian yang mutlak.

Untuk itu pengelolaan tempat pelelangan ikan TPI Paiton memiliki dampak positif yakni dapat meningkatkan usaha, menambah lapangan kerja serta mengangkat masyarakat nelayan ke jenjang lebih baik, serta membantu keluar dari kesulitan ekonomi. Dimana pandangan ekonomi Syatibi kemaslahatan manusia akan terwujud apabila manusia mampu menjaga kebutuhan *daruriyat* yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan menjaga harta,

Untuk itu dalam ekonomi islam, harta memiliki fungsi yang terus di manfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini , syariat memberi batasan fungsi dan peran harta, yaitu Pertama untuk mendukung kegiatan peribadatan. Kedua untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah seperti bersedekah dengan harta. Ketiga untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. Keempat untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan di akhirat.

Harta adalah amanah dari Allah SWT, yang akan di pertanggung jawabkan. Bentuk pertanggungjawaban pemeliharanya dengan memperhatikan halal dan haramnya proses pendapatan, pengelolaan dan pengembangannya. Islam mengajarkan bahwa harta merupakan kebahagiaan dunia yang dianugerahkan oleh Allah SWT. untuk hambanya. Keberadaannya sangat dianjurkan guna kelancaran hidup manusia. Namun diingatkan dalam Islam bahwa harta bukanlah tujuan utama dari kehidupan manusia. Keberadaannya digunakan sebagai penunjang kebutuhan dunia dan akhirat.

Ditematkannya menjaga harta pada point terakhir dalam maqashid syariah al-Syatibhi yaitu dengan adanya aturan kepemilikan harta yang ketat, sehingga lahirnya aturan dalam mu'amalah seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, dan sebagainya. Sesuai apa yang didapat peneliti dari hasil observasi kondisi lingkungan nelayan Paiton bahwa keterikatan modal antara tengkulak dan nelayan pengelolaan dan pemanfaatnya yang mampu

memenuhi kebutuhan hidup, dimana dapat membantu nelayan Paiton. Ketika berhubungan dengan modal nelayan dalam muamalah, tengkulak memerhatikan aspek kehalalannya modal yang diberikan kepada nelayan demi keberkahan dalam usaha perikanan. Selain itu juga memerhatikan konsep kesejahteraan tentang menjaga harta dalam sistem ekonomi islam yang perlu di perhatikan dalam menjaga harta sebagai kegiatan muamalah yaitu dengan pencatatan, persaksian dalam transaksi, dan dokumentasi<sup>87</sup>.

Hal ini sesuai dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT:

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)*

---

<sup>87</sup> Ali Musa Husain, *Maqshodu Hifdzu al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah*, Disertasi, h. 147-150.

*kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.s. al-Baqoroh 2: 282).*

Dengan pencatatan, konsep maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah, menghilangkan keraguan diantara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang menguranginya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian, konsep maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah, menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi. Dan dengan penyertaan dokumentasi, konsep maslahat memelihara harta dalam sistem ekonomi Islam yang dimaksud adalah, menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.

Harta yang banyak bukanlah indikator kesuksesan seorang hamba. Kesuksesan dimata Allah hanya dimiliki oleh orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan mampu menggunakannya untuk kebermanfaatan diri, orang lain serta agama dengan orientasi akhirat. masyarakat nelayan paiton menyadari bahwa penggunaan harta tidak semata menyangkut

masalah dunia melainkan juga akhirat. Hal ini disampaikan Bapak H.Hamid bahwa, tidak memanfaatkan rezeki yang diberi oleh Allah SWT secara foya-foya yang tidak ada manfaatnya lebih baik di shodaqoh.<sup>126</sup> diterapkannya dengan tidak berlaku foya-foya dan menggunakannya sesuai kebutuhan, dan tidak lupa dari sebagian rejekinya dibuat shodaqoh demi keberkahan dalam aspek menjaga harta. Kedudukan harta adalah sebagai bekal ibadah, harta digunakan untuk melaksanakan perintahnya dan muamalah dianantara sesama manusia, melalui shodaqoh, infak, dan zakat, Allah berfirman:

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

Arinya: “Berangkatlah kamu baik dalam Keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”. (Q.s At-Taubah:41)<sup>127</sup>

Dengan memerhatikan ayat diatas, harta adalah titipan Allah yang perlu kita manfaatkan sesuai dengan tuntunannya, yaitu bekerja (mencari harta) dijalan Allah, dan berjihadlah dengan harta dan diri kalian, seperti, bershodaqoh yang berguna untuk menyucikan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat. Pengelolaan dan pemanfaatan harta harus diperhatikan betul karena dapat menjerumuskan seseorang dalam kesesatan dalam dunia dan akhirat. seperti firman Allah SWT:

<sup>126</sup> H hamid, *Wawancara* (Probolinggo, 10 September 2020)

<sup>127</sup> Q.s, Al-Taubah:41

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿٩﴾

Artinya:” Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.(Q.S Al-Munafiqun:9)<sup>128</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa, upaya menjaga harta ialah dengan memanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia, agama, ekonomi dan sosial, pemanfaatan harta oleh masyarakat Nelayan adalah memerhatikan modal yang didapat tidak dari hasil perjudian, maupun menipu orang lain melainkan dengan cara yang halal. Tidak memanfaatkan harta yang didapat dengan cara yang salah yaitu dengan foya-foya, dan mendedekahkan sebagian harta yang didupatkannya.

---

<sup>128</sup> Q.s Al-Munafiqun,9

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan sebagaimana yang sudah dijelaskan dari masalah dalam fokus penelitian dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Tepat Pelelangan Ikan (TPI) Paiton dilakukan dengan melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai mengelola sarana dan prasarana serta melakukan pelayanan terhadap segenap aktifitas kegiatan nelayan baik yang bersifat pembinaan maupun yang bersifat informasi. TPI kecamatan Paiton dalam memberikan pelayanan yang optimal terhadap segenap aktifitas ekonomi perikanan yang implementasinya sebagai pelayanan kegiatan kapal, fasilitas pokok yang sediakan oleh TPI Paiton sudah dipergunakan dengan baik oleh nelayan begitupun dengan fasilitas fungsionalnya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan.
2. Produksi perikanan di TPI Paiton meningkat disebabkan oleh penyediaan sarana produksi sehingga mempermudah nelayan dalam mendaratkan hasil tangkapan dan juga pemasarannya, namun produksi ikan mengurang dikarenakan cuaca dan terang bulan (*terak bulen*) para nelayan tidak bisa melaut atau nelayan.

3. Aktifitas kinerja pengelolaan TPI Paiton biasanya jam 23:00-04:00 dari kapal berlabuh kedermaga kemudian mendaratkan hasil tangkapan, penyortiran, dan kemudian melakukan proses lelang yang dilakukan oleh bakul dan konsumen. Namun TPI Paiton masih belum melakukan Proses Lelang sendiri dikarenakan beberapa kendala yaitu: *Pertama*, harga ikan yang dilelang oleh TPI paiton cenderung lebih murah. *Kedua* keterikatan modal kepada tengkulak *Pengambek* dan kurangnya akses permodalan bagi nelayan. *Ketiga* masih ada biaya pajak penjualan ikan
4. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan TPI untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan di Kecamatan Paiton sudah tercapai dalam maqashid syariah tentang menjaga harta perspektif Asy-Syatibi. Yaitu, terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat* dalam konsep yang disyaratkan,. Terpenuhi aspek *dharuriyyat* otomatis terpenuhi juga aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.
5. Upaya dalam meningkat kesejahteraan masyarakat nelayan di Kecamatan Paiton dalam menjaga harta dalam pandangan maqashid syariah dengan membantu masyarakatn nelayan dalam memberikan modal dan dan saat muamalah melakukan pencatatan, persaksian, dan dokumentasi agar terhidar dari penipuan, dan kelalaian.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan pengelolaan sistem lelang sendiri oleh instansi pemerintah di Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, maka harus dilakukan dengan memperbaiki manajemen TPI sehingga bisa membenahi tatakerja yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan, melibatkan pemerintah agar tidak terjadi kerugian bagi pihak TPI dan semua yang terlibat dalam proses lelang, dan juga upaya untuk menghilangkan keterikatan modal antara nelayan dan tengkulak.
2. Memberi akses permodalan yaitu dengan koperasi atau perbankan yang dapat membantu nelayan mendapatkan pinjaman modal dengan mudah, dan koperasi juga mampu menstabilkan harga meski musim puncak, koperasi juga harus merangkul tengkulak atau bakul sebagai anggota, dan mampu menyediakan sarana produksi dan pembekalan untuk melaut.
3. Dari keterbatasan peneliti, diharapkan peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan penelitian yang berkaitan pengelolaan tempat pelangan ikan TPI untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan sehingga dapat membantu melakukan Pengelolaan lelang sendiri yang dilakukan oleh instansi atau lembaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agnes Puspitasari Sudarmmo Dkk, *Social Economics Characteristics Of Coastal Small-Scale Fisheries In Tegal City, Indonesi*, International Journal Of Scientific & Technology Research Volume 4,2015.
- Abu Ishaq Al-Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushul Al-Syari''ah*, II (Arab Saudi: Kementerian Agama Wakaf dan Dakwah),
- Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibnu Muhammad ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t),
- Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam dalam Ihya' Ulumudin*, Surabaya: Bina Ilmu, 2010.
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Ahmad Ibrahim Abu Sin, *Manajemen Syariah:Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqoshid Syariah Menurut Al-Syathibi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Badan Pusat Statistik Indonesia 2005
- Basrowi, Suwandi, *memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis keArahRagam Varian Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers. 2001.
- Chelsea E. Hunter DKK, Maneuvering towards adaptive co-management in a coral reef fishery*, Marine Policy. Vol.98, page 77-84. 2018.
- Choliq Sabana dkk, *kajian strategi pengembangan tempat pelelangan ikan TPI pekalongan*, jurnal Litbang, 2016.

- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Jogjakarta: Total Media, 2009.
- Djam'an Satori & Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Dyah Pramitasari DKK, *Analisis Efisiensi Tpi (Tempat Pelelangan Ikan) Kelas 1, 2 Dan 3 Di Jawa Tengah Dan Pengembangannya Untuk Peningkatan Kesejahteraan Nelayan*, Jurnal pasir laut, 2006.
- Dhini Nadia, dan Sunning, *Studi Penataan Prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Juanda Berbasis Clauster*, Jurnal Teknik, 2014.
- Dinas Perikanan Kabupaten Probolinggo 2019
- Dwiyanti, H. *Kajian Pengelolaan Aktivitas Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhan Sukabumi Jawa Barat*, Bogor: fakultas perikanan dan ilmu kelautan, 2010.
- Drs. Lincoln Arsyad, Msc. *Ekonomi Mikro*, Jakarta: Gemapress, 1999.
- Endang Retnoyanti, *Nelayan Indonesai Dalam Pusaran Kemiskinan Struktural (Perspektif Sosial, Ekonomi, Dan Hukum)*. Vol XVI, No3
- Faubiany, *Kajian Sanitasi Di Tempat Pendaratan Ikan Dan Tempat Pelelangan Ikan Di Muara Angke Serta Pengaruhnya Terhadap Kualitas Ikan*, Bogor: fakultas perikanan dan ilmu kelautan, 2008.
- Haryani dan Akhmad Fauzy, *The Management Of Marine Protected Area Of raja Ampat Regency, West Papua Province Through Bioeconomic Model Approach*, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 278, 2019.
- Hasan Aedy, *Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Husain, Musa, Dr. Ali, *Maqshodu Hifdzu al-Mal fi al-Tashorufat al-Maliyah*, Disertasi.
- Hanafiah, dan Saefuddin, *Tata Niaga Hasil Perikanan*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2006.
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20161024/99/595438/perikanan-tangkap-di-probolinggo-belum-terseentuh-lembaga-pembiayaan>, di publikasikan 24 oktober 2016

- Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ika Yunia Fauzan dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, Jakarta: Pramedia Group, 2017.
- I Made Gunarsa Putra Dkk, *Analisis Pagaruh Faktor Produksi, Sosial Demografi, Dan Modal Sosial Terhadap Produktivitas Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kabupaten Tabanan*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 6.5,2017.
- Ikhwan Abidin Basri, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005.
- Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, Jakarta Rajagrafindo Persada, 2017.
- Ismail Kucukaksoy, “*Adam Smith’s Conceptual Contributions To International Economics Based on The Wealth of Nations*”, *Business and Economic Horizons*, 4 January, 2011.
- Jamhari Makruf (eds), *Islam Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari’ah*. Bandung: Mizan Pustaka, 2015..
- Jonh W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan mixed*, Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010.
- Kementrian Agama RI, *Syaamil Al-Qur’an Miracle The Reference*, Bandung: Sygma, 2010.
- Lubis, *Pengantar Pelabuhan Perikanan*, Bogor: fakultas perikanan dan ilmu kelautan, 2006.
- Marindi Briska Yusni, dan Eko Budi Santoso, *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengembangan subsektor Perikanan Tangkap di Pesisir Selatan Kabupaten Tulungagung Dengan Konsep Pengembangan Ekonomi Lokal*, Jurnal Teknik ITS. Vol 6. No 02
- Mardani, Mahdiana, Junaedi, *Analisis Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Peleleangan Ikan (TPI) Untuk Peningkatkan Kesejahteraan Nelayan di*

*Wilayah TPI Tegal Sari, Kota Tegal Jawa Tengah, jurnal Kelautan, Volume 11, No 1 2018.*

Martadiningrat, Yussuf Solichien.(2008). *Pola Pikir Tidak Berubah, 90 Persen Nelayan di Bawah Garis Kemiskinan*. IndonesiaOtime.com, diakses pada tanggal 4 April 2009.

Marry Parker Follet, *Membangun Sistem Pelayanan Publik Yang Memihak Rakyat*, POPULASI Vol 13 (1),

Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Edisi kedua, Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Manajemen, 2010.

Mardani, *Ayat-Ayat dan hadis Ekonomi syariah*, PT Rajagrafindo Persada, jakarta 2012,

Mahmud Junus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an.

Muhammad Akram Khan, "Methodology of Islamic Economics" dalam Aduit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics* ,Petaling Jaya: Pelanduk Publications, 1989.

Mustaf Edwin Nasution and others, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.

Murdiyanto, *Pelabuhan Perikanan. ED 2*. Bogor, fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, 2003

Michel Quin Patton, *Metode Evakuasi Kualitatif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006.

Membedah kitab *al-Muwafaqat*. <http://rolandgunawan.blogspot.com/2007>

M.Djunaidi Ghong dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta:Ar-Ruzz media, 2017.

Ni Putu Eka Widiastuti Dkk, *The Local Government's Supply Chain Strategy to Empower the Traditional Fishermen in Southern Coast of Java Island*, International Conference on Business and Management Research, Vol 36, 2017.

- Noeng Mujhir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2003.
- Peter Salim dan Yenny Salim. Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka. 2002.
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- P. Jeyanthi Dkk, *Institutional Development and Efficiency of Fishermen Cooperatives in Marine Fisheries: A Case Study from Kerala*, fishery Tecnology 55, 2018.
- Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemah Tafsir Singkat Ibnu Katsir Jilid I*, Surabaya; Binal Ilmu, 1988.
- Soewarno Handyaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: Haji Masagung. 1994.
- Suherman, Dault, *Analisis Dampak Sosial Ekonomi Keberadaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Lamongan Jawa Timur*, jurnal saintek perikanan, vol.5, No.1
- Suharsimi Arikunta, *pengelolaan kelas dan siswa*, jakarta : CV. Rajawali, 1988.
- Sugondo, Dendi, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa, 2008.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sri Hartanti, Rinda Noviyanti, Lina Warlina, *Strategi Pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (TPI) Gebang Kabupaten Cirebon Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan*, Jurnal Matematika Sains dan Teknologi, 2019.
- Steven W. Purcell Dkk, *Distribution Of Economic Returns In Small-Scale Fisheries For International Markets: A Value-Chain Analysis*, Marine Policy 86, Hal 9=16, 2017.
- Teuku Junaidi dkk, *Institutional And Management Analysis Of The Auction Fish Place (Afp) For Improving Fishermen's Welfare In Tegalsari Afp, Tegal City, Central Java*, E3S Web of Conferences 47, 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial, 2

Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Umer Chapra, *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqāsid Al-Sharī,ah*, The International Institute of Islamic Thought, 2008.

Yusuf Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual Dan Aliran Liberal*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.

Bahrul Ulum, *Wawancara* (Probolinggo 05 September 2020)

Sipol, *Wawancara* (Probolinggo 07 September 2020)

Azmi, *Wawancara* (Probolinggo 07 September 2020)

Hj.Rahmah, *Wawancara* (Probolinggo 07 septmber 2020)

H. Hamid, *Wawancara* (Probolinggo 10 september 2020)

## LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No. 34 Batu 65323, Telepon & Faksimile (0341) 531133  
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-088/Ps/HM.01/09/2020  
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

25 September 2020

Kepada  
Yth. Ketua Tempat Pelelangan Ikan  
di Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, maka dengan ini mohon kepada Bapak/Ibu untuk berkenan memberi ijin kepada mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian pada lembaga yang Bapak/Ibu pimpin;

Nama : Moh Airur Rizqi  
NIM : 17801012  
Program Studi : Magister Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : 1. Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag  
2. Prof. Dr. Achmad Sani Supriyanto, SE., M.Si  
Judul Tesis : Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kecamatan Paiton Probolinggo (Kajian Perspektif Maqashid Syariah)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*





**PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO DINAS PERIKANAN  
UPT TPI PAITON**  
Jl. Lapangan Tembak Sumber Anyar Kecamatan Paiton Kab. Probolinggo  
Probolinggo, Jawa Timur 67291

**SURAT IJIN PENERIMAAN PENELITIAN**

Nomer: 157/25/II/2020

Berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Nomer B-088/Ps/HM.09/2020 tanggal 25 September 2020, dengan:

Perihal : Jawaban Permohonan Ijin Penelitian  
Nama : Moh. Ainur Rizqi  
NIM : 17801012  
Alamat : Paiton Probolinggo  
Tema/Judul : Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Nelayan di Kecamatan paiton Probolinggo (Kajian Perspektif Maqasyid Syariah)  
Lama Penelitian : Mulai 26 September s/d 27 November 2020

Selanjutnya penelitian tersebut atas Nama Dinas Perikanan TPI Paiton menerima dan bersedia untuk memfasilitasi dalam bentuk administrasi kebutuhan penelitian.

Demikian surat ijin penerimaan penelitian ini di Buat untuk kepentingan seperlunya.

Dikeluarkan di: Kota Probolinggo  
Pada Tanggal : 26 September 2020  
Kepala Dinas Perikanan Probolinggo



1. Kisi-kisi wawancara

No	Informan	Kisi-kisi Pertanyaan
1	Kepala TPI	9. Sejarah Berdirinya TPI Kecamatan Paiton 10. Tujuan dan Visi, Misi TPI Paiton 11. fasilitas TPI 12. pengelolaan TPI 13. Sistem lelang 14. Peran TPI dalam meningkatkan Kesejahteraan 15. kendala-kendala dalam proses Lelang 16. Pemasukan daerah
2	Pedagang/Tengkulak	6. Proses Lelang 7. penentuan harga jual beli 8. Akses modal 9. Bagi hasil 10. Lokasi penjualan
3	Nelayan	9. Pendapatan sebelum dan sesudah adanya TPI 10. Kontribusi TPI 11. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga 12. Keadaan tempat tinggal 13. Fasilitas tempat tinggal 14. Kesehatan anggota keluarga 15. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 16. Kemudahan memasukkan anak kejenjang pendidikan

2. foto wawancara



Suasana Tempat Labuh Kapal di TPI Kecamatan Paiton



Proses lelang ikan hasil tangkap nelayan di TPI Kecamatan Paiton



Wawancara kepada Bpk. Bahrul Ulum selaku Kepala TPI Paiton



Wawancara kepada P.sipol selaku masyarakat nelayan



wawancara ke b.Suliha selaku masyarakat nelayan Kecamatan Paiton

